

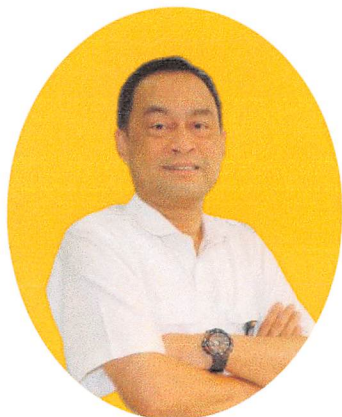


LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL BINA
KONSTRUKSI TA 2022**

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2022” dapat diselesaikan dengan baik. LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Bina Konstruksi atas penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR.

Pada Tahun Anggaran 2022, DJBK yang terdiri atas 48 (empat puluh delapan) satuan kerja telah menggunakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebesar 96,34% atau 622,77 Miliar dari pagu anggaran 646,45 Miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi target Sasaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan indikator “Tingkat SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional” sebesar 100% dari target sebesar 80%, dan Sasaran Program Dukungan Manajemen dengan indikator “Tingkat kualitas sumber daya konstruksi” sebesar 70,33% dari target 57%. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil konsolidasi kinerja seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2022, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PUPR dan peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Jakarta, 13 Januari 2023
Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.
NIP. 196610211992031003



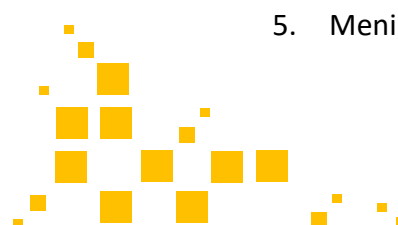
RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi periode 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melaksanakan berbagai program melalui unit kerjanya untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga turut **mendukung 2 (dua) sasaran strategis** pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu **SS.4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan SS.5 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya**. Kedua indikator dari masing-masing sasaran strategis diatas yaitu IKSS.4 Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan **capaian 2022** sebesar **11,32%** dari target 6%; dan IKSS.5 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi, dengan capaian sebesar **70,33%** dari target 57%.

Dalam mendukung sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi melalui **2 (dua) program** yaitu Program **Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** dan Program **Dukungan Manajemen** pada periode 2020-2024. Kedua Sasaran Program tersebut yaitu (1) Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

Dalam mewujudkan Program tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa;
4. Meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
5. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;

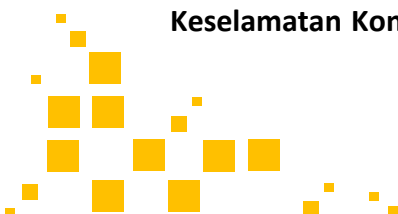


6. Meningkatkan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi;
7. Meningkatkan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan

Di Tahun Anggaran 2022, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **memenuhi target** Sasaran Program dengan indikatornya sebagai berikut: (1) Tingkat SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan **capaian 100%** dari target 80%; dan (2) Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengan **capaian 70,33%** dari target 57% dengan Subindikator Kinerja Program yaitu (1) Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, (2) Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi, (3) Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi. Namun jika dirinci hingga Sasaran Keegiatannya, terdapat **satu sasaran kegiatan yang tidak tercapai** targetnya, yaitu: SK.3 Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (**SMKK**) dengan **capaian 97,1%** dari target 100%.

Dari target yang tidak tercapai tersebut **disebabkan** masih **terjadinya 4 kecelakaan** konstruksi di tahun 2022. Secara umum, masih terjadinya kecelakaan konstruksi disebabkan oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM dan permasalahan peralatan. Permasalahan SDM khususnya disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan metode kerja dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Selain itu dalam penerapan SMKK juga masih menemui kendala keterbatasan SDM dan kompetensi ahli bidang konstruksi berkelanjutan, pengendalian yang tidak dianalisis secara menyeluruh, serta masih adanya *unsafety act* dari pekerja dan *unsafety condition* dari lingkungan kerja. Sedangkan permasalahan peralatan utamanya disebabkan karena masih rendahnya pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan berkala.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, beberapa **rekomendasi** sebagai langkah perbaikan pada tahun anggaran berikutnya, antara lain: (1) Pelaksanaan kegiatan **refreshment pengawas** untuk menjaring pengawas-pengawas dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah; (2) **Pemantauan dan Evaluasi pada Proyek** Konstruksi dengan Potensi Bahaya Tinggi oleh Komite Keselamatan Konstruksi; (3) **Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)** untuk Tingkat General Manajer Kontraktor, Pemimpin Tim, Insinyur Ahli (Konsultan Pengawas), Mahasiswa, dan Tenaga Terampil; (4) **Sertifikasi K3** Konstruksi dan Petugas Keselamatan Konstruksi; (5) Memasukkan **aspek pengaturan Keselamatan Konstruksi** pada kebijakan pengadaan jasa konstruksi (Peraturan LKPP No. 12



Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia) ; (6) **Mengubah kategori proyek** dari 2 (dua) kategori menjadi 3 (tiga) kategori untuk lebih mencerminkan kebutuhan penyedia jasa yang sesuai dengan tingkat risiko dan melihat kebutuhan yang tersedia untuk Ahli K3 Konstruksi dan Petugas Keselamatan Konstruksi; dan (7) **Pemberdayaan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi** sebagai *second line defense* terhadap kecelakaan konstruksi, antara lain dengan pengaturan izin bekerja (*permit to work*) dan *checklist* pekerjaan yang harus ditandatangani Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	4
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	5
1.4 ISU STRATEGIS	13
BAB 2.....	36
PERENCANAAN KINERJA	36
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA	36
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	43
2.3 METODE PENGUKURAN	52
2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA	58
BAB 3.....	64
KAPASITAS ORGANISASI.....	64
3.1 SUMBER DAYA MANUSIA	64
3.2 SARANA DAN PRASARANA	68
3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)	73
BAB 4.....	78
AKUNTABILITAS KINERJA	78
4.1 CAPAIAN KINERJA.....	78
4.2 PERBANDINGAN KINERJA	144

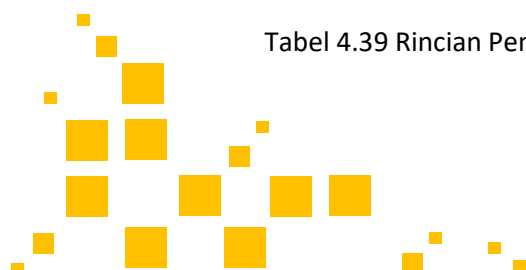
4.3 REALISASI ANGGARAN	154
4.4 ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA	158
4.5 ANALISIS KINERJA ORGANISASI (<i>BENCHMARKING</i> DENGAN UNIT ORGANISASI LAIN).....	160
BAB 5.....	163
PENUTUP.....	163
LAMPIRAN.....	166
1. PERJANJIAN KINERJA.....	166
2. PENGHARGAAN	168
3. BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA	171
4. DOKUMENTASI KEGIATAN	172



DAFTAR TABEL

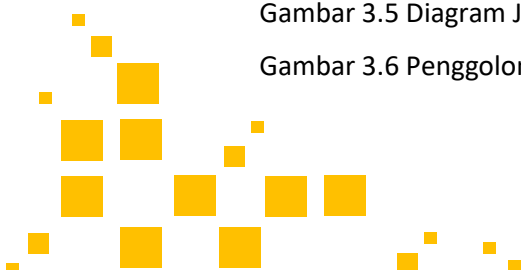
Tabel 1.1 Asosiasi Badan Usaha yang Terakreditasi	25
Tabel 2.1 Target Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024 ..	59
Tabel 2.2 Target Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024 ..	60
Tabel 2.3 Target Anggaran Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024	62
Tabel 3.1 Luasan Bangunan dan Tanah Keseluruhan Aset DJBK TA 2022.....	69
Tabel 3.2 Detil Aset Tanah dan Bangunan DJBK	71
Tabel 3.3 Rincian Anggaran Per Jenis Belanja DJBK Berdasarkan DIPA Awal TA 2022	73
Tabel 3.4 Rincian Anggaran Per Satuan Kerja di Lingkungan DJBK Berdasarkan DIPA Awal dan Revisi TA 2022	74
Tabel 3.5 Kronologis Revisi Anggaran DJBK TA 2022	75
Tabel 4.1 Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022 ..	79
Tabel 4.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan di Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi TA 2022.....	81
Tabel 4.3 Capaian Output SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina.....	82
Tabel 4.4 Rincian Capaian DIPA/PK SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina	83
Tabel 4.5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang Mendukung Program Dukungan Manajemen TA 2022	85
Tabel 4.6 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	88
Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Survey Daftar SIMAK 2022.....	90
Tabel 4.8 Capaian Output Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi.....	91
Tabel 4.9 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.....	94
Tabel 4.10 Rincian Hasil Perhitungan Sub indikator yang Mendukung IKK 2	97
Tabel 4.11 Capaian Output Kegiatan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan BP2JK	99
Tabel 4.12 Capaian Kinerja SK Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.....	105
Tabel 4.13 Capaian Output Kegiatan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	107
Tabel 4.14 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	108
Tabel 4.15 Detil Capaian IKK 4.1 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat...	110
Tabel 4.16 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Renstra	111
Tabel 4.17 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan PK	112

Tabel 4.18 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Khusus IKN Berdasarkan PK	112
Tabel 4.19 Capaian Output Kegiatan Laporan Fasilitas Pembinaan Jasa Konstruksi	113
Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 4.2 Persentase Tingkat Dukungan Pelatihan/Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.....	114
Tabel 4.21 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	115
Tabel 4.22 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pembinaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi	127
Tabel 4.23 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 5.1 Tingkat Kinerja Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Bidang Konstruksi	130
Tabel 4.24 Capaian Output Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.1.....	131
Tabel 4.25 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.2.....	132
Tabel 4.26 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.3.....	133
Tabel 4.27 Capaian Kinerja SK Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	135
Tabel 4.28 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.1.....	138
Tabel 4.29 Hasil Perhitungan Sub Indikator IKK 6.2 Tingkat Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.....	139
Tabel 4.30 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.2.....	142
Tabel 4.31 Capaian Sasaran Program DJBK TA 2020 terhadap Target Renstra 2020-2024 .	144
Tabel 4.32 Capaian Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen DJBK TA 2022	145
Tabel 4.33 Perbandingan Capaian Sasaran Program (Renstra 2020-2022).....	147
Tabel 4.34 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan (Renstra 2020-2022).....	148
Tabel 4.35 Gugatan Bidang PBJ pada Pengadilan dibawah Lingkup MA Tahun 2022	152
Tabel 4.36 Pendampingan Penanganan Perkara Januari-Desember 2022 terkait PBJ	152
Tabel 4.37 Realisasi Anggaran Per Unit Organisasi Kementerian PUPR TA 2022	154
Tabel 4.38 Rincian Penyerapan Satuan Kerja di Lingkungan DJBK TA 2022	155
Tabel 4.39 Rincian Penyerapan Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan DJBK TA 2022	157

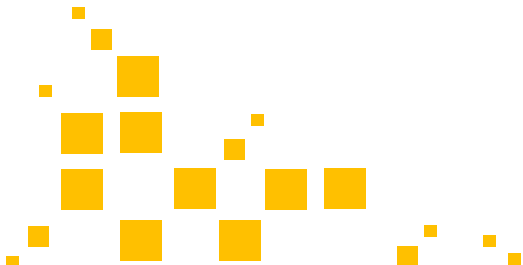


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.....	6
Gambar 1.2 Data Kecelakaan Kerja di Indonesia Tahun 2019-2022	20
Gambar 1.3 Sistem Informasi Manajemen Pengalaman (SIMPAN) yang interoperable dengan beberapa sistem.....	23
Gambar 2.1 Peta Strategis DJBK.....	39
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	44
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	44
Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi ...	45
Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi.....	45
Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	46
Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi.....	46
Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi.....	47
Gambar 2.9 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.....	47
Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	49
Gambar 2.11 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.....	49
Gambar 2.12 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi	50
Gambar 2.13 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi	50
Gambar 2.14 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi.....	51
Gambar 2.15 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi.....	51
Gambar 2.16 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.....	52
Gambar 3.1 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status	65
Gambar 3.2 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
Gambar 3.3 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	66
Gambar 3.4 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	67
Gambar 3.5 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	68
Gambar 3.6 Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.....	69



Gambar 6.1 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	166
Gambar 6.2 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	167
Gambar 6.3 Penghargaan Pegawai Muda Teladan Kementerian PUPR 2022	169
Gambar 6.4 Juara 2 Lomba Cerdas Cermat dalam rangka Hari Bakti PUPR ke-77.....	169
Gambar 6.5 Penyerahan Sertifikat SNI ISO 370001:2016 SMAP kepada BJKW III Jakarta...	170
Gambar 6.6 Penyerahan Sertifikat SNI ISO 370001:2016 SMAP kepada BP2JK Wilayah Sulawesi Utara.....	170
Gambar 6.7 Berita Acara Kesepakatan Laporan Kinerja DJBK Tahun 2022	171
Gambar 6.8 Kegiatan Konstruksi Indonesia 2022	172
Gambar 6.9 Kuliah Umum Dirjen Bina Konstruksi di Universitas Andalas Padang	172
Gambar 6.10 Kunjungan Kerja Dirjen Bina Konstruksi ke Asbuton Bau-Bau	173
Gambar 6.11 MoU DJBK dengan Universitas Indonesia	173
Gambar 6.12 Pelatihan Operator Launching Girder	174
Gambar 6.13 Rapat Koordinasi DJBK TA 2022	174
Gambar 6.14 Pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Untuk Penyiapan Pembangunan Infrastruktur IKN	175



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pengganti Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja, perjanjian kinerja dan rencana tindak yang merupakan bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun sistem kinerja dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui upaya: merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi presiden.

Selain itu, berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, maka diperlukan adanya evaluasi atas implementasi SAKIP yang salah satu komponen pentingnya adalah informasi evaluasi terkait tingkat kemajuan/perkembangan (progres). Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan guna membantu pengawasan agar kegiatan tetap berada dalam alurnya. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terhadap SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021, nilai SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah 79,28 dengan interpretasi nilai BB (Sangat Baik). Nilai tersebut mengalami peningkatan dari hasil penilaian dan evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020 dikarenakan terdapat peningkatan nilai pada komponen capaian kinerja di TA 2021. Namun meski nilai evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 mengalami peningkatan, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki pada tahun selanjutnya, yaitu:

A. Perencanaan Kinerja

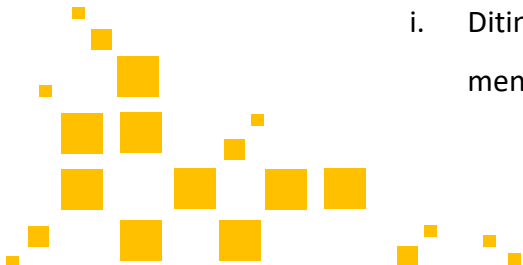
1. Sub komponen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT):

- a. Masih terdapat kelemahan dalam Dokumen Rencana Aksi, yaitu:
 - i. Belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Capaian Rencana Aksi memiliki hubungan kasualitas dengan capaian Perjanjian Kerja;
 - ii. Dokumen Rencana Aksi belum direviu terkait adanya perubahan/Revisi Perjanjian Kinerja;
 - iii. Rencana Aksi belum menjelaskan secara detail Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) secara periodic hanya mencantumkan Target Keuangan dan Fisik dari Aplikasi e-Monitoring Kementerian PUPR.
- b. Capaian target kinerja belum dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward);
- c. Monitoring Rencana Aksi telah dilakukan, namun masih terdapat kondisi sebagai berikut:
 - i. Belum terdapat mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja;
 - ii. Setiap ada deviasi dari Rencana Aksi belum dilakukan analisis dan dicari alternatif solusi;
 - iii. Pemanfaatan Rencana Aksi terbatas hanya pada pelaporan atau dokumentasi, belum terdapat bukti yang menunjukkan adanya pemanfaatannya dalam proses kegiatan.

B. Pengukuran Kinerja

1. Sub komponen Implementasi Pengukuran:

- a. Sistem *reward and punishment* belum memiliki hubungan dengan capaian kinerja pegawai;
- b. Hasil pengukuran Rencana Aksi yang disajikan dalam Laporan Monev Bulanan berikut:
 - i. Ditindaklanjuti untuk mengambil tindakan (*action*) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan;



- ii. Setiap Ditindaklanjuti untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- iii. Mencantumkan target kinerja, hanya mencantumkan target keuangan dan fisik.

C. Pelaporan Kinerja

1. Sub komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja:

- a. Belum terdapat informasi yang menunjukkan bahwa informasi kinerja dalam LAKIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan;
- b. Belum terdapat informasi yang menunjukkan bahwa LAKIP TA 2020 dan TA 2019 telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja.

D. Evaluasi Internal

1. Sub komponen Pemenuhan Evaluasi:

- a. Evaluasi Rencana Aksi dilakukan setiap bulan dengan hasil berupa Laporan Monev Bulanan. Namun belum ada analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencanaagenda yang memadai.

2. Sub komponen Kualitas Evaluasi:

- a. Evaluasi SAKIP tingkat Unit Kerja/UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 telah dilaksanakan mulai tanggal 7 Februari 2022, namun sampai dengan pembahasan Berita Acara (BA) Hasil Kesepakatan Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang dilakukan 22 Februari 2022, Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tingkat Unit Kerja/UPT masih dalam proses penyusunan.

3. Sub komponen Pemanfaatan Evaluasi:

- a. Belum disampaikan bukti dokumentasi tindak lanjut hasil rekomendasi Evaluasi SAKIP Unit Kerja/UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 karena Laproan Hasil Evaluasi masih dalam proses penyusunan;
- b. Pemantauan terhadap Rencana Aksi dalam bentuk Laporan Monev Bulanan belum menyajikan/memberikan rekomendasi alternatif perbaikan jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

1. Sub komponen Kinerja yang dilaporkan (*Outcome*):

a. Masih terdapat kelemahan dalam penyajian informasi perhitungan Capaian *Outcome*, yaitu

i. Penyajian Capaian *Outcome* dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 belum dilengkapi dengan dasar perhitungan, sehingga belum dapat diverifikasi keandalannya;

ii. Capaian *Outcome* belum dijadikan dalam Laporan Monev Bulanan sehingga tidak dapat dimonitor setiap saat (*up to date*).

b. Sub komponen Kinerja lainnya:

Tahun 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah memperoleh penghargaan yang sifatnya Nasional, namun belum diperoleh penghargaan yang sifatnya Internasional.

Dalam rangka memperbaiki kekurangan yang terjadi pada hasil evaluasi SAKIP di atas, di tahun 2022 ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menindaklanjuti hal-hal yang perlu diperbaiki sesuai dengan masukan dari evaluasi SAKIP TA 2020 dan didokumentasikan ke dalam dokumen pendukung SAKIP, yaitu: (1) Rencana Strategis Tahun 2020-2024, (2) Perjanjian Kinerja, (3) Rencana Aksi, (4) Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan, dan (5) LAKIP TA 2022.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

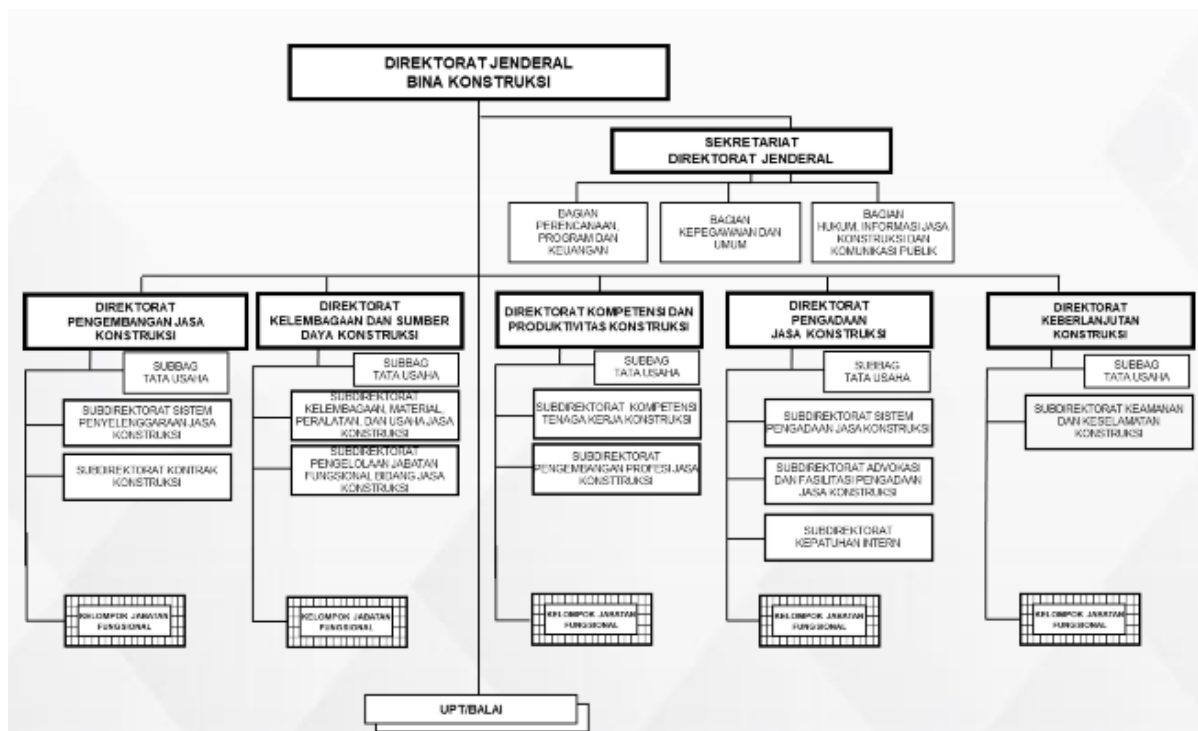
1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa Kementerian;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk menjalankan program-programnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan pelayanan secara terintegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh manajemen kepemimpinan yang sangat kuat dalam membangun hubungan kerja yang baik antar staf, hubungan atasan-bawahan serta hubungan eksternal seperti persaingan baik antar maupun inter organisasi, keadaan stabilitas politik, sosial serta politik. Hal tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan baik, untuk menyelenggarakan produk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat konstruksi.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terbagi menjadi 5 direktorat dan 1 sekretariat yang dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Berikut adalah tugas dan fungsi masing-masing Direktorat di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

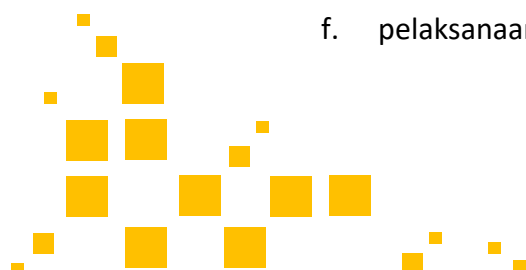
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- b. penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan program jangka menengah dan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan jasa konstruksi;
- c. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan jasa konstruksi;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;
- f. pengelolaan barang milik negara;

- g. pengelolaan urusan mutasi dan pengembangan pegawai;
 - h. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;
 - i. penataan organisasi, dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal;
 - j. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum;
 - k. pelaksanaan administrasi dan legalisasi kerja sama bidang jasa konstruksi; dan
 - l. pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, serta penyelenggaraan komunikasi publik di direktorat jenderal dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;
2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi serta pengembangan strategi pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi dan efektivitas penerapan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
- d. penyusunan rumusan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama strategis dalam dan luar negeri; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.



3. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

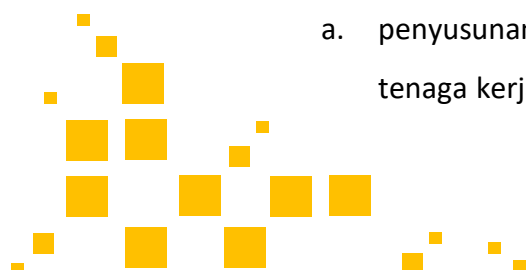
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber daya konstruksi, dan melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, dan teknologi, serta Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi
- d. pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
- e. pengolahan data material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
- f. pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

4. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kompetensi tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, penyelenggaraan peningkatan



kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*);

- b. pemenuhan, penyusunan dan pembaruan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi berdasarkan peta okupasi;
 - c. pengolahan data tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor;
 - d. pembinaan untuk penyetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement*);
 - e. pembinaan pelaksanaan program *link and match* dunia pendidikan dengan industri konstruksi;
 - f. pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, modul/materi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi;
 - g. pemantauan dan evaluasi mutu penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*);
 - h. pemantauan dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di sektor konstruksi; dan
 - i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang pengadaan jasa konstruksi di Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
- d. pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;

- e. pembinaan dan pengawasan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
- f. pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
- g. penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. pengelolaan pelaksanaan Unit Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal;
- i. pengolahan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

6. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang keberlanjutan konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, penilai ahli dan keberlanjutan konstruksi;
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran serta operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi;
- c. fasilitasi penyusunan rekomendasi teknis keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi serta kegagalan bangunan;
- d. pelaksanaan tugas kesekretariatan Komite Keselamatan Konstruksi meliputi subkomite keamanan, subkomite keselamatan dan kesehatan serta subkomite pemanfaatan dan pemeliharaan konstruksi;
- e. fasilitasi investigasi dan rekomendasi teknis kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan;
- f. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan keberlanjutan konstruksi pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi; dan

- g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) UPT yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Balai Jasa Konstruksi

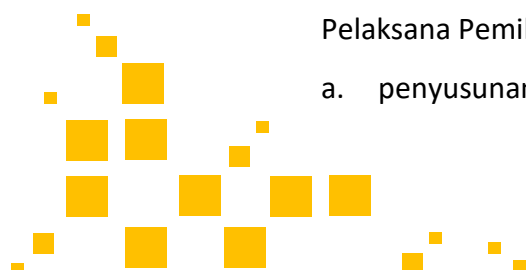
Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. penyusunan rencana kerja pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
- c. koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;
- d. pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
- e. penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi percontohan di wilayahnya;
- f. penyelenggaraan peningkatan kompetensi instruktur dan asesor konstruksi di wilayahnya
- g. pengumpulan data sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi di wilayahnya; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;



- b. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan pendampingan pengadaan barang/jasa;
- d. pelayanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat No. 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memiliki tugas melaksanakan registrasi, akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan LSP, pemberian lisensi, dan penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPJK menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan registrasi terhadap badan usaha jasa konstruksi, pengalaman badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, dan penilai ahli;
2. pelaksanaan akreditasi terhadap asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi;
3. pelaksanaan penetapan tim penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi kegagalan bangunan;
4. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam rangka lisensi LSP;
5. pembentukan LSP untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan oleh LSP yang dibentuk asosiasi profesi jasa konstruksi atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
6. pelaksanaan pemberian lisensi LSBU;
7. pelaksanaan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan
8. pengelolaan aplikasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, LPJK dibantu oleh Sekretariat LPJK yang berada di Kementerian PUPR yang secara administratif bertanggung jawab kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi, yakni Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Pemimpin Sekretariat LPJK adalah sekretaris

direktorat jenderal yang menangani tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Sekretariat LPJK memiliki tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada LPJK. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPJK menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan lpjk;
2. pemberian dukungan administratif kepada lpjk;
3. pemberian dukungan teknis operasional kepada lpjk;
4. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian; dan
5. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat LPJK.

1.4 ISU STRATEGIS

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersifat strategis serta lebih menuju ke arah perumusan kebijakan dan standardisasi teknis. Harapan masyarakat konstruksi yang besar terhadap Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melakukan pembinaan tidak hanya pada lingkup PUPR melainkan pada keseluruhan dunia konstruksi Indonesia sehingga memberi konsekuensi tanggung jawab yang besar pula khususnya terhadap pencapaian target organisasi.

Isu strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang saat ini diperhatikan/dikedepankan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Dengan disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja berdampak pada berubahnya sebagian isi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Jasa Konstruksi, perubahan UU Jasa Konstruksi dijabarkan pada poin-poin berikut:
 - a. Terdapat 33 ketentuan perubahan pada UUCK, yang terdiri atas 25 pasal yang diubah dan 8 pasal yang dihapuskan dari ketentuan pada UUK.

- b. Ketentuan perubahan tersebut antara lain mencakup pengaturan: Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten; Perijinan Berusaha; Kualifikasi Usaha; Usaha Penyediaan Bangunan (penghapusan); dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka ditetapkan:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; Pada PP 14 tahun 2021 dijabarkan beberapa pasal-pasal yang mengalami perubahan sebagai berikut:
- a. Tugas manajemen konstruksi
 - b. Kriteria pekerjaan konstruksi terintegrasi
 - c. Kinerja penyedia jasa
 - d. Standar remunerasi minimal
 - e. Ketentuan penerima jasa
 - f. Alih Teknologi
 - g. Tenaga kerja
 - h. Kerjasama Operasional (KSO)
 - i. KSO BUJKA dan BUJK Nasional
 - j. Spesifikasi teknis penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi
 - k. Detail engineering design
 - l. Persiapan penyelenggaraan jasa konstruksi
 - m. Rancangan kontrak kerja konstruksi
 - n. Pemilihan penyedia jasa konstruksi
 - o. Kontrak kerja konstruksi
- b) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah aturan ini menyesuaikan pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha; dan

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko substansi penyelenggaraan usaha jasa konstruksi regulasi ini mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan.

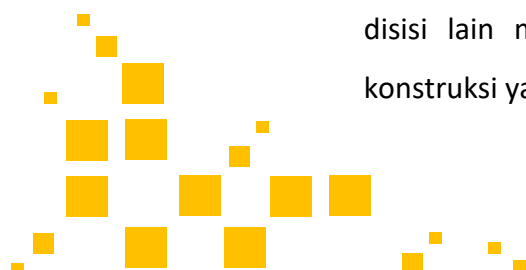
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui salah satu unit kerjanya yaitu Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, menyusun beberapa NSPK dalam Bentuk Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri PUPR dengan berpedoman pada peraturan-peraturan sebagaimana yang dimaksud diatas, beberapa NSPK yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi meliputi:

- Permen PUPR No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi
- Surat Edaran Menteri PUPR No. 16 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Terdampak *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 di Kementerian PUPR.
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/SE/M/2021 Tentang Mekanisme Pembayaran Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Penanganan Keadaan Darurat Di Kementerian PUPR
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 Tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Di Kementerian PUPR
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/SE/M/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender Pekerjaan Konstruksi Di Kementerian PUPR
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/SE/M/2021 Tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Di Kementerian PUPR

2. Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Untuk Penyiapan Pembangunan Infrastruktur IKN

Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa. Oleh sebab itu dibutuhkan keberadaan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya. Dengan pemindahan IKN ke Kalimantan diharapkan dapat menjadi “pusat gravitasi” ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Proyek pembangunan IKN ini merupakan sebuah proyek yang sangat besar. Perkiraan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di IKN untuk tahun 2022-2024 mencapai sebesar Rp43,73 triliun. Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk pembangunan embung dan pengendalian banjir oleh Ditjen. SDA, pembangunan jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur serta jalan tol oleh Ditjen. Bina Marga, pembangunan infrastruktur layanan dasar wilayah IKN dan Gedung Istana Negara oleh Ditjen. Cipta Karya, serta beberapa infrastruktur pendukung lainnya. Dengan nilai alokasi tersebut, kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) untuk melaksanakan pembangunan IKN diperkirakan sebanyak 250.000 orang. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kita. Dengan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikasi yang masih terbatas, menjadi tantangan bagi kita untuk dapat menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan teruji. Namun disisi lain menjadi sebuah peluang adanya penyerapan tenaga kerja konstruksi yang cukup besar.



Melalui agenda besar tersebut Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui program pembinaan tenaga kerja konstruksi bertugas menyiapkan tenaga-tenaga kerja konstruksi agar dapat memenuhi kebutuhan TKK dalam pelaksanaan pembangunan IKN. Dan dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga kerja konstruksi ini, agar diprioritaskan bagi warga sekitar proyek pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2022 ini telah melakukan Pelatihan dan Sertifikasi Tahap I bagi 1.535 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) untuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri sehingga dampak dari pembangunan infrastruktur turut menggerakkan perekonomian daerah. Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahap I diikuti sebanyak 1.535 orang peserta, di mana sebanyak 817 orang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Sebanyak 317 orang peserta hadir secara online melalui Zoom dengan peserta berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda, dan Universitas Mulawarman.

Tim Instruktur yang terlibat pada kegiatan pelatihan dan sertifikasi merupakan para Trainer Konstruksi dari *Vocational Education Development Centre* (VEDC) Malang, dan Trainer Praktisi dari Pusat Pelatihan (*Learning Center*) BUMN Karya, para praktisi dari Asosiasi Profesi, dan para akademisi dari Politeknik dan Perguruan Tinggi. Sedangkan Asesor yang melaksanakan Uji Kompetensi/Sertifikasi adalah para Asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah mendapatkan Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sudah tercatat di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Sesuai Perjanjian Kinerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, pelatihan tenaga kerja konstruksi khusus pembangunan IKN pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 7.100 orang yang akan dilaksanakan oleh 4 Balai yaitu Balai Jasa Konstruksi Wilayah III

Jakarta, IV Surabaya, V Banjarmasin, dan VI Makassar. Pelatihan ini akan terus berlanjut di tahun 2023.

3. Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K4)

Pembinaan terhadap keamanan, kesehatan dan keselamatan konstruksi saat ini belum maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (K2), kecelakaan tersebut utamanya disebabkan oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM dan permasalahan peralatan. Permasalahan SDM khususnya disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan metode kerja dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Sedangkan permasalahan peralatan utamanya disebabkan karena masih rendahnya pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan berkala.

Berdasarkan data kejadian kecelakaan konstruksi dari Kementerian PUPR, setiap tahunnya angka kecelakaan konstruksi menurun. Dari data Kementerian PUPR, dari tahun 2019-2022 telah terjadi kecelakaan konstruksi sebanyak 32 kasus. Kecelakaan konstruksitersebut terjadi karena rendahnya penerapan SMKK oleh tenaga kerja konstruksi di lapangan.

Untuk sektor konstruksi terdapat penurunan jumlah kejadian kecelakaan konstruksi dari tahun 2019 hingga 2022. Beberapa kejadian kecelakaan konstruksi tersebut dapat terlihat pada gambar di bawah ini:

2019

11 Kejadian

4 Januari	Robohnya Dinding Penataan Tanah (DPT) dan Struktur Atas Rumah Pompa Durolis Riau
25 Januari	Runtuhnya Jembatan Gantung Banjarsari II Pacitan
22 Mei	Jatuhnya I-Steel Girder saat mobilitas proyek Japek II
15 Juni	Jatuhnya besi siku pada proyek Pembangunan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung
10 Juli	Runtuhnya Formwork Pierhead pada Proyek Pembangunan Tol BORR Tahap 2 Seksi 3A
23 Juli	Kelongsoran Jalan pada Proyek Pembangunan Underpass Kentungan Yogyakarta
16 Agustus	Tergulingnya Girder saat Pengangkutan pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu
8 Oktober	Kegagalan Pengecoran Box Traffic Ramp 8 pada Proyek Pembangunan Tol Depok-Antasari
22 Oktober	Kebakaran Pipa BBM Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
2 Desember	Patahnya boom crane pada saat erection di proyek BORR
4 Desember	Keruntuhan Dinding Penahan Tanah (DPT) pada Proyek Pembangunan Pengamanan Pantai Tahap III Paket 2, Muara Baru, Jakarta Utara

2020

9 Kejadian

10 Februari	Terlepasnya <i>Boom</i> pada <i>Service Crane</i> dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Seksi 4
25 Februari	Banjir pada Tol Jakarta-Cikampek (Arah Jakarta) KM 9 dan KM 19 Akibat Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
21 Juli	Keruntuhan Dinding Pembatas Hotel Awan Sewu Semarang
7 Agustus	Runtuhnya Scaffolding pada Proyek Pembangunan Jakarta International Stadium
12 Agustus	Banjir Tol Padaleunyi KM 130A Akibat Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
16 Agustus	Keruntuhan Pierhead pada Proyek Pembangunan Tol Cibitung-Cilincing
15 September	Kelongsoran Lereng pada Proyek Bendungan Manikin/Trefmo Paket 2
26 September	Jatuhnya Material Stress Bar pada Proyek Pembangunan 6 (enam) Ruas Jalan Tol Dalam Kota Seksi Semanan-Sunter-Pulogebang
15 November	Bergesernya Abutment dan Gelanggar Overpass Mulya Mekar pada Proyek Pembangunan Simpang Susun Sadang Tol Jakarta-Cikampek II Selatan



Gambar 1. 2 Data Kecelakaan Kerja di Indonesia Tahun 2019-2022
 Sumber: LAKIP Dit Keberlanjutan Tahun 2022

Setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 Tentang

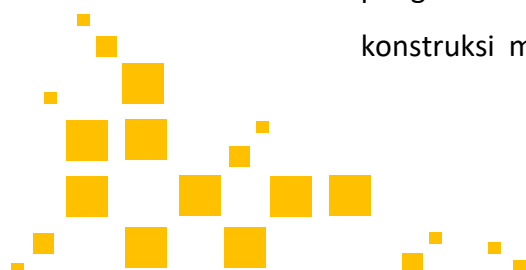
Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan yang di dalamnya mengatur tugas dan wewenang penilai ahli sampai dengan sanksi administratif yang dapat diberikan kepada penilai ahli, penilaian penetapan kegagalan bangunan berdasarkan kriteria dan tolok ukur tertentu, serta penilaian kegagalan bangunan.

Penilaian penetapan kegagalan bangunan yang dilakukan oleh penilai ahli berupa laporan hasil penilaian kegagalan bangunan disertai usulan rekomendasi kebijakan dalam rangka pencegahan terjadinya kegagalan bangunan yang memuat aspek teknis, manajerial, dan prinsip keselamatan konstruksi. Penilaian kegagalan bangunan yang dilakukan oleh penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan bangunan.

Faktor yang menjadi penyebab kecelakaan konstruksi selama ini adalah akibat kelalaian dari para penyedia jasa yang dalam menjalankan keselamatan konstruksi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan administrasinya. Dokumen yang dituangkan dalam RKK pada masa penawaran sampai dengan kontrak, tidak diimplementasikan dengan benar. Pada pelaksanaan pekerjaan, Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi lebih melihat kepada keselamatan tenaga kerja semata. Bahkan, di beberapa pekerjaan, ahli keselamatan konstruksi yang dipekerjakan menjalani tugas dan memiliki wewenang sebagai pengawas dan mempunyai otoritas penghentian pekerjaan jika ada prosedur yang tidak sesuai dengan dokumen metode kerja dan SOP.

4. Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur IKN

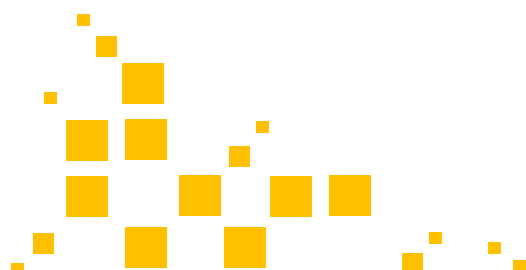
Diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara membuat Kementerian PUPR harus turut berperan dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Ibukota Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pasti terdapat perubahan substansi pengaturan maupun perubahan tata cara pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi membutuhkan pembinaan pengelolaan yang bertujuan untuk

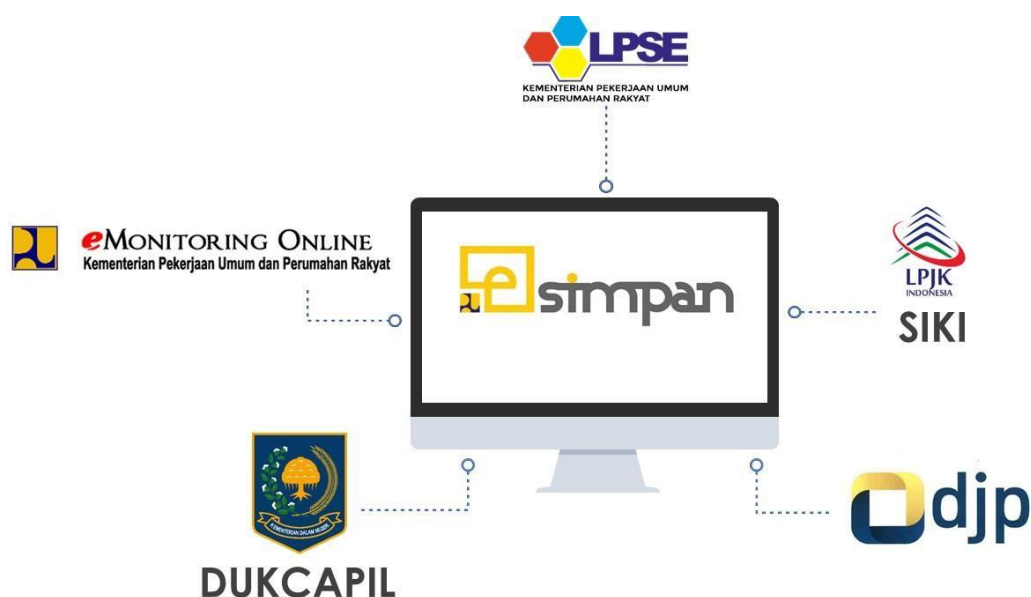


mengetahui seberapa efektif setiap substansi pengaturan dan proses bisnis yang baru sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Pembinaan pengelolaan tersebut dilakukan terhadap seluruh pelaku pengadaan jasa konstruksi yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan, Pelaksana, Peneliti, untuk mengetahui kesulitan dalam mengimplementasikan petunjuk teknis, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN). Untuk itu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi berinisiatif melaksanakan kegiatan “Manajemen Pengadaan Barang Jasa”.

Salah satu kegiatan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah Workshop Pelaksanaan Tender/Seleksi Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur IKN. Maksud kegiatan ini adalah untuk Melakukan pembinaan terhadap personil pengadaan jasa konstruksi pada proses pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN). Tujuan dari terselenggaranya kegiatan ini adalah menyelaraskan pemahaman personil pengadaan jasa konstruksi dan menerapkan pengelolaan pengadaan jasa konstruksi, khususnya yang berkaitan dengan paket pekerjaan pembangunan Ibu Koa Negara (IKN).

Sementara itu dari sisi Penyedia Jasa, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan Pengembangan Sistem Informasi Pengalaman melauai Aplikasi (SIMPAN) yang merupakan aplikasi penghimpun data/dokumen dan informasi pengalaman penyedia jasa khususnya Badan Usaha dan Tenaga Ahli di bidang Jasa Konstruksi yang interoperable dengan beberapa sistem (LPSE, E-monitoring, SIKI, Dukcapil dan Direktorat Jenderal. Pajak).





Gambar 1. 3 Sistem Informasi Manajemen Pengalaman (SIMPAN) yang interoperable dengan beberapa sistem

Dengan tersimpannya data pengalaman pada aplikasi SIMPAN maka badan usaha dan tenaga ahli tidak perlu lagi menyampaikan data pengalaman setiap kali mengikuti tender/seleksi pengadaan barang dan jasa. Diharapkan dengan terpusatnya data pengalaman badan usaha dan tenaga ahli pada Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) akan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses prakualifikasi sehingga percepatan pelaksanaan proses tender/seleksi dapat dilakukan dan demi mendorong pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital.

5. Belum Optimalnya Peran Lembaga Jasa Konstruksi di Daerah

Belum optimalnya peran OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi dalam pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi di daerah dikarenakan belum adanya pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Masih terdapat 2 (dua) Provinsi yang belum mempunyai OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur, dan terdapat 25 OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi provinsi yang sudah setingkat eselon 3 (tiga) dengan presentase 74%, serta 4 (empat) provinsi OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi provinsi setingkat eselon

4 (empat) dengan presentase 12%, dan 3 (tiga) provinsi OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi provinsi berupa non struktural atau hanya berupa tugas dan fungsi jasa konstruksi dengan presentase 9%.

Untuk kabupaten/Kota terdapat 172 kabupaten/kota (presentase 33%) yang OPD Sub Urusan Jasa Konstruksinya setingkat eselon 3 (tiga), dan 179 kabupaten/kota yang OPD Sub Urusan Jasa Konstruksinya setingkat eselon 4 (empat) dengan presentase 35%, serta 27 kabupaten/kota yang OPD Sub Urusan Jasa Konstruksinya merupakan non struktural atau hanya berupa tugas dan fungsi jasa konstruksi dengan presentase 5%. Sehingga masih terdapat 136 kabupaten/kota belum ada OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi dengan presentase 26,5%. Isu ini dianggap penting dikarenakan banyaknya pembangunan infrastruktur di daerah yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasannya dalam rangka meningkatkan kualitas konstruksi di daerah. Dalam rangka pembentukan OPD di kab/kota maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah kab/kota untuk membentuk sebagaimana yang telah dilakukan oleh Gubernur Jambi.

Sementara itu juga masih banyak Asosiasi Jasa Konstruksi yang belum terakreditasi. Apabila dilihat dari jumlah asosiasi yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi, jumlahnya masih lebih banyak asosiasi yang belum terakreditasi, yaitu baru sejumlah 33% asosiasi jasa konstruksi yang sudah terakreditasi. Hal ini dikarenakan masih banyak asosiasi yang belum memenuhi 5 (lima) persyaratan utama yaitu: a. data dan sebaran anggota b. sarana dan prasarana c. pemberdayaan kepada anggota d. pemilihan pengurus secara demokratis e. dan pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Terdapat 15 Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dari total 83 Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi. Jumlah total Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi yaitu 15 Asosiasi Badan Usaha. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1. 1 Asosiasi Badan Usaha yang Terakreditasi

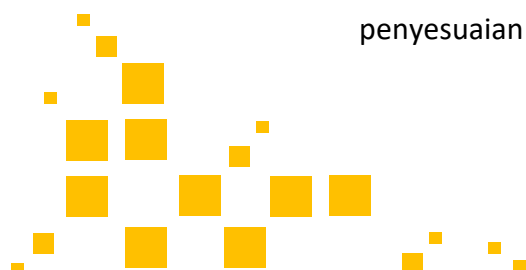
No.	Nama	Nama Lengkap	Alamat	Waktu Terakreditasi
1.	AABI	Asosiasi Aspal Beton Indonesia	Puri Sentra Niaga kalimalang Blok B No. 38, Jl. Raya Kalimantan	2020
2.	AKI	Asosiasi Kontraktor Indonesia	Wijaya Graha Puri Blok D-1, Jl. Darmawangsa Raya No. 2	2020
3.	AKTI	Asosiasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia	Patra Office Tower 12th Floor, JL. Gatot Subroto, Kavling 31-34, RT.5/RW.4, Kuningan Tim., Jakarta Selatan	2020
4.	ASKONAS	Asosiasi Kontraktor Nasional	Jl. KH Wahid Hasyim No. 14B Kebon Sirih Menteng	2020
5.	ASPEKINDO	Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia	Jl. Utan Kayu No. 48	2020
6.	ASPEKNAS	Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional	Jl. Pluit Raya Kav. 12 Blok A5 RT 01 / RW 08 Penjaringan, Jakarta Utara	2020
7.	GABPEKNAS	Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional	Jalan Cipinang Kebembem I No. 2A, Kel. Cipinang, Jakarta 13240	2021
8.	GAPEKNAS	Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia	Jl. Pemuda komplek Ruko Graha Mas Blok AD No.21, Rawamangun	2020
9.	GAPEKSINDO	Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia	Jl. Minangkabau No. 35 F, Manggarai	2020
10.	GAPENRI	Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia	Perkantoran Buncit Mas B-11, Jl. Mampang Prapatan No 108	2020
11.	GAPENSI	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia	Jl. Raya Ragunan No. C/1, Jatipadang, Pasar Minggu	2020
12.	GAPKAINDO	Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia	Komplek Ruko Mega Grosir, Cempaka Mas Blok I No.39, Jl.Letjend Suprpto, 14Kemayoran, Jakarta Pusat	2022
13.	INKINDO	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia	Jl. Bendungan Hilir Raya No. 29	2020
14.	PERKINDO	PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA	Jl. Raya Pasar Minggu No. 16 A/H Pancoran, Jakarta Selatan	2020
15.	PERKOPINDO	Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia	Jl. Kav. DKI Blok 131 No. 04 RT 04 RW 06, Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat	2021

Sedangkan jumlah asosiasi badan usaha yang belum terakreditasi sejumlah 68 (enam puluh delapan) asosiasi badan usaha berdasarkan data LPJK pada website https://siki.pu.go.id/search/List_Asosiasi yang diakses pada tanggal 26 Desember 2022. Terdapat 33 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi dari total 68 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi. Jumlah total asosiasi profesi jasa konstruksi yang terakreditasi yaitu 33 asosiasi profesi. Sedangkan jumlah asosiasi profesi yang belum

terakreditasi sejumlah 65 (enam puluh lima) asosiasi profesi. Terdapat 1 Asosiasi terkait Rantai pasok Konstruksi terakreditasi dari total 12 Asosiasi terkait Rantai pasok Konstruksi yaitu AP3I.

Pertambahan asosiasi terakreditasi baik asosiasi badan usaha jasa konstruksi terakreditasi maupun asosiasi profesi jasa konstruksi tidak signifikan dan sangat sedikit. Awal Akreditasi Asosiasi yang pertama kali oleh Menteri PUPR yang menghasilkan Keputusan Menteri PUPR No 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi Dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi yang ditetapkan tanggal 4 September 2020 dengan rincian hasil 12 Asosiasi Badan Usaha terakreditasi, 25 Asosiasi Profesi terakreditasi dan 1 Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi Terakreditasi. Update per Desember 2022 saat ini terdapat 15 Asosiasi Badan Usaha terakreditasi, 33 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi, dan masih hanya ada 1 Asosiasi terkait Rantai pasok Konstruksi terakreditasi. Artinya hanya terdapat penambahan 3 Asosiasi Badan. Usaha terakreditasi, 8 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi, dan tidak terdapat penambahan Asosiasi terkait Rantai pasok Konstruksi yang terakreditasi. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen asosiasi jasa konstruksi khususnya terhadap salah persyaratan akreditasi yaitu pemberdayaan kepada anggotanya. Perlunya ketegasan terkait pengaturan pemberdayaan asosiasi kepada anggotanya atau yang lebih dikenal pengembangan usaha berkelanjutan.

Sementara Saat ini baru tersedia 330 asesor badan usaha jasa konstruksi yang lulus uji kompetensi dan masih dibutuhkan jumlah asesor yang cukup untuk dapat melakukan sertifikasi kepada lebih kurang 140.000 badan usaha jasa konstruksi. Berdasarkan hasil pelaksanaan uji kompetensi asesor badan usaha jasa konstruksi, terdapat 330 asesor yang telah lulus dan dinyatakan kompeten oleh panitia teknis uji kompetensi (PTUK). Selanjutnya berdasarkan koordinasi PTUK dengan BNSP, masih perlu ada penyesuaian terhadap sertifikat yang telah diterbitkan oleh PTUK



berdasarkan SE LPJK Nomor 7. Hal-hal yang perlu disesuaikan sebagai berikut:

- 1) Jam kerja;
- 2) Subklasifikasi;
- 3) Klasifikasi; dan
- 4) Sertifikat berbentuk digital

Berdasarkan poin di atas, 330 asesor yang telah dinyatakan kompeten oleh PTUK tetap dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap BUJK, karena 330 asesor tersebut sudah tercatat di LPJK.

Adanya tambahan asosiasi badan usaha terakreditasi dari 72 di tahun 2021 menjadi 83 asosiasi badan usaha di tahun 2022 dimana asosiasi badan usaha terakreditasi akan membentuk Lembaga sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan mengajukan lisensi LSBU. Salah satu persyaratan pembentukan LSBU yaitu asesor badan usaha tentu artinya masih diperlukan pelatihan asesor badan usaha. Permasalahan yang lain belum adanya modul pelatihan untuk calon asesor badan usaha yang baru serta belum updatenya modul RCC asesor badan usaha yang masih perlu dimukthahirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru.

6. Pengelolaan rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi yang belum optimal

Terkait dengan kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi yang belum optimal, masih memiliki kelemahan yaitu ketidakseimbangan antara *supply-demand* beberapa material seperti semen, baja, aspal, dan alat berat; persebaran material dan peralatan belum merata; kurang optimalnya pelaksanaan dan penerapan teknologi "*green construction*"; dan lemahnya penguasaan teknologi konstruksi.

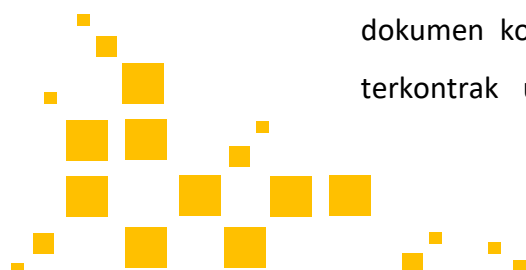
Penilaian terhadap kinerja rantai pasok material dan peralatan konstruksi/MPK di tingkat proyek dan badan usaha jasa konstruksi perlu dilakukan untuk mengukur tercapainya penyelenggaraan konstruksi yang efektif, efisien, dan berkualitas. Hal ini sangat relevan karena sumber daya yang dikelola dalam setiap komponen analisis harga satuan



pekerjaan/AHSP terdiri atas sumber daya manusia/ tenaga kerja konstruksi, sumber daya material konstruksi/bahan, dan sumber daya peralatan konstruksi.

Oleh karena itu, melalui pengukuran kinerja rantai pasok material dan peralatan konstruksi di level mikro dan meso pada pekerjaan konstruksi bidang SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan akan secara langsung dapat mengukur tingkat keberhasilan dari suatu tujuan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tepat waktu (efektif), tepat biaya (efisien), dan tepat mutu. Untuk maksud tersebut, sampai saat ini telah disusun 2(dua) indikator kinerja kunci/KPI yaitu KPI Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi di level mikro/proyek dan KPI Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi di level meso/badan usaha jasa konstruksi. Dengan demikian, kegiatan penilaian kinerja rantai pasok MPK di level proyek dan badan usaha pada Tahun 2023 perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui aplikasi yang terdapat di dalam sistem informasi material dan peralatan konstruksi/ SIMPK sehingga dapat menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tepat biaya/efisien, tepat waktu/ efektif, dan tepat mutu/ berkualitas sesuai umur rencana.

Penyiapan data dan informasi perhitungan *demand* MPK dan capaian TKDN, serta pemutakhiran katalog alat berat dan material Aspal Beton melalui aplikasi yang terdapat pada Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi/ SIMPK dari seluruh paket pekerjaan infrastruktur yang terkontrak maupun swakelola di Kementerian PUPR belum dapat tersedia. Hal ini dikarenakan belum sempurnanya fitur perhitungan *demand* MPK dan capaian TKDN di SIMPK. Untuk mewujudkan penyiapan data dan informasi perhitungan *demand* MPK dan capaian TKDN, salah satu yang akan dilakukan kedepannya yaitu menyesuaikan perhitungan *demand* MPK dan capaian TKDN sesuai SOP Penghitungan Nilai TKDN Pekerjaan Jasa Konstruksi, serta mengusulkan adanya persyaratan dalam dokumen kontrak yang menyatakan pemenang tender paket pekerjaan terkontrak untuk melakukan perhitungan kebutuhan dan pelaporan



penggunaan SDMPK melalui perhitungan capaian nilai TKDN di SIMPK pada pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan secara periodik. Payung Hukum terkait hal ini mengacu pada Pasal 59 Ayat (2) huruf d dan Pasal 83 Ayat (3) UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi. Untuk menunjang pelaksanaan tersebut, SIMPK telah menyediakan fitur Perhitungan Demand MPK dan TKDN yang dapat digunakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Selain itu, pemutakhiran data dan informasi terkait alat berat konstruksi yang telah disusun oleh Ditjen Bina Konstruksi pada tahun 2013 belum dilakukan. Sementara itu dengan perkembangan teknologi dan jenis/subvarian alat berat, metode penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, perubahan terhadap agen tunggal/vendor dari subvarian alat berat, sebaran dan jumlah distributor alat berat tiap wilayah, dan implementasi peraturan perundang-undangan terkait peralatan konstruksi (alat berat konstruksi), perlu dilakukan pemutakhiran terhadap Katalog Alat Berat Konstruksi yang ada dalam rangka memberikan gambaran terkini dan relevan mengenai informasi alat berat konstruksi yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk katalog digital di Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi/SIMPK.

Disamping hal diatas dengan kondisi ketersediaan pasokan aspal minyak secara nasional masih banyak dipenuhi oleh aspal minyak impor, sementara cadangan Aspal alam di Pulau Buton masih sangat melimpah sehingga tentu saja dapat menjadi solusi atas defisit aspal minyak nasional. Regulasi terkait dengan penggunaan Aspal Buton untuk pembangunan dan preservasi jalan di Kementerian PUPR telah diterbitkan yaitu Peraturan Menteri PUPR No.18 Tahun 2018. Dalam lampiran Permen tersebut telah diatur penggunaan Asbuton yang disesuaikan dengan kelas jalannyaterdiri atas: Asbuton butir B5/20, Asbuton butir B50/30, Asbuton Pracampur, Asbuton Murni.

Seiring dengan perkembangan teknologi pengelolaan dan pemurnian Asbuton saat ini yang telah mampu memproduksi jenis/subvarian Aspal Buton murni yang kualitas nya setara dengan performance grade/PG 70



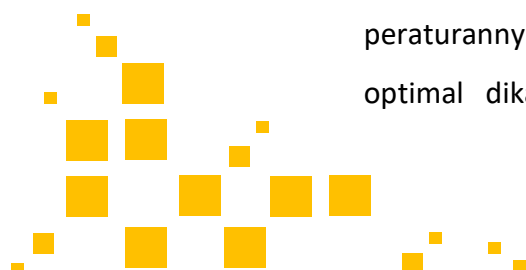
sehingga dapat diaplikasikan pada kelas jalan dengan lalu lintas berat. Tentu saja ketersediaan subvarian Asbuton murni saat ini diharapkan mampu menjadi substitusi terhadap aspal minyak impor yang jumlahnya lebih dari 50% dari kebutuhan aspal minyak nasional. Dengan demikian, perlu disusun Katalog Aspal Buton dari sisi pengguna yang dapat memberikan secara lengkap informasi varian dan subvarian Aspal Buton, kapasitas produksi seluruh produsen, kemampuan *supply*/pasokan tiap bulan masing-masing produsen, sebaran distributor tiap wilayah, update teknologi produk Asbuton, dan tata cara pelaksanaan penggunaan dari masing-masing produk Aspal buton yang disesuaikan dengan kelas jalan. Dengan demikian pada Tahun 2023 perlu dilakukan kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK), dan Pemutahiran Kalatog Alat Berat dan Material Konstruksi.

Dari sisi teknologi, Penerapan BIM pada proyek konstruksi di Kementerian PUPR saat ini masih belum optimal, dimana salah satu penyebabnya adalah produk pengaturan terkait penerapan teknologi BIM yang ada di Kementerian PUPR saat ini masih sedikit jumlahnya dan belum dapat melingkupi semua bidang pekerjaan konstruksi. Produk pengaturan BIM yang saat ini digunakan di Kementerian PUPR yaitu antara lain adalah (i) untuk bidang Cipta Karya dan bidang Perumahan, menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Gedung Negara, (ii) untuk bidang Bina Marga, menggunakan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penerapan BIM pada Perencanaan Teknis, Konstruksi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga. Selain itu pengaturan terkait BIM juga terdapat pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Sedangkan untuk bidang Sumber Daya Air, saat ini masih belum terdapat produk pengaturan terkait penerapan teknologi BIM.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa produk pengaturan yang berupa produk hukum yang ada masih bersifat sektoral untuk jenis pekerjaan di unit organisasi tertentu. Selain produk pengaturan tersebut, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi telah menerbitkan beberapa pedoman terkait penerapan teknologi BIM yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas penerapan BIM dalam pekerjaan konstruksi, yaitu (i) Standar Protokol BIM di Kementerian PUPR Edisi 1.0 Tahun 2020 dan (ii) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penerapan BIM Kementerian PUPR Tahun 2022. Guna meningkatkan optimalisasi dan kualitas serta percepatan penerapan teknologi BIM secara menyeluruh di semua proyek konstruksi di Kementerian PUPR, dibutuhkan produk pengaturan yang dapat melingkupi seluruh bidang pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR.

7. Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan P3DN dan Rendahnya Capaian TKDN PUPR

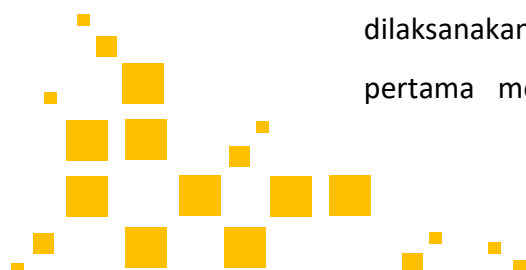
Regulasi Regulasi terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri telah ada sejak tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. Misi dari penggunaan produk dalam negeri adalah menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang mandiri mampu berdiri di kaki sendiri. Dengan pemanfaatan produk dalam negeri berdasarkan kajian Indef bahwa dengan belanja produk dalam negeri sebesar Rp1 menghasilkan Rp2,2 terhadap perekonomian nasional. Meskipun peraturannya telah terbit sejak tahun 2014 namun penerapannya belum optimal dikarenakan beberapa faktor salah satunya masih terdapat



peraturan yang belum *clear* dan tidak mendukung penggunaan produk dalam negeri, sehingga pada tahun 2022 Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden untuk menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Pengaturan yang belum *clear* ini menimbulkan kebingungan ataupun belum dapat diterapkannya secara optimal khususnya di Kementerian PUPR.

Sejak terbentuknya Tim P3DN di Kementerian PUPR dalam rangka percepatan penggunaan produk dalam negeri telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing pada Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol, Surat Menteri PUPR Nomor PB.0101-Mn/2075 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pengendalian Belanja Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing di Kementerian PUPR, Surat Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR Nomor BK.0403-Kd/937 tanggal 29 September 2022 tentang Mekanisme Perhitungan TKDN Pekerjaan Konstruksi, Surat Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR Nomor BK.0403-Kd/1080 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penyampaian BUKU KITA (Kendali Impor dan Tenaga Asing), Surat Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR Nomor BK.0403-Kd/1126 tanggal 3 November 2022 tentang Mekanisme Penentuan Ambang Batas (*Threshold*) TKDN Pekerjaan Konstruksi, dan SOP perhitungan TKDN yang diterbitkan oleh masing-masing unor teknis.

Dalam rangka optimalisasi penerapan kebijakan-kebijakan P3DN agar *outcome* yang diharapkan tercapai yaitu berkontribusi dalam peningkatan perekonomian perlu pengaturan lebih lanjut sehingga lebih aplikatif dalam pelaksanaan belanja produk dalam negeri di Kementerian PUPR. Terdapat beberapa tugas dari Tim P3DN pada tahun 2023 ini yang harus dilaksanakan dalam rangka optimalisasi P3DN di Kementerian PUPR yaitu pertama menyusun konsep Peraturan Menteri tentang Peningkatan



Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana lingkup pengaturannya meliputi Produk Dalam Negeri, Tingkat Komponen Dalam Negeri, Preferensi Harga, Verifikasi, Pengawasan, Rantai Pasok Konstruksi. Peraturan Menteri ini penerbitannya menunggu revisi pengaturan di atasnya seperti perubahan PP 29 Tahun 2018, Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedua, penyusunan Keputusan Menteri tentang Threshold pekerjaan Konstruksi. Regulasi mengenai pengaturan Batasan minimum capaian TKDN tiap jenis proyek konstruksi di Kementerian PUPR sangat penting karena untuk memastikan setiap proyek memenuhi ketentuan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah telah melakukan Verifikasi Capaian TKDN pada 70 (tujuh puluh) paket pekerjaan konstruksi yang menjadi uji petik yang berada pada 7 (tujuh) wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah dengan nilai capaian TKDN 66,81%, PDN 98,27%, dan Impor 1,73%. Masih rendahnya capaian TKDN tersebut dikarenakan masih banyak ditemukan penggunaan produk dalam negeri/UMKM yang belum memiliki sertifikat TKDN dan/atau memiliki sertifikat TKDN yang telah kadaluwarsa (nilai TKDN produk = 0%), sehingga sangat mengurangi nilai capaian TKDN pada paket pekerjaan konstruksi.

Para produsen material dan peralatan konstruksi serta UMKM bidang konstruksi harus segera menyertifikasi TKDN-kan produknya karena masih



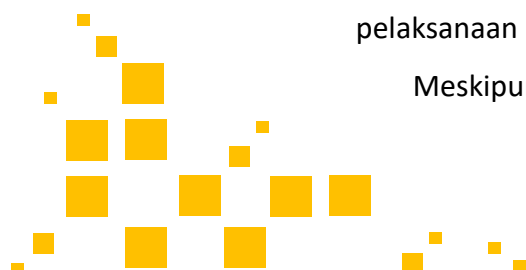
terdapat material dan peralatan konstruksi serta UMKM bidang konstruksi yang digunakan pada paket pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR belum memiliki sertifikat TKDN. Belum maksimalnya koordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk melakukan upaya percepatan sertifikasi TKDN produk melalui Balai-balai Kementerian Perindustrian dan Dinas Perindustrian, serta penyediaan informasi PDN ber-TKDN yang berkategori wajib, *stock/supply*, dan kontak perusahaan. Perlunya Kementerian PUPR untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk upaya percepatan proses sertifikasi TKDN dan penyediaan informasi PDN ber-TKDN yang berkategori wajib, *stock/supply*, dan kontak perusahaan.

8. Pandemi COVID-19

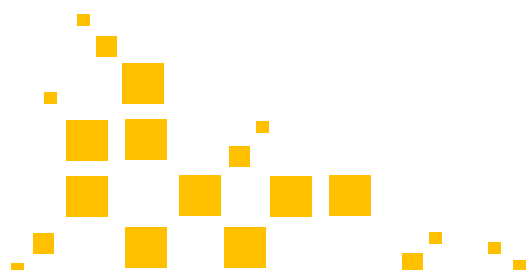
Terjadinya pandemi COVID-19 dari tahun 2020 hingga sekarang yang kemudian berimbas pada perekonomian nasional secara global maupun pembangunan infrastruktur pada khususnya. Selama pandemi, pembangunan infrastruktur secara keseluruhan tetap berlangsung namun tentunya memperhatikan protokol kesehatan. Beberapa infrastruktur sempat terhenti selama beberapa minggu dikarenakan ada pegawai yang positif, namun pembangunan fisik secara keseluruhan pada akhirnya tetap terselesaikan.

Pengaruh COVID-19 di tahun 2022 hingga sekarang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dengan pengalaman pelaksanaan kegiatan di tahun 2022, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sudah bisa beradaptasi dengan upaya-upaya penyelenggaraan kegiatan melalui daring atau tatap muka yang memperhatikan protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi secara mayoritas dialihkan metodenya menggunakan daring (*video conference*) sehingga mengakibatkan realisasi keuangan yang belum maksimal. Kondisi lapangan di beberapa daerah seperti zona merah COVID-19 dan terbatasnya sarana (komputer dan laptop) dan prasarana (jaringan internet) juga menjadi kendala besar dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi.

Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat



meningkatkan capaiannya sehingga dapat mencapai target sesuai dengan Renstra DJBK 2020-2024 dan berhasil meningkatkan capaiannya lebih dari tahun sebelumnya.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini merupakan amanat Reformasi Birokrasi yang mengacu pada sejumlah produk kebijakan dan produk perencanaan jangka panjang, baik nasional, sektor PUPR, pembinaan Jasa Konstruksi, dan didasarkan pada hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024 disusun sebagai dokumen perencanaan dan pedoman acuan penganggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk periode lima tahun mendatang yang berisi tujuan, strategi, program, dan kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam jangka waktu 5 tahun. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi saat ini, dimana terdapat kekuatan dan kelemahan, serta kondisi eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang ditandai berbagai isu penting yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ke depannya.

Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis berpedoman kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Dalam implementasinya melalui jbaran program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi harus memiliki kemampuan untuk merespon pada perkembangan terkini yang terjadi, baik pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi agar terciptanya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Kementerian PUPR.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melaksanakan berbagai program melalui unit kerjanya untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah dituangkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi periode 2020-2024. Adapun visi dan misi tersebut yaitu: (1) Mempercepat dan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, (2) Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Reformasi Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga turut mendukung pelaksanaan salah satu misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu misi nomor 4 (empat): “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.”

Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

A. Tujuan dan Sasaran

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendukung 2 (dua) sasaran strategis pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu SS.4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan SS.5 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya. Kedua indikator dari masing-masing sasaran strategis diatas yaitu IKSS.4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional; dan IKSS.5 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi. Dalam mendukung sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi dengan menyelenggarakan 2 (dua) program yaitu: (1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program yang hendak dicapai. Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai sebagai output dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai selama periode 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

Indikator Kinerja Program yang menjadi dasar pencapaian Sasaran Program di atas yaitu:

1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
2. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi; dan
3. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR.

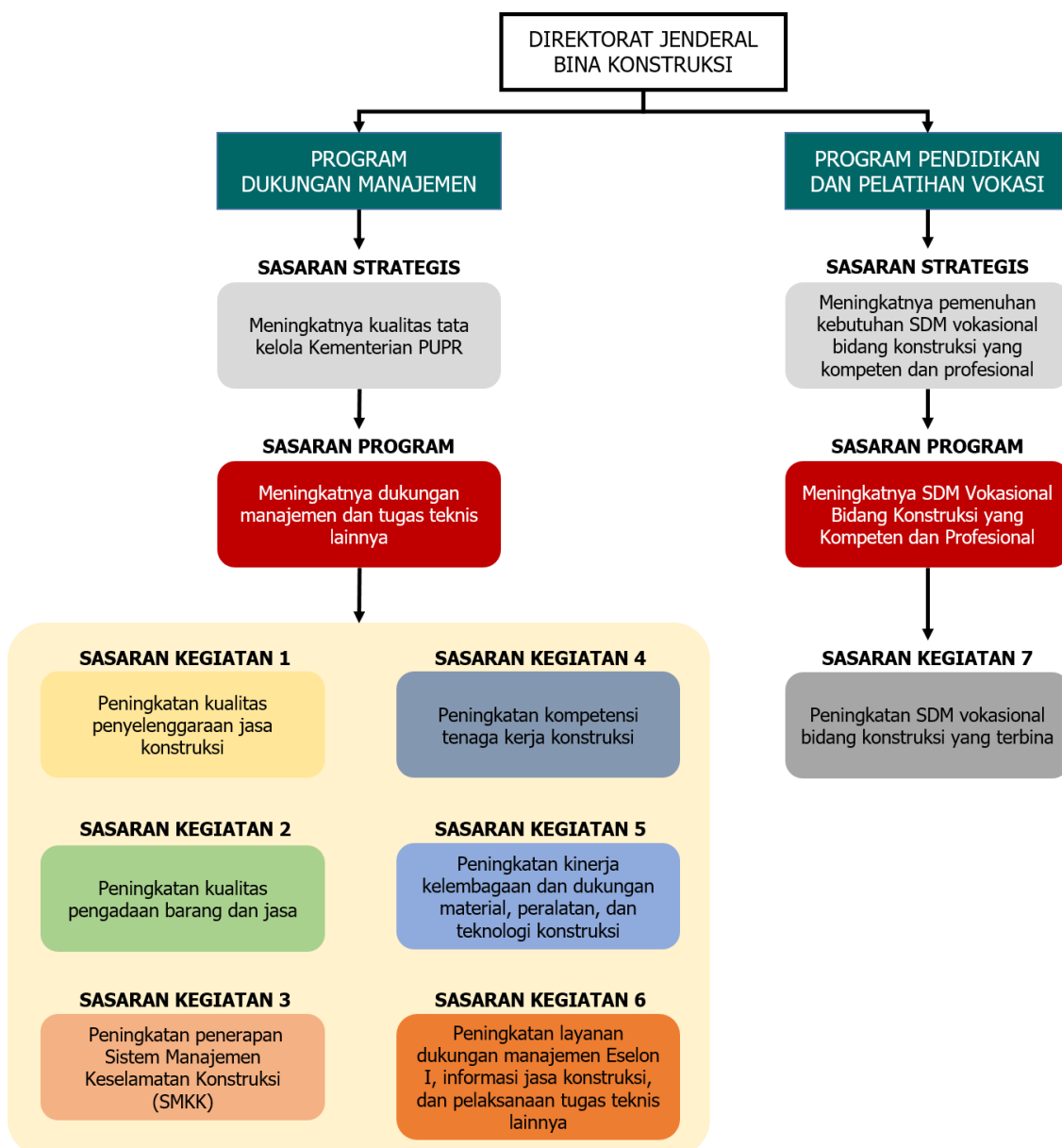
Program ini merupakan gambaran umum kondisi yang akan dicapai di akhir perencanaan pada tahun 2024, dimana seluruh infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas konstruksi yang tinggi dengan dukungan kualitas sumber daya konstruksi sehingga infrastruktur terbangun memiliki kehandalan sebagai sarana bagi berlangsungnya berbagai aktivitas seluruh sendi kehidupan, terutama aktivitas ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan produktivitas masyarakat dan bangsa. Untuk mewujudkan Program tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) sasaran kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa;
4. Meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
5. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
6. Meningkatkan kinerja kelembagaan, dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi; serta
7. Meningkatkan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

B. Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran program yang telah disebutkan diatas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didukung dengan pencapaian 7 (tujuh) sasaran kegiatan yaitu, yaitu:

1. Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa;
4. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
5. Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
6. Peningkatkan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi; dan
7. Peningkatan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.



Gambar 2. 1 Peta Strategis DJBK
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

C. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3) meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi. Arah kebijakan dan strategi digunakan sebagai landasan bagi arahan kegiatan pembinaan jasa konstruksi, khususnya untuk pembangunan bidang konstruksi yang merupakan prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan maka diperlukan upaya terintegrasi dalam fokus dan lokus yang menjamin terlaksananya kegiatan pembinaan yang lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, maka disusun 7 (tujuh) arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

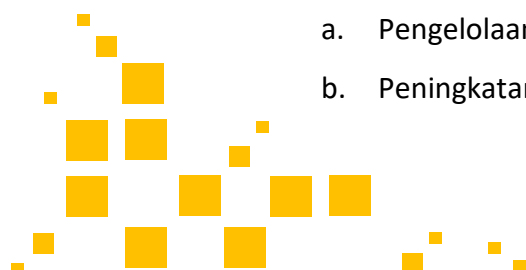
Arah kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi arahkan pada upaya peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan NSPK sistem penyelenggaraan konstruksi yang meliputi penyiapan bahan penyusunan, pembinaan serta pemantauan dan evaluasi penerapan NSPK sistem penyelenggaraan konstruksi; dan
- b. Pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi.

2. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

Kebijakan pembinaan kualitas pengadaan jasa konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan jumlah tender/seleksi tepat waktu, penurunan jumlah sanggah dan sanggah banding, penurunan jumlah pengaduan, penurunan jumlah penetapan pemenang lelang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar, peningkatan kematangan kelembagaan UKPBJ serta peningkatan kualitas penyediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi. Strategi yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pengelolaan dan sosialisasi NSPK terkait pengadaan jasa konstruksi;
- b. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan jasa konstruksi;



- c. Perkuatan UKPBJ dan UPTPBJ/Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang bertugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya dibidang pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
 - d. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi;
 - e. Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI);
 - f. Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi;
 - g. Penyediaan sistem informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR; dan
 - h. Penyediaan sistem SIKAP dan E-Pengalaman.
3. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Kebijakan pembinaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) diarahkan pada upaya penurunan tingkat kecelakaan konstruksi pada proyekproyek strategis. Strategi yang dilaksanakan meliputi:
- a. Penerbitan permen tentang penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum;
 - b. Memastikan komponen biaya/item pekerjaan penyelenggaraan k3 dan keselamatan konstruksi dalam daftar kualitas dan harga (bill of quantity);
 - c. Memastikan peralatan pekerjaan telah memenuhi standar kelaikan alat;
 - d. Pembentukan Komite keselamatan konstruksi (K2K);
 - e. Pelaksanaan investigasi kecelakaan konstruksi;
 - f. Memastikan penggunaan material yang memenuhi standar mutu yang telah disyaratkan;
 - g. Memastikan setiap pekerjaan konstruksi telah memenuhi metode kerja yang telah teruji; dan
 - h. Peningkatan kapasitas manusia dengan melaksanakan bimbingan Teknis SMK3 konstruksi dan pelatihan yang terkait pekerjaan konstruksi.
4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi Kebijakan pembinaan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui strategi berikut:

- a. Peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dengan meningkatkan dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi;
 - b. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi;
 - c. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi;
 - d. Peningkatan kecukupan asesor kompetensi konstruksi; dan
 - e. Peningkatan kecukupan instruktur bidang konstruksi.
5. Peningkatan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi

Arah kebijakan Peningkatkan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat urusan jasa konstruksi serta penyediaan data rantai pasok MPK, teknologi dan TKDN melalui strategi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan akreditasi asosiasi perusahaan, pelaksanaan lisensi lembaga sertifikasi BUJK, pelaksanaan akreditasi asosiasi profesi, pelaksanaan registrasi LPPK, pelaksanaan evaluasi kinerja lembaga, dan pengembangan kerjasama antar lembaga; dan
 - b. Pelaksanaan registrasi dan publikasi material dan peralatan konstruksi, pelaksanaan pembinaan penerapan standar mutu material dan peralatan konstruksi, pelaksanaan pembinaan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi dalam negeri, dan pelaksanaan pembinaan penerapan inovasi teknologi konstruksi.
6. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Arah kebijakan peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pelayanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan
 - b. Penyediaan informasi jasa konstruksi.
7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	6,00%
SP Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	80,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	57,00%
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	57,00%
a. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	84,00%
b. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	28,00%
c. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	59,00%
2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	71,54%
Program:	Anggaran
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 75.139.000.000,00
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 524.861.000.000,00
	Rp 600.000.000.000,00

Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Sumber: saki.pu.go.id, 2022


1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
IKSP: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	71,54%
SK. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	100%
IKK: Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	100%
Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	84%
UNIT KERJA Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	ANGGARAN Rp. 145.610.098.000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  YUDHA MEDIAWAN	JAKARTA, 25 MARET 2022 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  DEWI CHOMISTRIANA

Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Sumber: saki.pu.go.id, 2022

2. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022		PK AWAL
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI		
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	TARGET (2)	
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
<i>IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi</i>	57,00%	
SK. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	70%	
<i>IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</i>	70%	
UNIT KERJA Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi	ANGGARAN Rp. 18.495.639.000	
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  YUDHA MEDIAWAN	JAKARTA, 25 MARET 2022 DIREKTUR PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  PUTUT MARHAYUDI	

Gambar 2. 4 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi
Sumber: saking.pu.go.id, 2022

3. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022		PK AWAL
DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI		
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI		
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	TARGET (2)	
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
<i>IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi</i>	57,00%	
SK. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa	83%	
<i>IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa</i>	83%	
UNIT KERJA Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi	ANGGARAN Rp. 88.209.111.000	
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  YUDHA MEDIAWAN	JAKARTA, 25 MARET 2022 DIREKTUR PENGADAAN JASA KONSTRUKSI  ABDUL MUIS	

Gambar 2. 5 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi
Sumber: saking.pu.go.id, 2022

4. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)		TARGET (2)
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi		57,00%
SK. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)		
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi		100%

UNIT KERJA
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 13.482.928.000

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

JAKARTA, 25 MARET 2022
DIREKTUR KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

YUDHA MEDIAWAN

KIMRON MANIK

Gambar 2. 6 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi
Sumber: saking.pu.go.id, 2022

5. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)		TARGET (2)
SP. Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional		
IKSP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		80%
SK. Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		81%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi		57%
SK. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat		12%
Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi		44%

UNIT KERJA
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 20.934.008.000

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI



JAKARTA, 25 MARET 2022
DIREKTUR KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

YUDHA MEDIAWAN

DEDY NATRIFABRIZAL DEDISKY NAZAROEDDIN

Gambar 2. 7 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Sumber: saking.pu.go.id, 2022

6. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
PK AWAL	
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	TARGET (2)
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
<i>IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi</i>	57,00%
SK. Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	
<i>IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi</i>	28%
<i>Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi</i>	30%
<i>Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN</i>	95%
UNIT KERJA Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	ANGGARAN Rp. 20.803.666.000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  YUDHA MEDIAWAN	JAKARTA, 25 MARET 2022 DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI  NICODEMUS DAUD

Gambar 2. 8 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2022

7. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
PK AWAL	
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	TARGET (2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi</i>	57%
SK. Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	
<i>IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi</i>	28%
1. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	57%
UNIT KERJA Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	ANGGARAN Rp. 15.355.658.000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  YUDHA MEDIAWAN	JAKARTA, 25 MARET 2022 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  AHMAD AGUS FITRAH AKBAR

Gambar 2. 9 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 16 ayat 1 bahwa Perjanjian Kinerja dapat diubah atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi tertentu. Terkait hal tersebut, terjadi kondisi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022 yang mengakibatkan unit organisasi harus melakukan perubahan/revisi PK TA 2022 yaitu adanya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 akibat *refocusing* anggaran yang mengakibatkan terjadi perubahan alokasi anggaran tiap satuan kerja, sehingga terjadi perubahan/revisi terhadap PK Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022. Revisi PK terkait adanya tambahan anggaran Program Dukman sebesar 49,36 Milyar terkait penambahan Anggaran belanja pegawai dan anggaran *tagging* IKN dalam rangka mendukung pembangunan IKN (pelatihan TKK IKN & Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa pembangunan infrastruktur IKN). Berikut adalah Perjanjian Kinerja Revisi Akhir TA 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta Unit Kerja di bawahnya:

		REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:		
Nama	: Yudha Mediawan	
Jabatan	: Direktur Jenderal Bina Konstruksi	
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA		
Nama	: M. Basuki Hadimuljono	
Jabatan	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA		
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:		
1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.		
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.		
Pihak Kedua  M. BASUKI HADIMULJONO	Jakarta, 30 September 2022 Pihak Pertama  YUDHA MEDIAWAN	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022		REVISI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI		
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	
(1)	(2)	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI		
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	6,00%	
SP Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	80,00%	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	57,00%	
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		
1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	57,00%	
a. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	84,00%	
b. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	28,00%	
c. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	59,00%	
2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	71,54%	
Program:		Anggaran
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		Rp 75.139.000.000,00
2. Program Dukungan Manajemen		Rp 574.224.000.000,00
		Rp 649.363.000.000,00

Gambar 2. 10 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: sakup.pu.go.id, 2022

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022		PK REVISI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI		
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI		
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
IKSP: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	71,54%	
SK. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	100%	
IKK: Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	100%	
Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	84%	
UNIT KERJA Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		ANGGARAN Rp. 161.003.922.000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI		JAKARTA, 2 DESEMBER 2022 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
 YUDHA MEDIAWAN		 DEWI CHOMISTRIANA

Gambar 2. 11 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: sakup.pu.go.id, 2022

2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		PK REVISI
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	TARGET (2)	
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
<i>IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi</i>	57,00%	
SK. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi		70%
<i>IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</i>	70%	

UNIT KERJA
Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 18.495.639.000

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Yudha Mediawan
YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, 2 DESEMBER 2022
DIREKTUR PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Indro Pantja Pramodo
INDRO PANTJA PRAMODO

Gambar 2. 12 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2022

3. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		PK REVISI
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	TARGET (2)	
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
<i>IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi</i>	57,00%	
SK. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa		83%
<i>IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa</i>	83%	

UNIT KERJA
Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 97.295.211.000

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Yudha Mediawan
YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, 2 DESEMBER 2022
DIREKTUR PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Abdul Muis
ABDUL MUIS

Gambar 2. 13 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2022

4. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)		TARGET (2)
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi		57,00%
SK. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)		100%
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi		100%

UNIT KERJA
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 13.789.538.000

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, 2 DESEMBER 2022
DIREKTUR KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

KIMRON MANIK

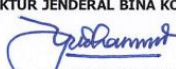
Gambar 2. 14 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2022

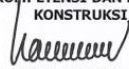
5. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)		TARGET (2)
SP. Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional		
IKSP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		80%
SK. Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		81%
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		81%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi		57%
SK. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		28%
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat		12%
Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi		44%

UNIT KERJA
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

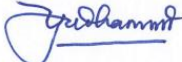

ANGGARAN
Rp. 21.050.008.000

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, 2 DESEMBER 2022
DIREKTUR KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

DEDY NATRIFAHRIZAL DEDISKY NAZAROEDDIN

Gambar 2. 15 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2022

6. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
PK REVISI	
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR (1)	TARGET (2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP: Tingkat kualitas sumberdaya konstruksi	57%
SK. Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	59%
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	28%
1. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	57%
UNIT KERJA Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	ANGGARAN Rp. 25.155.658.000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI	JAKARTA, 2 DESEMBER 2022 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
 YUDHA MEDIAWAN	 AHMAD AGUS FITRAH AKBAR

Gambar 2. 16 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2022

2.3 METODE PENGUKURAN

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan dua (2) program yang mendukung pemenuhan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sasaran Programnya. Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai dengan output dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024, yaitu:

1. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya; dan
2. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.

Sasaran Program yang pertama adalah Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yang memiliki satu (1) indikator kinerja

program yaitu: **IKP 1. Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional**, dengan metode pengukuran sebagai berikut:

IKP 1. Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional

$$IKP 1 = \frac{\text{Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi per tahun}}{\text{Potensi lulusan vokasi per tahun **}} \times 100\%$$

** potensi lulusan vokasional bidang konstruksi sebanyak 37.000 per tahun

Berdasarkan rumus dari metode perhitungan di atas, pemenuhan indikator dari Sasaran Program tersebut didukung oleh Sasaran Kegiatan (SK) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Diketahui bahwa Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dihitung dari persentase perbandingan jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang bersertifikat pada tahun berjalan dengan jumlah potensi lulusan vokasional per tahun (pada tahun berjalan). Terdapat 1 IKK yang digunakan sebagai masukan untuk pengisian metode pengukuran pada Sasaran Program di atas yaitu:

SK Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina

$$IKK = \frac{\text{target pelatihan vokasional bidang konstruksi per tahun}}{\text{potensi lulusan vokasi per tahun **}} \times 100\%$$

Sasaran Program yang kedua adalah “Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya” yang memiliki dua (2) indikator kinerja program yaitu: **IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi** yang dan **IKP 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR**, dengan metode pengukuran sebagai berikut:

IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi

$$IKP 1 = \frac{\% IKP 1.1 + \% IKP 1.2 + \% IKP 1.3}{3}$$

$$IKP\ 1.1 = \frac{\% IKK\ 1 + \% IKK\ 2 + \% IKK\ 3}{3}$$

$$IKP\ 1.2 = \% IKK\ 4$$

$$IKP\ 1.3 = \% IKK\ 5$$

Keterangan:

IKP 1.1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi

IKP 1.2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi

IKP 1.3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi

IKP 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR

$$IKP\ 2 = \% IKK\ 6$$

Berdasarkan rumus dari metode perhitungan di atas, pemenuhan indikator dari Sasaran Program tersebut didukung oleh Sasaran Kegiatan (SK) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Terdapat 6 IKK yang digunakan sebagai masukan untuk pengisian metode pengukuran pada Sasaran Program di atas yaitu:

SK 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

- Nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

$$IKK\ 1 = \frac{\text{Jumlah total nilai proyek}}{\text{Jumlah proyek yang disampling}} \times 100\%$$

$$* \text{Nilai Proyek} = \frac{\text{Jumlah indikator penerapan NSPK yang diterapkan}}{\text{Jumlah indikator dalam NSPK}} \times 100\%$$

Keterangan:

IKK 1. Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

SK 2. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

$$IKK\ 2 = \frac{\% IKK\ 2.1 + \% IKK\ 2.2 + \% IKK\ 2.3 + \% IKK\ 2.4 + \% IKK\ 2.5 + \% IKK\ 2.6}{6}$$

$$\% IKK\ 2.1 = \frac{\text{Total paket} - \text{Total paket tertambat}}{\text{Total paket}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.2 = \frac{\text{Total sanggah dan sanggah banding} - \text{Total sanggah dan sanggah banding benar}}{\text{Total sanggah dan sanggah banding}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.3 = \frac{\text{Total pengaduan} - \text{Total pengaduan benar}}{\text{Total pengaduan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.4 = \frac{\text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK} - \text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti benar}}{\text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.5 = \frac{\text{Jumlah variabel yang dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan}^*}{\text{Total variabel yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan}^*} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.6 = \frac{\text{Realisasi data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR}}{\text{Jumlah BUJK yang berkontrak di PUPR}} \times 100\%$$

Keterangan:

IKK 2. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa

Sub Indikator:

IKK 2.1 Persentase tender/seleksi tepat waktu

IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar

IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar

IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar

IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ

IKK 2.6 Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR

SK 3. Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK)

- Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi

$$IKK\ 3 = \frac{\text{Jumlah proyek strategis yang tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah proyek strategis}} \times 100\%$$

Keterangan:

IKK 3. Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi

SK 4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi

$$IKK\ 4 = \frac{\% IKK\ 4.1 + \% IKK\ 4.2}{2}$$

$$\% IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat}}{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi (BPS)}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 4.2 = \frac{\% IKK\ 4.2.1 + \% IKK\ 4.2.2 + \% IKK\ 4.2.3 + \% IKK\ 4.2.4}{4} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.1 = \frac{\text{Jumlah SKKNI bidang konstruksi yang terbarukan}}{\text{Jumlah kebutuhan SKKNI bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.2 = \frac{\text{Jumlah modul bidang konstruksi yang terbarukan}}{\text{Jumlah kebutuhan modul bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.3 = \frac{\text{Jumlah asesor bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan asesor bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.4 = \frac{\text{Jumlah instruktur bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan instruksi bidang konstruksi}} \times 100\%$$

Keterangan:

IKK 4.1. Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

IKK 4.2. Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi

Sub Indikator:

IKK 4.2.1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

IKK 4.2.2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

IKK 4.2.3. Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

IKK 4.2.4. Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

SK 5. Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi

$$IKK\ 5 = \% IKK\ 5.1 + e.\% IKK\ 5.2 + f.\% IKK\ 5.3$$

$$\% IKK\ 5.1 = a.\% IKK\ 5.1.1 + b.\% IKK\ 5.1.2 + c.\% IKK\ 5.1.3 + d.\% IKK\ 5.1.4$$

$$\% IKK\ 5.1.1 = \frac{\text{Jumlah OPD terbentuk dan operasional}}{\text{Jumlah OPD di tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.1.2 = \frac{\text{Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi di Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.1.3 = \frac{\text{Jumlah Penyedia Jasa yang berkinerja baik}}{\text{Jumlah Penyedia Jasa di tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.1.4 = \frac{\text{Persentase asosiasi yang terakreditasi} + \text{Persentase BUJK dan TKK terintegrasi} + \text{Persentase Penyetaraan BUJK dan TKA} + \text{Persentase LSP dan LSBU Terlisensi}}{4} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.2 = \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi}}{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang terdata di tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.3 = \frac{\text{realisasi data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN}}{\text{target data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN yang harus tersedia}} \times 100\%$$

Bobot:

a = b = c = d = 12,5%

e = 25%

f = 25%

Keterangan:

IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi

IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.3 Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN

Sub Indikator:

IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional

IKK 5.1.2. Persentase asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi

IKK 5.1.3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI

IKK 5.1.4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

SK 6. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

$$IKK 6.1 = \frac{\% \text{ layanan perencanaan, program, dan keuangan} + \% \text{ layanan administrasi kepegawaian dan umum} + \% \text{ layanan hukum informasi jasa konstruksi, dan komunikasi publik}}{3}$$

% layanan = Survei persepsi kepada internal organisasi untuk mengetahui tingkat layanan

$$IKK 6.2 = \frac{\% IKK 6.2.1 + \% IKK 6.2.2 + \% IKK 6.2.3 + \% IKK 6.2.4 + \% IKK 6.2.5}{5}$$

$$\% IKK 6.2.1 = \frac{\text{realisasi informasi kinerja penyedia jasa konstruksi}}{\text{target informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK 6.2.2 = \frac{\text{realisasi informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang tersedia}}{\text{target informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK 6.2.3 = \frac{\text{realisasi informasi penyelenggaraan jasa konstruksi}}{\text{target informasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK 6.2.4 = \frac{\text{realisasi informasi pembinaan jasa konstruksi}}{\text{target informasi pembinaan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK 6.2.5 = \text{Survei persepsi kepada stakeholder yang menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi}$$

Keterangan:

IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

IKK 6.2. Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

Sub Indikator:

IKK 6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi

IKK 6.2.2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) jasa konstruksi

IKK 6.2.3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi

IKK 6.2.4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

IKK 6.2.5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi

2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Target Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2022 ditetapkan pada Renstra 2020-2024. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki dua program utama yaitu “Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional” dan “Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya”. Target yang ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2022 berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Target Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						
SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional						
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,3	5,6	6,0	6,4	6,8
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional						
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	70	75	80	85	90
Program Dukungan Manajemen						
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR						
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	43	51	57	63	68
Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	43	51	57	63	68
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya						
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	43	51	57	63	68
1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	80	84	89	92
2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	14	21	28	35	42
3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	40	51	59	66	71
IKP 2: Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	55,92	63,35	71,54	79,26	84,12

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024

Berdasarkan tabel 2.1, terlihat bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendukung sasaran strategis kementerian yaitu (1) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan target 2022 sebesar 6%; dan (2) Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dengan target 2022 sebesar 57%. Sementara target sasaran program yang dilaksanakan

oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun 2022 adalah (1) Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dengan target IKP sebesar 80% dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan target IKP 1 sebesar 57% yang berasal dari perhitungan 3 Sub IKP, yaitu (a) Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dengan target 84%, (b) Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi dengan target 28%, dan (c) Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi dengan target 59%, serta target IKP 2 sebesar 71,54%. Pencapaian dua program tersebut didukung oleh pencapaian sasaran kegiatannya di bawahnya. Berikut merupakan target sasaran kegiatan sebagai pendukung program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta dengan indikator kinerja kegiatan berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024:

Tabel 2. 2 Target Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi							
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina							
	IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	%	81	81	81	81	81
Program Dukungan Manajemen							
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi							
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi							
	IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	60	65	70	75	80
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi							
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa							
	IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	68	75	83	91	97
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi							
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)							
	IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi							
	SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	%	14	21	28	35	42
	IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang	%	9	10	12	13	14

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
bersertifikat						
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	20	32	44	57	69
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi						
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	%	40	51	59	66	71
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	16	23	28	31	33
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	10	20	30	40	50
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	%	85	90	95	98	100
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100	100	100
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100	100	100
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	68	75	84	92	97

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024

Dalam rangka pemenuhan target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020-2024 yang telah disebutkan di atas, berikut adalah kerangka pendanaan sebagai input pelaksanaan program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020-2024 sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR TA 2020-2024:

Tabel 2. 3 Target Anggaran Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi					
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina					
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Program Dukungan Manajemen					
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi					
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	17.810	22.094	22.254	22.421	22.593
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa					
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	89.590	111.137	111.944	112.784	113.650
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi					
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	8.599	10.667	10.744	10.825	10.908
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi					
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi					
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	102.956	150.806	152.599	154.465	156.387
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	35.782	44.388	44.711	45.047	45.392
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi					
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi					
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	18.457	22.896	23.062	23.235	23.414
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	6.152	7.632	7.687	7.745	7.805
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	12.305	15.264	15.375	15.490	15.609
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya					
IKK: Tingkat layanan dukungan	337.860	419.118	422.163	425.332	428.596
IKK: Tingkat layanan dukungan	330.860	412.118	415.163	418.332	421.596

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya					
	IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024

BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Aspek sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam rangka menghadirkan proses perencanaan ketersediaan sumber daya manusia sampai dengan pengembangan dan terminasinya. Pentingnya peran sumber daya manusia bagi keberhasilan suatu organisasi sehingga dewasa ini setiap organisasi berlomba untuk mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tidak ketinggalan pula organisasi pemerintahan di Indonesia. Apalagi selama ini sumber daya manusia organisasi pemerintahan di Indonesia dinilai belum banyak yang menggunakan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sehingga berujung pada kurang tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas serta mampu melaksanakan perannya melayani masyarakat. Padahal, untuk mewujudkan keberhasilan dalam melaksanakan peran dan fungsinya, organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah mutlak harus digerakkan oleh sumber daya manusia yang kompeten, tangguh, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.

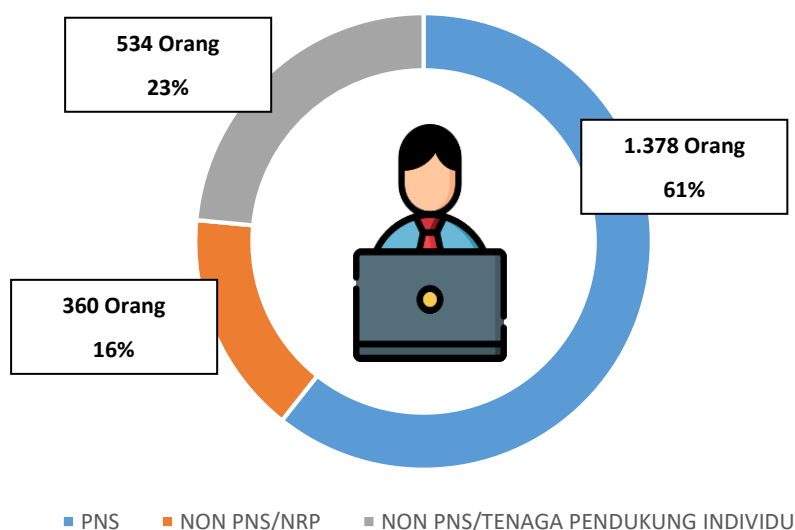
Sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan organisasi dan secara bersama mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Sumber daya manusia merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Untuk menjalankan program-programnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan pelayanan secara terintegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh manajemen kepemimpinan yang sangat kuat dalam membangun hubungan kerja yang baik antar staf, hubungan atasan-bawahan serta hubungan eksternal seperti persaingan baik antar maupun inter organisasi, keadaan stabilitas politik, sosial serta politik. Hal tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan baik, untuk menyelenggarakan produk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat konstruksi.

Secara kuantitas, jumlah pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berjumlah 2.242 pegawai dengan komposisi yang dibagi berdasarkan status pegawai, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan golongan, sebagai berikut:

A. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status

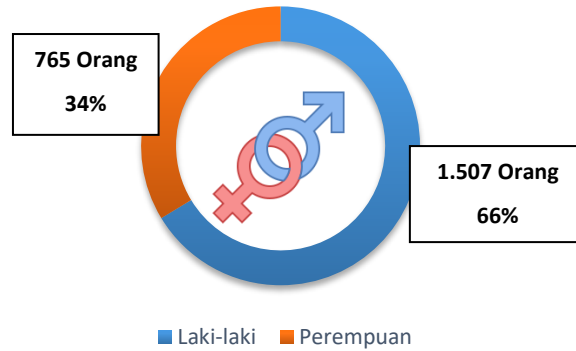
Pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS, dan Tenaga Pendukung Individual. Pada tahun 2022, pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didominasi oleh PNS dengan jumlah 1.378 orang atau sekitar 61%. Setelah itu diikuti oleh Tenaga Pendukung Individual dengan jumlah 534 orang atau sekitar 23% dan pegawai Non PNS/NRP dengan dengan jumlah 360 orang atau sekitar 16%.



Gambar 3. 1 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2022

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

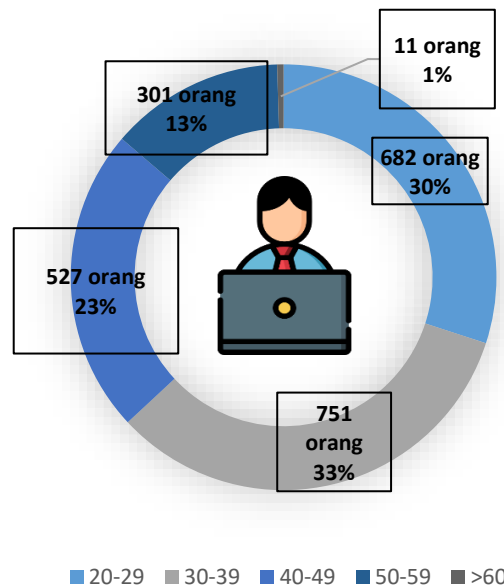
Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didominasi oleh pegawai laki-laki. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 1.507 orang atau sekitar 66% dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 765 orang atau sekitar 34%.



Gambar 3. 2 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
 Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2022

C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dikelola oleh SDM yang berada dalam usia produktif dan berpengalaman (usia 30-39 tahun dan 40-49 tahun) dengan total 1.278 orang atau 56,2%. Sementara usia yang akan memasuki masa pensiun (50-59 tahun dan >60 tahun) yaitu sebanyak 312 orang atau 13,7%. Adapun pegawai muda (20-29 tahun) sebanyak 682 orang atau 30%, yang tentunya masih membutuhkan banyak pengalaman serta peningkatan kompetensi bidang PUPR.

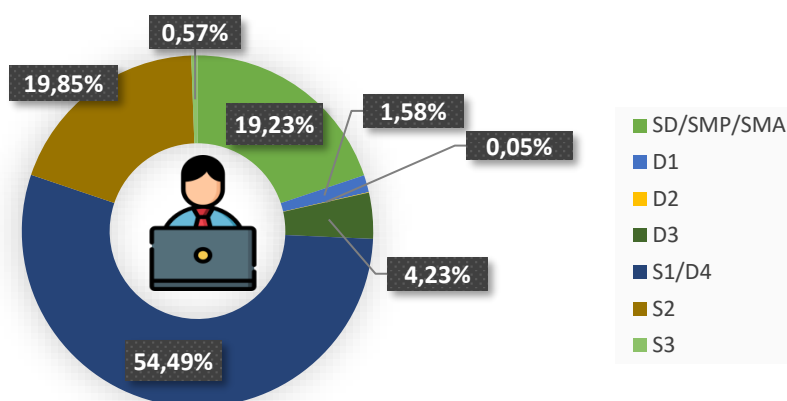


Gambar 3. 3 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
 Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2022

D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Proporsi pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan tingkat pendidikan SMA atau di bawahnya masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 451 orang atau sekitar 19,85%.

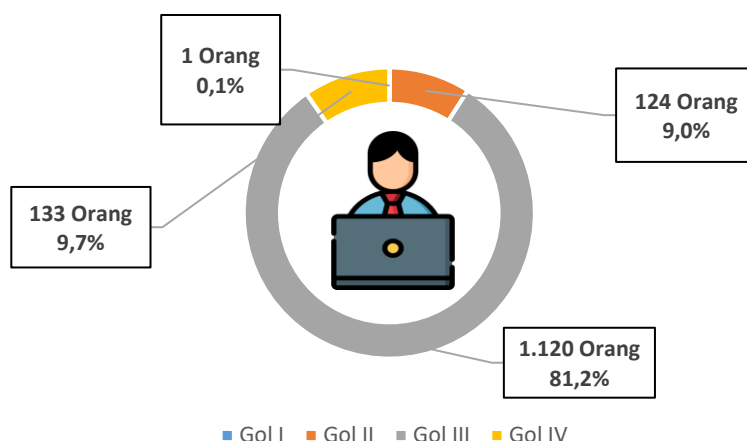
Guna meningkatkan kualitas SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang profesional dan kompeten, pendekatan rekrutmen pegawai telah diubah dengan menetapkan batas latar belakang pendidikan secara umum adalah D3, S1, dan S2. Hal tersebut terbukti dengan jumlah pegawai dengan kategori D1 s.d. S2 mencapai 79,58% atau lebih dari separuh pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Bahkan terdapat 13 pegawai yang telah bergelar doctor (S3).



Gambar 3. 4 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2022

E. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Khusus untuk jenis pegawai PNS, pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didominasi oleh golongan III yaitu 1.120 orang atau sekitar 81,2%, diikuti golongan IV yaitu 133 orang atau sekitar 9,7%, golongan II yaitu 124 orang atau sekitar 9,0%, dan 1 orang golongan I atau sekitar 0,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mayoritas diisi oleh SDM muda yang berkualitas pendidikan tinggi karena minimal memiliki ijazah S1 untuk mencapai golongan III saat awal perekrutan. Pegawai senior atau yang berada pada golongan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi semakin berkurang jumlahnya karena banyak pegawai yang memasuki usia pensiun.



Gambar 3. 5 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2022

3.2 SARANA DAN PRASARANA

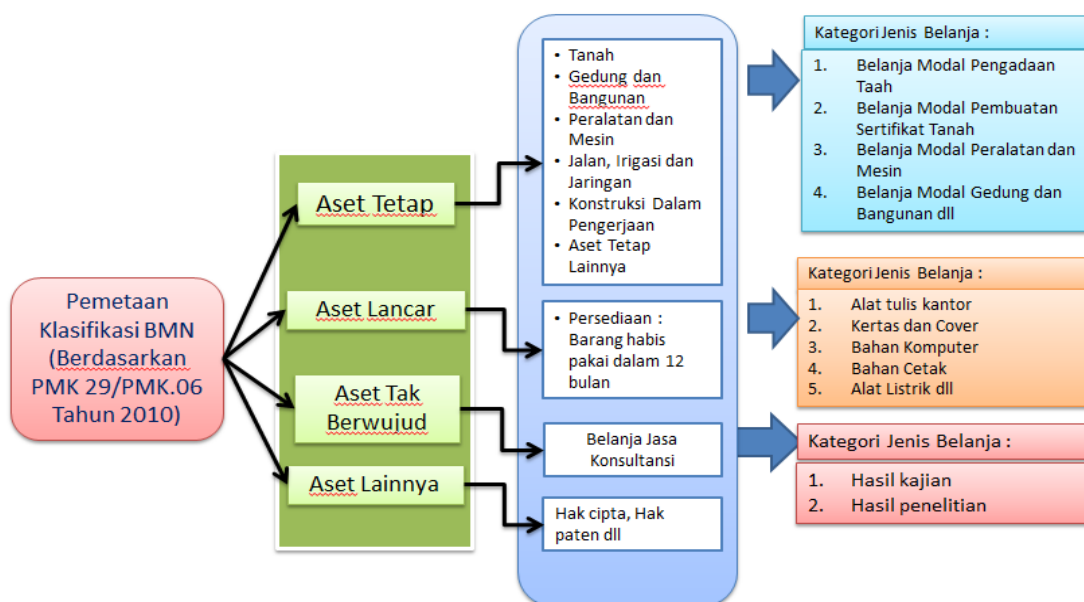
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan Prasarana merupakan fasilitasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, Instansi atau perkantoran dalam meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi perkantoran merupakan proses pendukung aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dan instansi perkantoran.

Sarana dan prasarana merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja pegawai, agar teroganisir sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang baik perlu ditunjang dengan fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat.

Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meliputi semua Barang Milik Negara (BMN) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah yaitu:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Klasifikasi BMN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 532/KM.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 6 Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

Salah satu aset sarana yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah Gedung dan bangunan perkantoran yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja. Adapun luasan bangunan dan tanah keseluruhan aset Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Luasan Bangunan dan Tanah Keseluruhan Aset DJBK TA 2022

NO	UNIT KERJA	LUAS TANAH (m ²)	LUAS BANGUNAN (m ²)	KETERANGAN
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.428	939,8	Tanah dan Bangunan milik Sekretariat Jenderal (Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
2	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi	1.428	814,7	
3	Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi	1.428	814,7	
4	Dit Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	1.428	675	
5	Dit Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	-	1.640	Tanah milik BPSDM dan Bangunan milik DKPK
6	Dit. Keberlanjutan Konstruksi	1.428	675	Tanah dan Bangunan milik Sekretariat Jenderal (Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
7	Sekretariat LPJK	-	630	Tanah dan Bangunan milik Cipta Karya

NO	UNIT KERJA	LUAS TANAH (m ²)	LUAS BANGUNAN (m ²)	KETERANGAN
8	BJKW I Banda Aceh	8.000	756	Tanah milik Univ. Syiah Kuala dan Bangunan milik BJKW I Banda Aceh
9	BJKW II Palembang	5.345	682	Tanah milik Pemkot Palembang dan Bangunan milik BJKW II Palembang
10	BJKW III Jakarta	73.345	2.304	Tanah dan Bangunan milik BJKW III Jakarta
11	BJKW IV Surabaya	23.879	2.250	Tanah dan Bangunan milik BJKW IV Surabaya
13	BJKW V Banjarmasin	2.100	625	Tanah milik Direktorat Jenderal SDA (Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan II) dan Bangunan milik BJKW V Banjarmasin
14	BJKW VI Makasar	15.000	1.520	Tanah milik Pemprov Sulawesi Selatan dan Bangunan milik BJKW VI Makassar
15	BJKW VII Jayapura	6.054	3.070	Tanah milik Direktorat Jenderal Bina Marga (Satuan Kerja Balai BPJN X) dan Bangunan milik BJKW VII Jayapura
16	BP2JK DKI Jakarta	2.692	996	Tanah dan Bangunan Milik BP2JK DKI Jakarta
17	BP2JK Jawa Barat	4.574	3.653	Tanah dan Bangunan Milik BP2JK Jawa Barat
18	BP2JK D.I.Yogyakarta	-	907	Tanah milik Direktorat Jenderal Perumahan dan Bangunan milik BP2JK D.I.Yogyakarta
19	BP2JK Jambi		674	Tanah dan Bangunan milik SDA
20	BP2JK Riau		738	Tanah dan Bangunan milik SDA
21	BP2JK Lampung		467	Tanah dan Bangunan milik SDA
22	BP2JK Sumatera Barat		670	Tanah dan Bangunan milik SDA
23	BP2JK Jawa Tengah		861	Tanah dan Bangunan milik SDA
24	BP2JK Bali		550	Tanah dan Bangunan milik Cipta Karya
25	BP2JK NTB		426,8	Tanah dan Bangunan milik SDA
26	BP2JK Banten		562	Tanah dan Bangunan milik SDA
27	BP2JK Papua Barat		450	Tanah dan Bangunan milik Bina Marga
28	BP2JK Gorontalo		378	Pinjam Pakai Pemerintah Provinsi Gorontalo
29	BP2JK NTT		280	Pinjam Pakai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
30	BP2JK SUMUT		370	Tanah dan Bangunan milik BPSDM
31	BP2JK Aceh		444	Tanah dan Bangunan milik DJBK
32	BP2JK Jatim		1.388	Tanah dan Bangunan milik DJBK
33	BP2JK Kalsel		516	Tanah dan Bangunan milik DJBK
34	BP2JK Sulsel		516	Tanah dan Bangunan milik DJBK
35	BP2JK Papua		508	Tanah dan Bangunan milik DJBK

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa aset tanah yang merupakan milik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah yang saat ini ditempati oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat dengan luas total 104.490 m². Adapun luas bangunan dan

tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan diurus oleh Biro Umum dan ditempati oleh Satker Pusat (SetDirektorat Jenderal BK, Dit 1, Dit 2, Dit 3 dan Dit 5) masing-masing seluas 3.244,2 m² dan 5.712 m². Sebagian besar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terutama yang berdomisili di daerah, masih meminjam-pakai tanah dan bangunan milik unit kerja lain seperti milik Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal SDA, Direktorat Jenderal Perumahan, Universitas Syahkuala, Pemkot Palembang dan Pemprov Sulsel dengan total luas bangunan 5.160 m² dan luas tanah 36.449 m². Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% luas bangunan yang ditempati unit kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi masih dalam status pinjam-pakai.

Adapun secara detail aset-aset Tanah dan Bangunan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mendukung tugas dan fungsi organisasi sebagai pembina jasa konstruksi khususnya dalam hal pelatihan tenaga kerja konstruksi dan pengadaan jasa konstruksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2 Detil Aset Tanah dan Bangunan DJBK

ASET	LUAS (m ²)	KETERANGAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		
Mess/Wisma	1.128	8 Mess masing-masing seluas 141 m ²
Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		
Penunjang	1.190	Garasi 720 m ² Garasi 450 m ² Rumah Genset 20 m ²
BJKW I Banda Aceh		
Bengkel/Hanggar	1.964	Workshop Carpentry 756 m ² Workshop Concrete & Plumbing 756 m ²
Penunjang	715	Penampungan / tower air 9m ² Tempat Parkir 56m ² Tempat Parkir 100m ² Taman 400m ² Gudang Material 150m ²
BJKW II Palembang		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	682	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Ka Pelaksana, Ruang Rapat, dkk
BJKW III Jakarta		
Bengkel/Hanggar	4.289	Workshop Plumbing 204m ² Workshop Batu 700m ² Workshop Plumbing 1.400m ² Workshop Batu 200m ² Workshop Las 985m ² Workshop Kayu 800m ²
Penunjang	364	Dapur
Bengkel/Hanggar (eks Balai MPK)	3.264	Workshop Mekanik (1.632m ²) Workshop Alat Berat (1.632m ²)
Gedung Pendidikan & Lab	2.620	Indor Training Ground 830m ²

ASET	LUAS (m ²)	KETERANGAN
(eks Balai MPK)		Indor Training Ground 830m ² Workshop AMP/CBP 800m ² Laboratorium Metalurgi 160m ²
Mess/Wisma (eks Balai MPK)	218	Mess Peserta 142m ² Mess Instruktur 76m ²
Penunjang (eks Balai MPK)	2.064	Gudang Seng 108m ² Bangunan Genset AMP 90m ² Stock Pile AMP 40m ² Masjid 60m ² Aula 500m ² Pos Satpam 8m ² Kolam Penampung 308m ² Tower Air 50m ² Lobby Mess 264m ²
BJKW IV Surabaya		
Gedung Pendidikan & Lab	13.389	Workshop Las (698m ²) Workshop Kayu (535m ²) Workshop Batu (535m ²) Workshop Plumbing (9.858m ²) Workshop Rekayasa Gambar (1.763m ²)
Mess/Wisma	3.161	Mess 1.773m ² Mess 1.388m ²
Rumah Negara	2.588	Gol. I Tipe A 669m ² Gol. I Tipe A 669m ² Gol. II Tipe B 250m ² Gol. II Tipe B 250m ² Gol. II Tipe B 250m ² Gol. II Tipe B 250m ²
Penunjang	1.525	Pos Jaga 36m ² Garasi 36m ² Tempat Parkir 840m ² Tempat Kerja Lainnya 43m ² Tempat Kerja Lainnya 43m ² Tempat Kerja Lainnya 43m ² Tempat Kerja Lainnya 43m ² Tempat Kerja Lainnya 371m ² Tempat Kerja Lainnya 16m ² Tempat Kerja Lainnya 54m ²
BJKW V Banjarmasin		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	625	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Ka Pelaksana, Ruang Rapat, dan kantor BP2JK Kalimantan Selatan dkk
BJKW VI Makassar		
Bengkel/Hanggar	1.350	Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing
Mess/Wisma	980	Mess
Penunjang	34	Rumah Genset
BJKW VII Jayapura		
Bengkel/Hanggar	648	Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing
Mess/Wisma	728	Kantor & Mess
Penunjang	80	Rumah Genset
BP2JK DKI Jakarta		
Gedung Garasi/Pool Permanen	96	Garasi Kendaraan
Mess/Wisma/Bungalow/Tem	1.700	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan

ASET	LUAS (m ²)	KETERANGAN
pat Peristirahatan Permanen		Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Pagar Permanen		
BP2JK Jawa Barat		
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	3653	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Pagar Permanen		
BP2JK D.I. Yogyakarta		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	445	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	426	
Rumah Sederhana Sehat	36	

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Pagu awal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022 sesuai dengan yang tercantum pada DIPA Induk yang terbit tanggal 17 November 2021 yaitu sebesar Rp. 600.000.000,-. Pagu alokasi tersebut terdiri atas Fungsi Ekonomi sebesar Rp. 524.961.000,- dan Fungsi Pendidikan sebesar Rp. 75.139.000,-. Kedua fungsi dalam DIPA tersebut dialokasikan untuk melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen guna mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu Meningkatkan Tata Kelola Kementerian PUPR. Rincian anggaran per jenis belanja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan DIPA Awal adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rincian Anggaran Per Jenis Belanja DJBK Berdasarkan DIPA Awal TA 2022

Program	Rincian Anggaran Per Jenis Belanja DIPA Awal DJBK TA 2022 (RP Ribu)			
	Pegawai	Barang	Modal	Total
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	75.139.000	-	75.139.000
Dukungan Manajemen	171.012.377	318.448.623	37.136.151	524.961.000
Total	171.012.377	393.587.623	37.136.151	600.000.000

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

Sedangkan rincian anggaran per satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan DIPA Awal dan DIPA Revisi adalah sebagai berikut:

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DJBK TA 2022

Tabel 3. 4 Rincian Anggaran Per Satuan Kerja di Lingkungan DJBK Berdasarkan DIPA Awal dan Revisi TA 2022

NO	SATUAN KERJA	PAGU	
		AWAL	REVISI
		Rp (000)	Rp (000)
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	145.610.098	161.003.922
2	DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	18.495.639	18.495.639
3	DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	88.209.111	97.295.211
4	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI	20.803.666	20.803.666
5	DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	20.934.008	21.050.008
6	DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI	13.482.928	13.789.538
7	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	15.355.658	25.155.658
8	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH	18.828.688	16.151.430
9	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG	19.016.950	16.578.846
10	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA	61.159.478	63.557.765
11	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA	27.601.213	29.980.237
12	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN	15.075.643	20.720.085
13	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR	18.097.257	23.768.363
14	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA	16.035.672	15.250.305
15	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH ACEH	2.670.607	2.670.607
16	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA UTARA	2.863.893	2.863.893
17	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA BARAT	2.991.012	2.991.012
18	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH RIAU	2.720.095	2.720.095
19	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KEPULAUAN RIAU	2.752.737	2.752.737
20	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA SELATAN	3.065.404	3.065.404
21	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANGKA BELITUNG	3.084.565	2.734.565
22	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BENGKULU	2.740.357	2.740.357
23	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH LAMPUNG	2.518.022	2.518.022
24	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAMBI	2.742.374	2.742.374
25	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANTEN	2.778.128	2.778.128
26	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DKI JAKARTA	3.571.325	4.501.325
27	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT	4.132.246	4.232.172
28	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DI YOGYAKARTA	2.946.032	2.946.032
29	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH	2.738.675	2.738.675
30	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TIMUR	2.987.435	2.987.435
31	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BALI	2.930.078	2.930.078
32	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTB	2.686.209	2.686.209
33	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTT	2.769.896	2.769.896
34	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN BARAT	2.941.433	3.141.433
35	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	2.935.974	2.935.974
36	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	3.099.402	3.099.402
37	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	2.858.246	3.008.246
38	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN UTARA	2.678.707	2.678.707
39	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN	3.046.173	2.798.173
40	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI BARAT	2.667.560	2.667.560

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DJBK TA 2022

NO	SATUAN KERJA	PAGU	
		AWAL	REVISI
		Rp (000)	Rp (000)
41	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGAH	2.983.357	3.083.357
42	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA	3.000.951	3.000.951
43	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI UTARA	2.861.306	3.109.306
44	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH GORONTALO	2.879.272	3.305.782
45	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU	3.287.247	3.485.247
46	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU UTARA	3.361.420	3.361.420
47	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA BARAT	3.565.144	3.565.144
48	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA	3.438.709	3.238.709
TOTAL		600.000.000	646.449.100

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

Kronologis revisi anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selama TA 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Kronologis Revisi Anggaran DJBK TA 2022

No	Revisi	Pagu (ribuan Rp.)	Satuan Kerja Terlibat	Keterangan
1	DIPA AWAL (17 November 2021)	600.000.000	48 Satker	Termasuk blokir sejumlah 14,68 milyar terkait sewa kendaraan dan biaya operasionalnya, jasa konsultan, renovasi gedung BJKW II Palembang, dan belanja bahan BJKW V Banjarmasin
2	Blokir AA (15 Desember 2021)	600.000.000	7 BJKW	Tambahan blokir pada pagu vokasional dengan total sebesar 26 milyar rupiah. Revisi merujuk pada: 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 2. Surat Menteri PUPR Nomor KU.0101-Mn/2108
3	Revisi DJA (15 Januari 2021)	600.000.000	Setditjen, 4 Direktorat, dan 2 BJKW	Buka blokir terkait pengalokasian belanja jasa konsultan dan renovasi gedung sebesar 6,63 Milyar
4	Revisi DJA (24 Januari 2022)	600.000.000	DJBK	Revisi Informasi Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DJBK TA 2022

No	Revisi	Pagu (ribuan Rp.)	Satuan Kerja Terlibat	Keterangan
5	PERGESERAN VOLUME (4 Maret 2022)	600.000.000	5 Direktorat	Tambahan blokir terkait pengalokasian belanja jasa konsultan dengan total sebesar 6,37 milyar dan Pencantuman PNBPN sebesar 8,09 milyar. Revisi merujuk pada: 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-909/MK.02/2021 2. SPRA Nomor S-30/AG/AG/3/2022
6	REVISI ANTAR SATKER DJPB (3 Agustus 2022)	600.000.000	Setditjen dan 4 BJKW	Pemenuhan belanja pegawai pada 4 satker BJKW dengan sumber anggaran dari Setditjen. Revisi merujuk pada exercise kekurangan belanja pegawai pada satuan kerja DJBK.
7	REVISI DJA (20 Agustus 2022)	649.363.000	Setditjen, 6 Direktorat, LPJK, 6 BJKW, dan 31 BP2JK	Buka blokir sebesar 9,50 milyar serta penambahan pagu untuk belanja pegawai sebesar 10,6 milyar rupiah dan dukungan infrastruktur IKN sebesar 38,76 milyar rupiah. Revisi merujuk pada: 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/PMK.02/2022 2. SP SABA 999.08 Nomor S-261/PMK.2/2022 3. Surat Sekjen PUPR Nomor PS.0102-Sj/569 4. Surat Sekjen PUPR a.n. Menteri PUPR Nomor KU0101-Mn/1365
8	REVISI ANTAR SATKER DJPB (7 Oktober 2022)	649.363.000	4 BP2JK	Revisi dilakukan untuk menunjang operasional perkantoran dan kebutuhan pelaksanaan tugas layanan pengadaan barang/jasa konstruksi
9	REVISI DJA (30 Oktober 2022)	672.449.100	Setditjen dan Dit Pengadaan	Tambahan pagu untuk belanja pegawai sebesar 9,8 milyar rupiah dan honor pokja sebesar 13,28 milyar rupiah. Revisi merujuk pada: 1. Surat Menteri PUPR Nomor KU0101-Mn/2035 2. Surat Menteri PUPR Nomor KU0202-Mn/1992 3. Surat Sekjen PUPR Nomor PR.0202-

No	Revisi	Pagu (ribuan Rp.)	Satuan Kerja Terlibat	Keterangan
				SJ/839
10	REVISI ANTAR SATKER DJPB (7 November 2022)	672.449.100	Setditjen, 2 Direktorat, 5 BJKW, 7 BP2JK	Revisi dilakukan untuk menunjang operasional perkantoran dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pada satuan kerja tersebut
11	REVISI DJA (6 Desember 2022)	646.449.100	Dit Pengadaan, 7 BJKW	Pengurangan pagu vokasional (blokir AA) total sebesar 26 milyar rupiah yang digeser ke BA BUN Kementerian Keuangan. Revisi merujuk pada: 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 2. Surat Menteri PUPR Nomor KU0101-Mn/2387

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran Program

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Direktorat Jenderal Bina turut mendukung 2 (dua) sasaran strategis pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu SS.4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan SS.5 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya. Kedua indikator dari masing-masing sasaran strategis diatas yaitu IKSS.4 Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan capaian 2022 sebesar 11,32% dari target 6%; dan IKSS.5 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi, dengan capaian sebesar 70,33% dari target 57%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor terlaksananya pengelolaan 98 NSPK terkait tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dukungan rantai pasok konstruksi, kinerja kelembagaan jasa konstruksi, tersusunnya SKKNI baru dan SKKNI terbarukan bidang konstruksi, sinergitas seluruh pihak internal dan eksternal dalam rangka pembinaan sumber daya konstruksi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring.

Untuk mendukung 2 (dua) Sasaran Strategis Kementerian PUPR tersebut diatas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan Program (1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan (2) Dukungan Manajemen sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 Sasaran Program sesuai dengan program yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: (1) Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Sasaran Program yang pertama memiliki indikator kinerja program yaitu Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional dengan target 80%. Sedangkan, Sasaran Program yang kedua memiliki 2 indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengan target

57% dan Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dengan target 71,54%. Capaian kinerja Sasaran Program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2022		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2022
		Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	6,0	11,32	188,62%
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional				
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	80	100	125,00%
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
1 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	84	90,64	107,90%
2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	28	59,50	212,50%
3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	59	60,86	103,16%
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	77,97	80,66	103,45%
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 2: Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	71,54	87,55	122,38%

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

Capaian sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil di 5 Direktorat, Sekretariat, 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Sekretariat LPJK, dan 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Berdasarkan tabel di

atas, Sasaran Program pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi memiliki target IKP sebesar 80% dengan realisasi sebesar 100% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil mencapai target** dengan capaian kinerja sebesar 125%. Keberhasilan capaian Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ini didukung oleh faktor peningkatan kualitas asesor dan instruktur bidang konstruksi, adanya pembaharuan SKKNI, efisiensi kegiatan pembinaan SDM vokasional secara online, serta tingginya sinergitas program dengan lingkungan eksternal, misalnya adanya kerjasama *cost sharing* dengan Kadin. Selanjutnya, Sasaran Program pada Program Dukungan Manajemen untuk IKP 1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi memiliki target sebesar 57% dengan realisasi sebesar 70,33% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil mencapai target** dengan capaian kinerja sebesar 123,39%, dan untuk IKP 2 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya memiliki target sebesar 71,54% dengan capaian sebesar 87,55% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil mencapai target** dengan capaian kinerja sebesar 122,38%. Keberhasilan capaian Program Dukungan Manajemen ini didukung oleh faktor terlaksananya pengelolaan 98 NSPK terkait tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dukungan rantai pasok konstruksi, kinerja kelembagaan jasa konstruksi, tersusunnya SKKNI baru dan SKKNI terbaru bidang konstruksi, sinergitas seluruh pihak internal dan eksternal dalam rangka pembinaan sumber daya konstruksi, efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring, tersedianya informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak, pencapaian tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I, ketersediaan informasi rantai pasok, penyelenggaraan jasa konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, serta terlaksananya layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.

Capaian untuk IKP 2 pada Sasaran Program Dukungan Manajemen merupakan capaian bersama yang diselenggarakan oleh seluruh Unit Organisasi yang ada di lingkungan Kementerian PUPR yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

B. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam rangka perhitungan realisasi Sasaran Program yang ada di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, terdapat rumus perhitungan di setiap Sasaran Program sesuai dengan penjelasan sebelumnya pada subbab Metode Perhitungan. Setiap Sasaran Program dihitung menggunakan indikator kinerja program yang merupakan hasil

perhitungan dari beberapa indikator kinerja kegiatan. Nilai dari indikator kinerja kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan bukti hasil kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sesuai dengan Sasaran Keegiatannya.

Hierarki Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bentuk dukungan dari setiap Direktorat dan Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada dibawahnya, yaitu Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Selain itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan yang tersebar di seluruh balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mendukung pencapaian sasaran program.

Program yang pertama, yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Sasaran Program “Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional”, didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi dengan Sasaran Kegiatan “Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina”. Berikut adalah capaian kinerja Sasaran Kegiatan yang mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di tahun 2022:

Tabel 4. 2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan di Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi TA 2022

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2022		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2022
		Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	6,0	11,32	188,62
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional				
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	80	100	125%
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi				
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina				
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	%	81	122,35	150,89%
Koordinator: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2022		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2022
		Target	Realisasi	
Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah				
Output Kegiatan:				
1. SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Orang	30.000	45.268	150,89%

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

Adapun penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di setiap Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Meningkatnya SDM Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional yaitu:

1. SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina

Sasaran Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Sedangkan pada pelaksanaannya, dilakukan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu: BJKW I Banda Aceh, BJKW II Palembang, BJKW III Jakarta, BJKW IV Surabaya, BJKW V Banjarmasin, BJKW VI Makassar, dan BJKW VII Jayapura. Berdasarkan target PK, output kegiatan yang dihasilkan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah dengan target SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina sebesar 31.830 orang pada tahun 2022 telah tercapai. Berikut adalah capaian output kegiatannya:

Tabel 4. 3 Capaian Output SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina

NO	OUTPUT KEGIATAN	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)
1	SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	31.830	45.268

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2022

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target DIPA masing-masing Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang diturunkan ke dalam Perjanjian Kerja Revisi TA 2022, Balai Jasa Konstruksi Wilayah secara total juga dapat mencapai target, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Rincian Capaian DIPA/PK SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina

NO	SATUAN KERJA	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)
1	BJKW I ACEH	3.900	5.200
2	BJKW II PALEMBANG	4.800	5.220
3	BJKW III JAKARTA	9.100	9.907
4	BJKW IV SURABAYA	5.940	12.780
5	BJKW V BANJARMASIN	2.740	3.673
6	BJKW VI MAKASSAR	3.250	6.809
7	BJKW VII JAYAPURA	2.100	1.679
	TOTAL	31.830	45.268

Sumber: dayanaker.binakonstruksi.pu.go.id, 2022

Berdasarkan capaian output kegiatan yang dilaksanakan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah di atas, hasil tersebut digunakan sebagai masukan dalam menghitung Sasaran Kegiatan Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina dengan rincian rumus perhitungan indikator kinerja kegiatannya sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\text{target pelatihan vokasional bidang konstruksi per tahun}}{\text{potensi lulusan vokasi per tahun}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan dari indikator kinerja kegiatan Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina:

$$IKK = \frac{45.268}{37.000} \times 100\% = 122,35\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **telah berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina dengan capaian sebesar 122,35% terhadap target Renstra sebesar 81%. Selanjutnya, persentase indikator kinerja kegiatan tersebut digunakan sebagai masukan ke dalam perhitungan indikator kinerja program pada Sasaran Program Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang

Kompeten dan Profesional dengan rincian rumus perhitungan indikator kinerja program sebagai berikut:

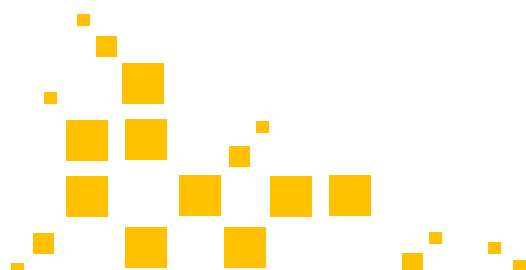
$$IKP\ 1 = \frac{\text{Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi per tahun}}{\text{Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan dari indikator kinerja program tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional:

$$IKP\ 1 = \frac{45.268}{45.268} \times 100\% = 100\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja program tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil** dalam mencapai target Sasaran Program Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dengan capaian IKP sebesar 100% terhadap targetnya sebesar 80%. Selanjutnya, dari indikator kinerja program di atas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **telah berhasil** memenuhi target Sasaran Strategis Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan capaian IKSS 11.32% terhadap targetnya sebesar 6,0%. Keberhasilan capaian Sasaran Strategis Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ini didukung oleh faktor tersusunnya SKKNI baru dan SKKNI terbaru bidang konstruksi, sinergitas berbagai pihak internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan pembinaan SDM vokasional, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring.

Program yang kedua, yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat, Sekretariat, Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, dan Sekretariat LPJK. Berikut adalah capaian kinerja Sasaran Kegiatan yang mendukung Program Dukungan Manajemen di tahun 2022:



Tabel 4. 5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang Mendukung Program Dukungan Manajemen TA 2022

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2022		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2022
			Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
	IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
	IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	7	70,33	123,39%
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	84	90,64	107,90%
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	28	59,50	212,50%
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	59	60,86	103,16%
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi					
	IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	70	87,39	124,84%
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa					
	IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	%	83	87,42	105,33%
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi					
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	97,1	97,1
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi					
	SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	%	28	59,50	212,50%
	IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	12	13,51	112,60%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2022		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2022
			Target	Realisasi	
	IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	44	105,49	239,74%
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi					
	SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	%	59	60,86	103,16%
	IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	28	23,74	84,79
	IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	30	53,48	178,28%
	IKK: Persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	%	95	95	100,00%
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
	IKSS: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	77,97	80,66	103,45%
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
	IKP 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	71,54	87,55	122,8%
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
	SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	102,36	102,36%
	IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2022		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2022
		Target	Realisasi	
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	84	87,96	104,71%

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

Program Dukungan Manajemen memiliki Sasaran Program yang terdiri dari 2 indikator kinerja program, yaitu IKP 1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dan IKP 2 Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR. Adapun penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di setiap **Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Dukungan Manajemen pada IKP 1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dan mendukung Sub indikator pada IKP 1 Tingkat penyelenggaraan jasa konstruksi**, yaitu:

1. SK 1: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 3 output kegiatan, yaitu: (1) Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, (2) Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, dan (3) Profil kerja sama bidang jasa konstruksi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 1: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi:

Tabel 4. 6 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2022		Capain Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2022
		Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
1 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	84	90,64	107,90%
2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	28	59,50	212,50%
3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	59	60,86	103,16%
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi				
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	70	87,39	124,84%
Output Kegiatan:				
1. Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	NSPK	1	8	800%
2. Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	Laporan	1	1	100%
3. Profil kerja sama bidang jasa konstruksi	Kesepakatan	1	1	100%

Sumber: Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, 2022

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

- Nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

$$IKK 1 = \frac{\text{Jumlah total nilai proyek}}{\text{Jumlah proyek yang disampling}} \times 100\%$$

$$* \text{Nilai Proyek} = \frac{\text{Jumlah indikator penerapan NSPK yang diterapkan}}{\text{jumlah indikator dalam NSPK}} \times 100\%$$

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Unit Kerja Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

$$IKK 1 = \frac{20.013}{332} \times 100\% = 87,39\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah **berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi dengan capaian sebesar 87,39% terhadap targetnya sebesar 70%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor telah telaksananya realisasi profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi sebesar 8 NSPK dari target 1 NSPK, realisasi profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi sebesar 1 Laporan dari target 1 Laporan, dan realisasi profil kerja sama bidang jasa konstruksi sebesar 1 Kesepakatan dari target 1 Kesepakatan. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi melakukan penilaian terhadap rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi yang sedang dijalankan oleh Kementerian PUPR di tahun 2022. Penilaian tersebut menggunakan metode survey menggunakan Daftar SIMAK 2022 yang memuat 3 indikator kunci, yaitu:

- a. Pemenuhan kelengkapan administrasi kontrak;
- b. Pemenuhan kesesuaian substansi administrasi kontrak; dan

c. Pemenuhan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak.

Penerapan NSPK yang dinilai terdiri dari Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Kontrak Konstruksi terhadap paket pekerjaan yang telah disampling menggunakan, sebanyak 332 paket pekerjaan. Rangkuman hasil survey Daftar SIMAK 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Rangkuman Hasil Survey Daftar SIMAK 2022

No	Penerapan NSPK	Nilai Rata-Rata (%)
1	NSPK Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	93,81
2	NSPK Kontrak Konstruksi	80,97
	Total Rata-Rata	87,39

Sumber: Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, 2022

Beberapa temuan permasalahan yang didapatkan dari penilaian penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu:

- a. Satker/PPK dalam menyusun spesifikasi teknis, ditemukan ketidaklengkapan substansi antara lain penjelasan terkait jangka waktu, metode, spesifikasi peralatan, mekanisme pengujian, dan tata cara pengukuran (75 Paket / 22,59% dari 332 Sampel Paket);
- b. Satker/PPK dalam menyusun rancangan kontrak, tidak memuat Jenis Kontrak, Bentuk Kontrak, Naskah Perjanjian, Jaminan Uang Muka (apabila diberikan uang muka), Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Penyesuaian Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) (80 Paket / 24,09% dari 332 Sampel Paket);
- c. Pokja Pemilihan tidak melakukan evaluasi kewajaran harga terhadap penawaran di bawah 80% nilai HPS (5 Paket / 3,73% dari 134 Paket yang harus melaksanakan evaluasi kewajaran harga);
- d. Pokja Pemilihan tidak mencantumkan keterangan peserta yang ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai HPS dalam Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga (33 Paket / 25,19% dari 134 Paket yang harus melaksanakan evaluasi kewajaran harga);
- e. Pokja Pemilihan tidak memberikan kesimpulan atas hasil evaluasi kewajaran harga dalam Berita Acara Kewajaran Harga (8 Paket / 6,11% dari 134 Paket yang harus melaksanakan evaluasi kewajaran harga);

f. Dalam hal Evaluasi Kewajaran Harga didampingi oleh tim teknis pendamping, Berita Acara Hasil Pendampingan Klarifikasi Kewajaran Harga dan Pakta Integritas tidak ditandatangani oleh anggota Tim Teknis Pendamping (4 Paket / 3,36% dari 119 Paket yang melaksanakan evaluasi kewajaran harga dengan didampingi Tim Teknis Pendamping).

Selain itu, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi juga memiliki capaian output kegiatan yaitu:

Tabel 4. 8 Capaian Output Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
1	<p>Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p>Terdiri dari:</p> <p>a. Usulan Rancangan Substansi Pengadaan Jasa Konstruksi pada Rancangan Revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>b. Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan dan Pemilihan Penyedia dengan Metode Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>c. Revisi Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal</p>	NSPK	1	8

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
	<p>Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;</p> <p>e. Penyusunan Model Dokumen Pemilihan (MDP) Pengadaan Jasa Konstruksi Khusus Ibu Kota Negara (IKN);</p> <p>f. SE Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>g. SE Menteri PUPR Nomor 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>h. Rancangan Kontrak untuk Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi.</p>			
2	<p>Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p>Bentuk pelaksanaan:</p> <p>a. Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA 2022</p>	Laporan	1	1
3	<p>Profil kerja sama bidang jasa konstruksi</p> <p>Bentuk pelaksanaan:</p> <p><u>Kerja Sama Dalam Negeri</u></p> <p>a. Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Program Kementerian Koordinator Bidang</p>	Kesepakatan	1	1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
	<p>Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK)</p> <p>b. Renaksi Jasmostek: Penyusunan SE Menteri PUPR Tentang BPJS</p> <p>c. Renaksi JKN: Penyusunan PKS Kementerian PUPR dan BPJS Kesehatan</p> <p>d. Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Semen Indonesia (Persero) TBK ("SIG")</p> <p>e. MoU dengan Asosiasi Semen Indonesia (ASI)</p> <p>f. Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK)</p> <p>g. Penyusunan Pedoman Kerjasama Mitra Strategis Bidang Jasa Konstruksi</p> <p><u>Kerja Sama Luar Negeri</u></p> <p>a. Kegiatan Menggapai Manfaat Dalam Perdagangan Jasa Internasional "<i>Potential, Challenges and Ways Forward</i>"</p> <p>b. PKS Program <i>Specified Skilled-Workers (SSW)</i></p> <p><u>Perundingan Internasional</u></p> <p>a. <i>Indonesia – Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC CEPA)</i></p> <p>b. <i>Indonesia – Korean Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA)</i></p> <p>c. <i>Indonesia – United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE CEPA)</i></p> <p>d. <i>Joint Initiative on Service</i></p>			

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
	<p><i>Domestic Regulation (JISDR) WTO</i></p> <p><u>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</u></p> <p>a. Status dan Progres Kegiatan Kerja Sama 2022</p> <p>b. Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama PKS Aktif</p>			

Sumber: Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, 2022

2. SK 2: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 wilayah/provinsi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 4 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, yaitu: (1) Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, (2) Profil kinerja UKPBJ dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ), (3) Profil kinerja penyedia jasa konstruksi, dan (4) Profil kepatuhan intern Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Selain itu, terdapat 1 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yaitu Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 2: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa:

Tabel 4. 9 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2022		Capain Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2022
		Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2022		Capain Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2022
			Target	Realisasi	
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		%	57	70,33	123,39%
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	84	90,64	107,90%
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	28	59,50	212,50%
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	59	60,86	103,16%
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa					
IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa		%	83	87,42	105,33%
	1. Persentase tender/seleksi tepat waktu	%	90	93,46	103,84%
	2. Persentase sanggah dan sanggah banding tidak benar	%	92	90,53	98,40
	3. Persentase pengaduan tidak benar	%	92	89,62	97,41%
	4. Persentase penetapan pemangan yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar	%	92	80,00	86,96%
	5. Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ	%	82	98,44	120,05%
	6. Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	%	50	72,47	144,94
Pelaksana: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi					
Output kegiatan:					
	1. Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan jasa konstruksi	NSPK	1	16	1600%
	2. Profil kinerja UKPBJ	Laporan	1	8	800%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2022		Capain Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2022
		Target	Realisasi	
dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ)				
3. Profil kinerja penyedia jasa konstruksi	Layanan	1	1	100%
4. Profil kepatuhan intern Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Laporan	1	3	300%
Pelaksana: Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi				
Output kegiatan:				
1. Layanan pelaksana pemilihan jasa konstruksi	Layanan	1	1	100%

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, 2022

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan sub indikator yang mendukung indikator kinerja kegiatan IKK 2: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 2 = \frac{\% IKK\ 2.1 + \% IKK\ 2.2 + \% IKK\ 2.3 + \% IKK\ 2.4 + \% IKK\ 2.5 + \% IKK\ 2.6}{6}$$

$$\% IKK\ 2.1 = \frac{\text{Total paket} - \text{Total paket tertambat}}{\text{Total paket}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.2 = \frac{\text{Total sanggah dan sanggah banding} - \text{Total sanggah dan sanggah banding benar}}{\text{Total sanggah dan sanggah banding}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.3 = \frac{\text{Total pengaduan} - \text{Total pengaduan benar}}{\text{Total pengaduan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.4 = \frac{\text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK} - \text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti benar}}{\text{Total penetapan pemenangnya yang ditolak PPK}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.5 = \frac{\text{Jumlah variabel yang dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan}^*}{\text{Total variabel yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan}^*} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.6 = \frac{\text{Realisasi data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR}}{\text{Jumlah BUJK yang berkontrak di PUPR}} \times 100\%$$

Keterangan:

IKK 2. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa

Sub Indikator:

IKK 2.1 Persentase tender/seleksi tepat waktu

IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar

IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar

IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar

IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ

IKK 2.6 Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Unit Kerja Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

$$IKK 2 = \frac{94,36\% + 90,53\% + 89,62\% + 80,00\% + 98,64\% + 72,47\%}{6} = 87,42\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 2: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa, yaitu:

Tabel 4. 10 Rincian Hasil Perhitungan Sub indikator yang Mendukung IKK 2

Sub Indikator	Nilai (%)
IKK 2.1 Persentase tender/seleksi tepat waktu	94,36
IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar	90,53
IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar	89,62
IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar	80,00
IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ	98,64
IKK 2.6 Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	72,47

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, 2022

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah **berhasil** dalam mencapai

target Sasaran Kegiatan “Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa” dengan capaian sebesar 87,42% terhadap targetnya sebesar 83%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor telah telaksananya 3.446 paket tender/seleksi selesai tepat waktu, terpenuhinya 63 variabel dari 64 variabel kematangan UKPBJ Kementerian PUPR dan terdapat 2.166 penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi melakukan analisis kinerja berdasarkan kegagalan pencapaian target, yaitu sebagai berikut:

- a. Kendala yang cukup vital yaitu adanya perubahan pada aturan pembayaran honorarium kelompok kerja, yaitu aturan untuk mengembalikan pembayaran honorarium kelompok kerja masing-masing Unit Organisasi pemilik paket, namun pada akhirnya kembali dibayarkan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Proses pemindahan ini berlangsung selama beberapa bulan sehingga menghambat progress realisasi keuangan di Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi;
- b. Pembayaran honorarium kelompok kerja pemilihan yang dipindahkan kembali ke Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi setelah sebelumnya dikembalikan ke masing-masing Unor pemilik paket mengharuskan adanya perhitungan Anggaran yang akurat terhadap honor yang harus dibayarkan. Namun karena adanya beberapa factor seperti keterlambatan penerbitan SPPBJ dan paket gagal tender membuat penyerapan menjadi jauh lebih rendah dari yang diharapkan;
- c. Terjadi perubahan organisasi yang mengakibatkan hilangnya tingkat eselon IV. Hal ini berpengaruh kepada berubahnya alur garis komando dalam unit kerja. Sehingga perlu adanya adaptasi kembali dengan adanya garis komando baru yang disebut “Ketua Tim” di masing-masing subdirektorat.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, sebagai koordinator dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan



Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa, memiliki capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi itu sendiri dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 Provinsi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Capaian Output Kegiatan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan BP2JK

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
Pelaksana: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi				
1	<p>Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi</p> <p><u>Dengan bentuk:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Pedoman Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak di Kementerian PUPR; 2. Bahan Kebijakan Usulan Penyesuaian Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR; 3. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Tim Penjamin Mutu; 4. Bahan Koordinasi dengan Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara tentang Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pembangunan Ibu Kota Negara; 5. Penerbitan Surat Keputusan Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi tentang Pembentukan Task Force Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Paket Pekerjaan yang didanai oleh Asian Development Bank (ADB); 6. Usulan Revisi Harmonisasi 	NSPK	1	20

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
	<p>Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan yang didanai oleh World Bank (WB);</p> <p>7. SOP Pengendalian Penyediaan Personel Manajerial dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;</p> <p>8. SOP Pengendalian Penyedia Peralatan Utama dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;</p> <p>9. SOP Penetapan Hasil Kualifikasi untuk Metode Prakuilifikasi;</p> <p>10. SOP Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan Penyusunan Dokumen Pemilihan;</p> <p>11. SOP Validasi Daftar Hitam dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;</p> <p>12. SOP Pendampingan pada Tahap Awal Evaluasi oleh Tim Peneliti untuk Tender Pekerjaan Konstruksi Pascakuilifikasi;</p> <p>13. SOP Pendampingan pada Tahap Akhir Evaluasi oleh Tim Peneliti untuk Tender Pekerjaan Konstruksi Pascakuilifikasi;</p> <p>14. SOP Evaluasi Penawaran Personel Manajerial oleh Pokja Pemilihan;</p> <p>15. SOP Evaluasi Penawaran Peralatan oleh Pokja Pemilihan;</p> <p>16. SOP Pola Kerja Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi oleh Pokja Pada Tender Pekerjaan Konstruksi;</p> <p>17. Buku Tata Cara Penayangan</p>			

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
	Produk pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR; 18. Buku Tata Cara E-Purchasing pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR; 19. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Clearing House Pengadaan di Kementerian PUPR; 20. Laporan Pemantauan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.			
2	Profil kinerja UKPBJ dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ) <u>Dengan bentuk:</u> 1. Laporan Pelaksanaan Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi pada BP2JK Regional Sumatera 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi pada BP2JK Regional Jawa dan Kalimantan 3. Laporan Pelaksanaan Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi pada BP2JK Regional Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua 4. Laporan Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian PUPR 5. Rekomendasi Penetapan Pemenang pada Paket Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 100M dan Paket Jasa Konsultansi diatas Rp 10 M	Laporan	1	8

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
	6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pemanfaat Aplikasi Bela Pengadaan untuk Penyedia Jasa 7. Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Barang Jasa 8. Laporan Penyusunan Profil UKPBJ dan UPTPBJ			
3	Profil kinerja penyedia jasa konstruksi <u>Dengan bentuk:</u> 1. Laporan Pengelolaan Pengolahan Data Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2022 2. Layanan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. 3. SE Menteri PUPR No. 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian PUPR dalam Pelaksanaan Pengadaan PBJ 4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian PUPR 5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Persyaratan Bagi Penyedia pada Katalog Elektronik Sektorial Kementerian PUPR 6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan FGD Penyusunan	Layanan	1	14

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
	<p>Panduan Pendaftaran dan Penayangan Produk pada Katalog Elektronik Sektor PUPR</p> <p>7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi SE Menteri PUPR No. 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektor Kementerian PUPR dalam Pelaksanaan Pengadaan PBJ</p> <p>8. Laporan Kegiatan Sosialisasi Pemberian Label Penyedia dan Produk pada Katalog Elektronik Sektor Kementerian PUPR</p> <p>9. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Informasi Pembaharuan Etalase Produk Bagi Pengelola Katalog Elektronik</p> <p>10. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Harmonisasi Perancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR</p> <p>11. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai ITKP Minimal Baik dan Evaluasi Pelaksanaan E-Purchasing TA 2022</p> <p>12. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Finalisasi Perubahan Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR dalam Rangka Pemenuhan ITKP Minimal Baik</p> <p>13. Laporan Penyusunan Profil Kinerja Penyedia Jasa</p> <p>14. Laporan Penyusunan Tata Cara Evaluasi Kinerja</p>			

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
	Penyedia Jasa			
4	Profil Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Bina Konstruksi <u>Dengan bentuk:</u> 1. Laporan Pelaksanaan Audit Internal Surveillance Penerapan ISO 37001:2016 SMAP 2. Laporan Pengelolaan Aduan di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Laporan Pelaksanaan Audit Internal Penerapan ISO 37001:2016 SMAP di Balai Pilot Project7	Laporan	1	3
<i>Pelaksana: Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi</i>				
1	Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	Layanan	1	1

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, 2022

3. SK 3: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK) yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 2 output kegiatan, yaitu: (1) Profil pengelolaan NSPK sistem manajemen keselamatan konstruksi dan (2) Profil penerapan NSPK sistem manajemen keselamatan konstruksi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 2: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK):

Tabel 4. 12 Capaian Kinerja SK Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2022		Capain Kinerja Program DJBK TA 2022
		Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
1 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	84	90,64	107,90%
2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	28	59,50	212,50%
3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	59	60,86	103,16%
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi				
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	97,1	97,1
Opuit Kegiatan:				
1. Profil pengelolaan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	NSPK	1	2	200%
2. Profil penerapan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Laporan	1	1	100%

Sumber: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, 2022

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

– Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi

$$IKK\ 3 = \frac{\text{Jumlah proyek strategis yang tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah proyek strategis}} \times 100\%$$

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Unit Kerja Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 3 = \frac{134}{138} \times 100\% = 97,1\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **belum berhasil** mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dengan capaian sebesar 97,1% terhadap targetnya sebesar 100%.

Kegagalan dalam pencapaian target Sasaran Kegiatan tersebut disebabkan oleh terjadinya kecelakaan konstruksi di tahun 2022. Berdasarkan data dari LAKIP TA 2022 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, dari total 138 Proyek Strategis Nasional Konstruksi, terdapat 4 Proyek Strategis Nasional Konstruksi yang mengalami kecelakaan konstruksi, yaitu: (1) Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi yang disebabkan karena runtuhnya galian tanah (23 maret 2022), (2) Overtopping Temporary Cofferdam Bendungan Meninting (17 Juni 2022), (3) Overtopping Temporary Cofferdam Bendungan Leuwikeris (12 September 2022), dan (4) Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung yang disebabkan oleh patah dan jatuhnya girder (24 November 2022).

Selain itu, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi juga memiliki target output kegiatan yaitu:

Tabel 4. 13 Capaian Output Kegiatan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
1	Profil pengelolaan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Terdiri dari: 1. Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum 2. Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi Permen PUPR No. 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan	NSPK	1	2
2	Profil penerapan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Dalam bentuk: 1. Profil Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Laporan	1	1

Sumber: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, 2022

4. SK 4: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi

Sasaran Kegiatan ini mendukung pemenuhan Sub IKP 1 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi dengan target sebesar 28%. Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dan 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang melayani seluruh provinsi di Indonesia. Capaian

kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 2 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah, yaitu: (1) Tenaga kerja konstruksi terbina dan (2) Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi. Selain itu, terdapat 6 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi yaitu (1) Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi, (2) Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi, (3) Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor, (4) Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, (5) Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan, dan (6) Layanan penyetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement*). Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 4: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi:

Tabel 4. 14 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2022		Capain Kinerja Program DJBK TA 2022
			Target	Realisasi	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
	IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		%	57	70,33	123,39%
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	84	90,64	107,90%
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	28	59,50	212,50%
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	59	60,86	103,16%
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi					
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		%	28	59,50	212,50%
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat		%	12	13,51	112,60%
Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah					
Output kegiatan:					
1. Tenaga kerja konstruksi terbina		Orang	95.000	27.853	29,32%
2. Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi		Laporan	7	7	100%
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi		%	44	105,49	239,74%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2022		Capain Kinerja Program DJBK TA 2022
		Target	Realisasi	
1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi	%	33	38,10	115,44%
2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi	%	25	22,54	90,28%
3. Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi	%	60	45,17	75,28%
4. Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi	%	60	316,12	526,86%
Pelaksana: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				
Output kegiatan:				
1. Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	1	1	100%
2. Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	30	55	183%
3. Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor	Layanan	1	1	100%
4. Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Lembaga	1	1	100%
5. Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan	Layanan	1	1	100%
6. Layanan penyetaraan kompetensi (Mutual Recognition Arrangement)	Layanan	1	1	100%

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, 2022

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 2 indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 4.1 Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan IKK 4.2 Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 4 = \frac{\% IKK\ 4.1 + \% IKK\ 4.2}{2}$$

$$\% IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat}}{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi (BPS)}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 4.2 = \frac{\% IKK\ 4.2.1 + \% IKK\ 4.2.2 + \% IKK\ 4.2.3 + \% IKK\ 4.2.4}{4} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.1 = \frac{\text{Jumlah SKKNI bidang konstruksi yang terbaru}}{\text{Jumlah kebutuhan SKKNI bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.2 = \frac{\text{Jumlah modul bidang konstruksi yang terbaru}}{\text{Jumlah kebutuhan modul bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.3 = \frac{\text{Jumlah asesor bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan asesor bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.4 = \frac{\text{Jumlah instruktur bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan instruksi bidang konstruksi}} \times 100\%$$

Keterangan:

IKK 4.1. Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

IKK 4.2. Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi

Sub Indikator:

IKK 4.2.1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

IKK 4.2.2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

IKK 4.2.3. Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

IKK 4.2.4. Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

a. IKK 4.1 Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

IKK 4.1 dengan target persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sebesar 12% di tahun 2022 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari jumlah sertifikat tenaga kerja konstruksi yang terbit pada tahun 2022, baik Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja, yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi melalui aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI). Hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 4.1 = \frac{598.223 + 283.786 + 89.907 + 58.317}{7.624.794} \times 100\% = 13,51\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, menunjukkan bahwa Balai Jasa Konstruksi Wilayah telah **berhasil** mendukung pemenuhan target indikator kinerja kegiatan tersebut. Berikut adalah detil capaian indikator kinerja kegiatan yang pertama, yaitu:

Tabel 4. 15 Detil Capaian IKK 4.1 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat

No	Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Sertifikat
1	Sertifikat Keahlian Kerja	35.154
2	Sertifikat Keterampilan Kerja	23.163
Total		58.317

Sumber: Sekretariat LPJK, 2022

Balai Jasa Konstruksi Wilayah selaku pelaksana kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Indonesia turut andil dalam pelaksanaan pemenuhan sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada tahun 2022 dengan hasil output kegiatan berupa Tenaga Kerja Konstruksi Terbina. Berdasarkan target Renstra, Balai Jasa Konstruksi Wilayah **belum berhasil** mencapai target. Penyebab utama ketidakmampuan tersebut karena adanya pandemic COVID-19 yang membuat metode pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi menjadi daring dan *hybrid* (kombinasi metode konvensional/tatap muka dengan daring). Selain itu, sebagian wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah tidak dapat melaksanakan kegiatan secara penuh karena kondisi di lapangan, seperti kebijakan daerah karena penetapan zona merah) dan kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan metode daring/*hybrid*. Serta pada semester II TA 2022 ini BJKW mendapatkan tugas tambahan terkait pelatihan tenaga kerja konstruksi program Ibu Kota Negara (IKN). Hal tersebut ditujukan untuk mendukung persiapan pembangunan IKN, sehingga SDM BJKW yang terbatas harus melaksanakan pelatihan baik itu vokasi, regular dan juga IKN.

Berikut adalah detail capaian output kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi yang dilakukan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah sesuai dengan target Renstra, yaitu:

Tabel 4. 16 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Renstra

NO	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (Orang)	REALISASI (Orang)
1	Tenaga kerja konstruksi terbina	95.000	27.853

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2022

Sedangkan jika dibandingkan dengan target di dalam Perjanjian Kinerja, Balai Jasa Konstruksi Wilayah **mencapai** target. Berikut adalah rincian capaian Balai Jasa Konstruksi Wilayah TA 2022 sesuai dengan target PK Revisi TA 2022:

Tabel 4. 17 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan PK

NO	SATUAN KERJA	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)
1	BJKW I ACEH	2.000	2.659
2	BJKW II PALEMBANG	3.300	4.590
3	BJKW III JAKARTA	2.100	1.899
4	BJKW IV SURABAYA	3.400	3.623
5	BJKW V BANJARMASIN	1.800	1.476
6	BJKW VI MAKASSAR	1.500	1.705
7	BJKW VII JAYAPURA	2.600	2.105
	TOTAL	16.700	18.057

Sumber: *dayanaker.binakonstruksi.pu.go.id* 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 ini tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapatkan tambahan Pagu Tagging IKN sebesar 38,76 Milyar terkait program pelatihan tenaga kerja konstruksi khusus pembangunan Ibu Kota Negara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 4 (empat) Balai Jasa Konstruksi Wilayah yaitu BJKW III Jakarta, BJKW IV Surabaya, BJKW V Banjarmasin, dan BJKW VI Makassar. Berikut rincian target dan realisasi pelatihan tenaga kerja konstruksi khusus IKN masing-masing Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja BJKW TA 2022 revisi:

Tabel 4. 18 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Khusus IKN Berdasarkan PK

NO	SATUAN KERJA	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)
1	BJKW III JAKARTA	800	1.428
2	BJKW IV SURABAYA	2.300	2.456
3	BJKW V BANJARMASIN	2.000	2.131
4	BJKW VI MAKASSAR	2.000	3.781
	TOTAL	7.100	9.796

Sumber: *dayanaker.binakonstruksi.pu.go.id* 2022

Terlihat dari tabel diatas bahwa Balai Jasa Konstruksi Wilayah **mencapai** target pembinaan tenaga kerja konstruksi khusus IKN dengan capaian orang sebesar 9.796 dari target 7.100 orang. Target pembinaan IKN ini masuk menjadi tambahan output capaian pembinaan tenaga

kerja konstruksi terbina dan mempengaruhi capaian kinerja renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada SK.4 yaitu Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi.

Selain itu, Balai Jasa Konstruksi Wilayah juga menghasilkan output kegiatan berupa Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 19 Capaian Output Kegiatan Laporan Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi

NO	SATUAN KERJA	LAPORAN FASILITASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	
		TARGET	REALISASI
1	BJKW I ACEH	1	1
2	BJKW II PALEMBANG	1	1
3	BJKW III JAKARTA	1	1
4	BJKW IV SURABAYA	1	1
5	BJKW V BANJARMASIN	1	1
6	BJKW VI MAKASSAR	1	1
7	BJKW VII JAYAPURA	1	1
	TOTAL	7	7

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2022

b. IKK 4.2 Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi

IKK 4.2 dengan target persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebesar 44% di tahun 2022 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 4 sub indikator yaitu: (1) Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi, (2) Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi, (3) Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi, dan (4) Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi. Hasil tersebut diambil dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Unit Kerja Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Hasil perhitungan

yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang kedua, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 4.2 = \frac{38,10\% + 22,57\% + 45,17\% + 316,12\%}{4} \times 100\% \\ = 105,49\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 4.2 Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, yaitu:

Tabel 4. 20 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 4.2 Persentase Tingkat Dukungan Pelatihan/Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Sub Indikator	Nilai (%)
IKK 4.2.1 Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi	38,10
IKK 4.2.2 Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi	22,57
IKK 4.2.3 Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi	45,17
IKK 4.2.4 Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi	316,12

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, 2022

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang kedua, persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, menunjukkan bahwa Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi telah **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor telah tersusunnya SKKNI baru, SKKNI terbaru bidang konstruksi, serta terpenuhinya jumlah instruktur bidang konstruksi. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Berikut adalah detail capaian output kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi yang dihasilkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, yaitu:

Tabel 4. 21 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

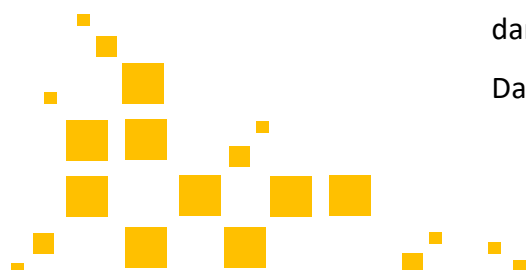
No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
1	Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	1	1
2	Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	30	55
3	Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor	Layanan	1	1
4	Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Lembaga	1	1
5	Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan <u>Dalam bentuk:</u> Pembinaan Pelaksanaan Program Link and Match terkait Implementasi Ahli Pengalaman/Keahlian Melalui Kerja Praktik/Pemagangan pada Pekerjaan Konstruksi	Layanan	1	1
6	Layanan penyetaraan kompetensi (<i>Mutual Recognition Arrangement</i>) <u>Dalam bentuk:</u> Penyetaraan Kompetensi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi (Insinyur dan Arsitek) di Tingkat ASEAN	Layanan	1	1

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, 2022

Beberapa produk yang dihasilkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi yang mendukung pencapaian IKK 2 yaitu:

- 1) Penyusunan 7 Bidang SKKNI dan SKK Khusus 18 Jabatan Kerja Tahun 2022 Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi juga telah menyelesaikan penyusunan 7 SKKNI Jabatan Kerja yaitu: Penyusunan SKKNI Bidang Building Information Modelling

BIM dengan 1 jabatan kerja yaitu BIM Coordinator, Penyusunan SKKNI Bidang Teknik Perpipaan dengan 6 Jabatan Kerja yaitu : Ahli Utama Teknik Perpipaan, Ahli Madya Teknik Perpipaan, Ahli Muda Teknik Perpipaan, Pengawas Pekerjaan Teknik Perpipaan, Pelaksana Pekerjaan Teknik Perpipaan, dan Operator Teknik Perpipaan, Penyusunan SKKNI Bidang Bangunan Hijau (Green Building) dengan 8 jabatan kerja yaitu : Petugas/Penyelenggara Bangunan Gedung Hijau (BGH), Ahli Bangunan Gedung Hijau Muda, Ahli Bangunan Gedung Hijau Madya, Ahli Bangunan Gedung Hijau Utama, Petugas Penilai Bangunan Hijau, Ahli Penilai Bangunan Hijau Muda, Ahli Penilai Bangunan Hijau Madya, dan Ahli Penilai Bangunan Hijau Utama, Penyusunan SKKNI Bidang Jembatan Bailey dengan 3 jabatan kerja yaitu : Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan Rangka Baja Panel Darurat, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan Rangka Baja Panel Darurat, dan Tukang Pasang/Perakit Jembatan Rangka Baja Panel Darurat, Penyusunan SKKNI Bidang Launching Girder dengan 1 jabatan kerja yaitu Launching Girder, Penyusunan SKKNI Bidang Teknik Sanitasi dan Limbah dengan 9 jabatan kerja yaitu : Ahli Utama Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman), Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman), Ahli Muda Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman), Ahli Madya Teknik Bangunan Air Limbah, Ahli Muda Teknik Bangunan Air Limbah, Ahli Madya Teknik Bangunan Sampah, Ahli Muda Teknik Bangunan Persampahan, Pelaksana Madya Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah, dan Pelaksana Muda Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah, Penyusunan SKKNI Bidang Bidang Grouting dengan 4 jabatan kerja yaitu : Ahli Madya Bidang Grouting, Ahli Muda Bidang Grouting, Pelaksana lapangan Pekerjaan Grouting, dan Operator Grouting, dan bekerja sama dengan KADIN (Kamar Dagang Indonesia) menyusun SKK Khusus 18 Jabatan kerja yaitu :



Pengawas Tukang Cat Bangunan, Mandor Konstruksi, Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung, Pelaksana Terowongan, Pelaksana Bendungan, Teknisi Pengerukan, Mekanik Tower Crane, Operator Bulldozer, Operator Motor Grader, Operator Wheel Loader, Operator Tower Crane, Operator Pemecah Batu, Operator Mesin Penghampar Beton Semen (Concrete Paver Operator), Operator Cold Milling Machine, Operator Batching Plant, Juru Hitung Kuantitas, Juru Gambar Arsitektur, dan Manajemen proyek.

2) Penyusunan Materi Pelatihan/Modul

Tahun 2022 Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi juga telah menyelesaikan penyusunan 5 Modul yaitu : Penyusunan Modul Bidang Building Information Modelling (BIM) dengan jabatan kerja BIM Coordinator, Penyusunan Modul Bidang Bidang Jembatan Bailey dengan jabatan kerja Jembatan Bailey, Penyusunan Modul Bidang Petugas Keselamatan Konstruksi dengan jabatan kerja Petugas Keselamatan Konstruksi, Penyusunan Modul Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan dengan jabatan kerja Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan, dan Penyusunan Modul Bidang Launching Girder dengan jabatan kerja Operator Launching Girder.

3) Pembinaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli secara berkesinambungan. Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa 'perpanjangan sertifikat kompetensi kerja untuk tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli harus memenuhi kecukupan persyaratan

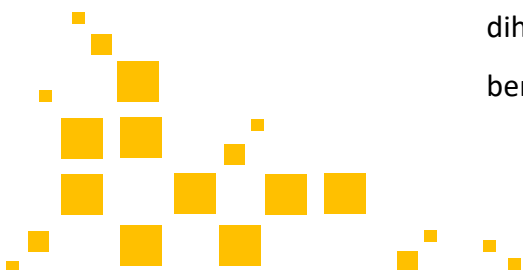


nilai kredit pada keprofesian berkelanjutan', yang berarti bahwa pemenuhan nilai kredit PKB menjadi salah satu persyaratan dalam perpanjangan sertifikat.

Pemenuhan nilai kredit PKB dibedakan untuk setiap jenjang, yakni 200 SKPK untuk tenaga ahli jenjang utama (jenjang 9), 150 SKPK untuk tenaga ahli jenjang madya (jenjang 8), dan 100 SKPK untuk tenaga ahli jenjang muda (jenjang 7). Sebelumnya Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 45 Tahun 2015 dan beberapa peraturan turunannya seperti Peraturan LPJKN Nomor 7 Tahun 2017, SE Menteri PUPR 8 Nomor 10 Tahun 2019, dan SE LPJKN Nomor 17 Tahun 2020. Dengan keluarnya PP nomor 14 Tahun 2021, dilakukan pembaharuan terkait ketentuan pelaksanaan PKB sehingga terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada tanggal 31 Maret 2021 yang menggantikan Peraturan Menteri PUPR Nomor 45 Tahun 2015.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi c.q. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selain memiliki tugas melakukan penyusunan norma, standar, pedoman, dan/atau kriteria pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan, juga memiliki tugas pemantauan dan evaluasi pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (Continuous Professional Development).

Profil Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang bermanfaat bagi setiap stakeholder yang terlibat pada



pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam rangka memelihara, meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional secara berkesinambungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang handal dan berdaya saing serta sebagai evaluasi penyusunan kebijakan pengembangan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Profil Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tahun 2022 adalah memberikan gambaran atau portrait pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, yang terdiri dari:

- a. Kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- b. Sistem Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- c. Kondisi eksisting tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli;
- d. Penyelenggaraan kegiatan PKB oleh Penyelenggara PKB;
- e. Portrait pemenuhan nilai kredit tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli; dan
- f. Isu strategis pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Profil Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tahun 2022 sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pembinaan tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan



Produk Profil Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan tahun 2022

4) Penyetaraan Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi (Insinyur dan Arsitek) Indonesia

Pelaksanaan tugas kesekretariatan Indonesia Monitoring Committee (IMC) on Engineering and Architectural Services berdasarkan kepada Keputusan Menteri PUPR Nomor 976 dan 977/KPTS/M/2019, sehingga Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi turut bertanggung jawab dalam implementasi ASEAN MRA on Engineering and Architectural Services meliputi :

- a. Layanan registrasi ACPE (ASEAN Chartered Professional Engineer) dan AA (ASEAN Architect) di Indonesia; dan

b. Fasilitas pengujian Indonesia Monitoring Committee (IMC).

Negara ASEAN	Keinsinyuran (ACPEs)		Arsitektur (AAs)		Akuntansi (ACPAs)		Surveying
	Cumulative	Active	Cumulative	Active	Cumulative	Active	
Brunei Darussalam	32	32	19	18	8	7	-
Cambodia	102	98	31	29		-	-
Indonesia	1.411	1397	185	178	2,220	2,220	-
Lao PDR	17	17	22	20	-	-	-
Malaysia	2.259	2249	49	49	1,550	1,550	-
Myanmar	625	613	16	16	477	477	-
Philippines	769	769	143	132	138	138	-
Singapore	323	323	132	107	1,054	1,043	-
Thailand	234	234	29	29	753	707	-
Viet Nam	322	322	41	41	150	150	-
Jumlah	6094	6054	667	619	6,350	6,292	-
Penambahan	670	670	11	-	492	492	-

Data Registrasi ACPE dan AA pada periode tahun 2022

Hasil dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan layanan registrasi ACPE dan AA periode Januari - Desember 2022. Sebanyak 242 Insinyur Profesional Indonesia sebagai ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE), sehingga secara kumulatif jumlah ACPE Indonesia meningkat menjadi 1.411 orang (23%) dari keseluruhan 6.094 ACPE se-ASEAN. Kegiatan ini mendukung output Layanan penyetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement*)



*Laporan pelaksanaan tugas Indonesia Monitoring Committee (IMC) On
Engineering Services periode 2019-2022
(Mutual Recognition Arrangement)*

- 5) Pendampingan pelaksanaan link and match antara dunia Pendidikan dan industri konstruksi
- Hasil dari kegiatan ini adalah 1 profil Profil Link and Match Terkait Pelaksanaan Kerja Praktik/Magang pada Mahasiswa PerguruanTinggi/Politeknik Bidang Konstruksi



Produk profil pelaksanaan LNM (Link and Match) terkait pelaksanaan Kerja Praktik/Magang pada Mahasiswa Perguruan Tinggi/Politeknik Bidang Konstruksi tahun 2022

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait kondisi eksisting pelaksanaan Kerja Praktik/Magang di lapangan sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan terkait Kerja Praktik/Magang dalam rangka pelaksanaan program link and match. Buku Profil ini terdiri dari pendahuluan, kebijakan

pelaksanaan Kerja Praktik/Magang, sasaran dan instrumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kondisi eksisting dan analisis pelaksanaan Kerja Praktik/Magang pada mahasiswa perguruan tinggi/politeknik bidang konstruksi, dan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

6) Penyusunan Profil Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing

Profil yang ditampilkan pada buku ini merupakan hasil analisis data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing sektor Konstruksi, baik Kementerian Ketagakerjaan.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di sektor konstruksi ini merupakan hal yang strategis sekaligus sensitif, karena selain berkaitan dengan pelaksanaan pembangun infrastruktur yang mendatangkan investasi luar negeri yang cukup besar, juga berkaitan dengan keterlibatan hukum internasional dalam hubungan komitmen perjanjian antar Negara. Oleh karena itu penggunaan data Tenaga Kerja Asing ini perlu mengedepankan validitas dan berasal dari sumber terpercaya

Data penggunaan TKA pada pekerjaan konstruksi PUPR selama 2021-2022 sebanyak 285 orang dengan rincian :

1. Cipta Karya : 53 Tenaga kerja konstruksi asing
2. Sumber Daya Air : 155 Tenaga kerja konstruksi asing
3. Bina Marga: 77 Tenaga kerja konstruksi asing
4. Perumahan : 0 Tenaga kerja konstruksi asing



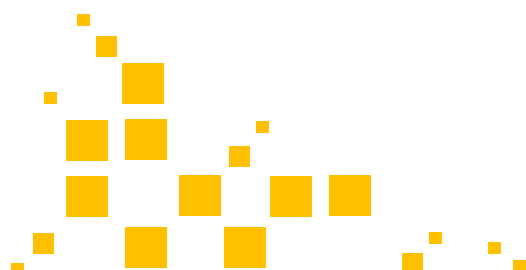
Produk profil penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing Tahun 2022

Hasil dari 2 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah **berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi dengan capaian sebesar 59,50% terhadap targetnya sebesar 28%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor elah telaksananya target

jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikat sejumlah 1.030.233 orang dari jumlah TKK 7.624.794 orang, tersusunnya SKKNI baru, SKKNI terbaru bidang konstruksi, serta terpenuhinya jumlah asesor dan instruktur bidang konstruksi, serta sinergi berbagai pihak baik internal dan eksternal guna mendukung kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi.

5. SK 5: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi

Sasaran Kegiatan ini mendukung pemenuhan Sub IKP 1 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi dengan target sebesar 59%. Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dan didukung dengan beberapa output kegiatan, yaitu: (1) IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi, yang didukung oleh 3 output kegiatan berupa Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi, Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi, dan Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, (2) IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang didukung oleh output kegiatan berupa SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi, dan (3) IKK 5.3 Persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN yang didukung oleh output kegiatan berupa Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN dan Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 5: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi:



Tabel 4. 22 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pembinaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2022		Capain Kinerja Program DJBK TA 2022
			Target	Realisasi	
SS: Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
	IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
	IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	57	70,33	123,39%
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	84	90,64	107,90%
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	28	59,50	212,50%
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	59	60,86	103,16%
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi					
	SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	%	59	60,86	103,16%
	IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	28	23,74	84,79%
	1. Persentase OPD terbentuk dan operasional	%	75	74,82	99,76%
	2. Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi	%	31	33,56	108,26%
	3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	%	60	20,78	34,63%
	4. Persentase kinerja	%	57	60,77	106,61%

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2022		Capain Kinerja Program DJBK TA 2022
		Target	Realisasi	
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)				
Output kegiatan:				
1. Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi	NSPK	1	5	400%
2. Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi	Laporan	1	1	100%
3. Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi	Lembaga	2	11	550%
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	30	53,48	178,28%
Output kegiatan:				
1. SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi	Orang	100	495	495%
IKK: Persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	%	95	95	100%
Output kegiatan:				
1. Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, tetknologi, dan TKDN	NSPK	1	8	100%
2. Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	Layanan	1	5	100%

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2022

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 3 indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi, IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi, dan IKK 5.3 Persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 5 = \% IKK\ 5.1 + e.\% IKK\ 5.2 + f.\% IKK\ 5.3$$

$$\% IKK\ 5.1 = a.\% IKK\ 5.1.1 + b.\% IKK\ 5.1.2 + c.\% IKK\ 5.1.3 + d.\% IKK\ 5.1.4$$

$$\% IKK\ 5.1.1 = \frac{\text{Jumlah OPD terbentuk dan operasional}}{\text{Jumlah OPD di tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.1.2 = \frac{\text{Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi di Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.1.3 = \frac{\text{Jumlah Penyedia Jasa yang berkinerja baik}}{\text{Jumlah Penyedia Jasa di tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.1.4 = \frac{\text{Persentase asosiasi yang terakreditasi} + \text{Persentase BUJK dan TKK terintegrasi} + \text{Persentase Penyetaraan BUJK dan TKA} + \text{Persentase LSP dan LSBU Terlisensi}}{4} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.2 = \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi}}{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang terdata di tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.3 = \frac{\text{realisasi data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN}}{\text{target data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN yang harus tersedia}} \times 100\%$$

Bobot:

a = b = c = d = 12,5%

e = 25%

f = 25%

Keterangan:

IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi

IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.3 Persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN

Sub Indikator:

IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional

IKK 5.1.2. Persentase asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi

IKK 5.1.3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI

IKK 5.1.4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

a. IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi

IKK 5.1 dengan target tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi sebesar 28% di tahun 2022 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 4 sub indikator yaitu: (1) Persentase OPD terbentuk dan operasional, (2) Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi, (3) Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI, dan (4) Persentase

kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Hasil tersebut diambil dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Unit Kerja Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK 5.1 = a. 63,69\% + b. 31\% + c. 0\% + d. 72,33\%$$

$$a + b + c + d = 12,5\%$$

$$\begin{aligned} IKK 5.1 &= 12,5\% \times (74,82\% + 33,56\% + 20,78\% + 60,77\%) \\ &= 23,74\% \end{aligned}$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi, yaitu:

Tabel 4. 23 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 5.1 Tingkat Kinerja Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Bidang Konstruksi

Sub Indikator	Nilai (%)
IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional	74,82
IKK 5.1.2 Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi	33,56
IKK 5.1.3 Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	20,78
IKK 5.1.4 Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	60,77

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2022

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang pertama menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi **belum berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih perlunya sosialisasi tentang kewenangan jasa konstruksi di daerah dan dukungan legalisasi NSPK pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah

yang baru terbit di akhir tahun 2022 serta kondisi dimana LSBU baru beroperasi di awal tahun 2022 dan banyak BUJK yang masih memiliki SBU KBLI 2017 yang masih berlaku sehingga sub indikator kegiatan persentase kesesuaian layanan BUJK berdasarkan KBLI belum dapat mencapai target. Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.1, yaitu:

Tabel 4. 24 Capaian Output Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
1	Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi	NSPK	1	5
2	Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi	Laporan	1	1
3	Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi	Lembaga	2	11

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2022

b. IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.2 dengan target persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebesar 30% di tahun 2022 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Unit Kerja Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 5.2 = \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi}}{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang terdata di tahun berjalan}} = 53,48\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang kedua menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor meningkatnya peran pejabat fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebanyak 495 orang. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Berikut adalah detail capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.2, yaitu:

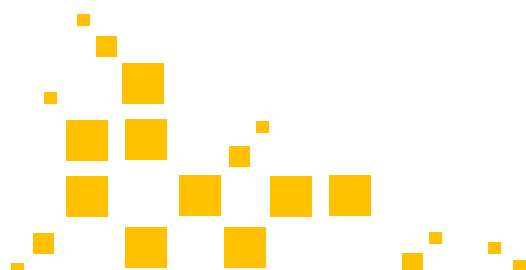
Tabel 4. 25 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.2

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
1	SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi	Orang	100	495

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2022

- c. IKK 5.3 Persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN

IKK 5.3 dengan target persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN sebesar 95% di tahun 2022 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Unit Kerja Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga, adalah sebagai berikut:



$$IKK 5.3 = \frac{\text{Realisasi data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN}}{\text{Target data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN yang harus tersedia}} = 95\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor telah tersusunnya 8 NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN, serta telah terselenggaranya layanan terkait data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN di DJBK. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.3, yaitu:

Tabel 4. 26 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.3

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
1	Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN	NSPK	1	8
2	Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	Layanan	1	5

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2022

Hasil dari 3 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah **berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi dengan capaian sebesar 60,86% terhadap targetnya sebesar 59%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor telah tercapainya target tingkat pencapaian Peran Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, tersusunnya 8 NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN, serta ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN.

Selanjutnya, persentase IKK.1 hingga IKK.5 tersebut digunakan sebagai masukan ke dalam perhitungan **IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi** pada Sasaran Program Meningkatkan Dukungan manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dengan rincian rumus perhitungan indikator kinerja program sebagai berikut:

IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi

$$IKP 1 = \frac{\% IKP 1.1 + \% IKP 1.2 + \% IKP 1.3}{3}$$

$$IKP 1 = \frac{90,64\% + 59,50\% + 60,86\%}{3} = 70,33\%$$

Dengan rincian perhitungan subindikator kinerja program sebagai berikut:

$$IKP 1.1 = \frac{\% IKK 1 + \% IKK 2 + \% IKK 3}{3}$$

$$IKP 1.1 = \frac{87,39\% + 87,42\% + 97,1\%}{3} = 90,64\%$$

$$IKP 1.2 = \% IKK 4 = 59,50\%$$

$$IKP 1.3 = \% IKK 5 = 60,86\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, **Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berhasil mencapai target Sasaran Program Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dalam Program Dukungan Manajemen, dengan Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi yang mencapai 70,33% dari targetnya sebesar 57 %**. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor terlaksananya pengelolaan dan penerapan 98 NSPK terkait tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dukungan rantai pasok konstruksi, dan kinerja kelembagaan. Selain itu faktor pendukung lain adalah dengan tersusunnya SKKNI bidang konstruksi, sinergitas berbagai pihak internal dan eksternal dalam rangka pembinaan sumber daya konstruksi, serta efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring. **Capaian tersebut digunakan sebagai masukan dalam pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi dengan capaian sebesar 70,33% dari targetnya sebesar 57%.**

Selanjutnya, berikut penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di setiap Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Dukungan Manajemen pada IKP 2 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR, yaitu:

1. SK 6: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dan didukung dengan beberapa output kegiatan, yaitu: (1) IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang didukung oleh 4 output kegiatan berupa Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Layanan Sarana Prasarana Internal, Layanan Dukungan Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran, dan (2) IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi yang didukung oleh output kegiatan berupa Layanan data dan informasi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 6: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya:

Tabel 4. 27 Capaian Kinerja SK Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2022		Capain Kinerja Program DJBK TA 2022
		Target	Realisasi	
SS: Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	77,97	80,66	103,45
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	71,54	87,55	122,38

Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	102,36	102,36%
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100%
Output kegiatan:				
1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	100%
2. Layanan Sarana Prasarana Internal	Layanan	1	1	100%
3. Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100%
4. Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100%
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	84	87,96	104,71%
1. Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	%	50	72,47	144,94%
2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi	%	95	95	100%
3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi	%	100	100	100%
4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi	%	75	74,82	99,76%
5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	%	100	97,5	97,50%
Output kegiatan:				
1. Layanan data dan informasi	Layanan	1	1	100%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2022

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 2 indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 6.1 = \frac{\% \text{ layanan perencanaan, program, dan keuangan} + \% \text{ layanan administrasi kepegawaian dan umum} + \% \text{ layanan hukum informasi jasa konstruksi, dan komunikasi publik}}{3}$$

% layanan = Survei persepsi kepada internal organisasi untuk mengetahui tingkat layanan

$$IKK\ 6.2 = \frac{\% IKK\ 6.2.1 + \% IKK\ 6.2.2 + \% IKK\ 6.2.3 + \% IKK\ 6.2.4 + \% IKK\ 6.2.5}{5}$$

$$\% IKK\ 6.2.1 = \frac{\text{realisasi informasi kinerja penyedia jasa konstruksi}}{\text{target informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 6.2.2 = \frac{\text{realisasi informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang tersedia}}{\text{target informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 6.2.3 = \frac{\text{realisasi informasi penyelenggaraan jasa konstruksi}}{\text{target informasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 6.2.4 = \frac{\text{realisasi informasi pembinaan jasa konstruksi}}{\text{target informasi pembinaan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

% IKK 6.2.5 = Survei persepsi kepada stakeholder yang menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi

Keterangan:

IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

IKK 6.2. Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

Sub Indikator:

IKK 6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi

IKK 6.2.2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) jasa konstruksi

IKK 6.2.3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi

IKK 6.2.4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

IKK 6.2.5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi

a. IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

IKK 6.1 dengan target tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 100% di tahun 2022

dicapai melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 6.1 = \frac{100\% + 100\% + 100\%}{3} = 100\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang pertama menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor terselenggaranya layanan dukungan manajemen Eselon I. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Perhitungan capaian IKK menghitung jumlah konfirmasi pelayanan dari 4 layanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Persentase dari masing masing layanan yang diselenggarakan didapat dari kegiatan Survei Persepsi kepada internal organisasi yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Berikut adalah detail capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.1, yaitu:

Tabel 4. 28 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1
2	Layanan Sarana Prasarana	Layanan	1	1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
	Internal			
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2022

b. IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

IKK 6.1 dengan target tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi sebesar 75% di tahun 2022 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 5 sub indikator yaitu: (1) Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR, (2) Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi, (3) Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi, (4) Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi, dan (5) Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Hasil tersebut diambil dari laporan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang kedua, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 6.2 = \frac{72,47\% + 95\% + 100\% + 74,82\% + 97,5\%}{5} = 87,96\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi, yaitu:

Tabel 4. 29 Hasil Perhitungan Sub Indikator IKK 6.2 Tingkat Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi

Sub Indikator	Nilai (%)
6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	72,47
6.2.2 Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi	95

Sub Indikator	Nilai (%)
6.2.3 Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi	100
6.2.4 Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi	74,82
6.2.5 Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	97,5

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2022

Penjelasan dari hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 6.2 yaitu:

- 1) Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR

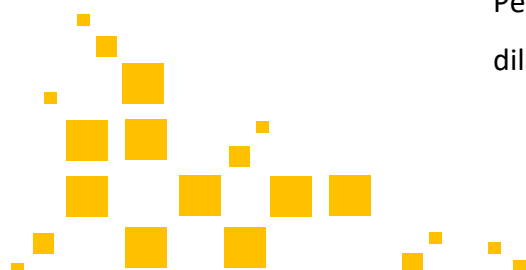
Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari capaian sub indikator Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR pada IKK Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dengan nomenklatur sub indikator yang sama, target yang sama, dan capaian yang sama.

- 2) Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi

Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari capaian IKK Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dengan nomenklatur sub indikator yang sama, target yang sama, dan capaian yang sama.

- 3) Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi

Capaian sub indikator kinerja dibuktikan melalui tersedianya informasi capaian IKK Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi dan informasi capaian IKK Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi pada



halaman web Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan alamat web: <http://binakonstruksi.pu.go.id/>.

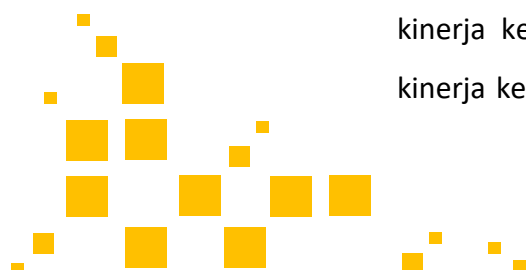
4) Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari sub indikator Persentase OPD terbentuk dan operasional pada IKK Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dengan target yang sama dan capaian yang sama.

5) Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi

Capaian sub indikator kinerja ini dibuktikan melalui hasil Survey Persepsi Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi yang diwakili oleh Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengalaman (SIMPAN). Survey ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemudahan aksesibilitas Aplikasi SIMPAN yang digunakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Tenaga Ahli Konstruksi dalam melakukan pendataan pengalaman kerjanya di bidang konstruksi. Hasil dari survey tersebut menandakan bahwa aplikasi SIMPAN telah berhasil bekerja dan memberikan kemudahan kepada BUJK dan Tenaga Ahli Konstruksi untuk melakukan input data pengalaman dengan nilai tingkat kemudahan aksesibilitas sebesar 97,5%.

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang kedua menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak, ketersediaan informasi rantai pasok, penyelenggaraan jasa konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, serta tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua berasal dari penjumlahan sub indikator kinerja kegiatan yang telah disampaikan pada rumus sebelumnya serta



didukung oleh capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Berikut adalah detail capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.2, yaitu:

Tabel 4. 30 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.2

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2022	Capaian 2022
1	Layanan data dan informasi	Layanan	1	1

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2022

Hasil dari 2 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah berhasil dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan capaian sebesar 102,36% terhadap targetnya sebesar 100%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor tersedianya informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak, tercapainya tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I, ketersediaan informasi rantai pasok, penyelenggaraan jasa konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, serta terlaksananya layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.

C. Capaian Kinerja terhadap Dokumen Perencanaan Pemerintah Lainnya

Maksud dari Rencana Pemerintah Lainnya adalah Dokumen Perencanaan dengan skala nasional yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan hierarkinya, Rencana Strategis Kementerian PUPR akan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Perpres

Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022 yang sudah dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya tidak tercantum pada target RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2022 capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun ini tidak dapat disandingkan dengan dokumen perencanaan pemerintah lainnya.

D. Penghargaan

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapat penghargaan sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yang baik, yaitu sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapatkan penghargaan Unit Organisasi Terbaik II Transformasi Digital Kementerian PUPR Tahun 2022 Pada Peringatan Hari Bakti PUPR ke-77;
2. Pegawai Muda Teladan, a.n. Dimas Bayu Susanto, ST, MPSDA (Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi);
3. Juara 2 Lomba Cerdas Cermat dalam rangka Hari Bakti PUPR ke-77;
4. Beberapa satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah berhasil mendapatkan sertifikasi SMAP pada tahun 2022 dari Lembaga Mutu Internasional yaitu:
 - a. BP2JK Wilayah Aceh;
 - b. BP2JK Wilayah Riau;
 - c. BP2JK Wilayah Kepulauan Riau;
 - d. BP2JK Wilayah Jambi;
 - e. BP2JK Wilayah Banten;
 - f. BP2JK Wilayah Kalimantan Timur;
 - g. BP2JK Wilayah Sulawesi Tengah;
 - h. BP2JK Wilayah Sulawesi Utara;
 - i. BP2JK Wilayah Papua;
 - j. BJKW I Banda Aceh;
 - k. BJKW II Palembang;
 - l. BJKW III Jakarta;
 - m. BJKW IV Surabaya;
 - n. BJKW VI Makassar.

4.2 PERBANDINGAN KINERJA

Secara umum, capaian sasaran strategis Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Professional tahun 2022 sebesar 11,32% naik 10,30% dari tahun sebelumnya sebesar 10,26%. Sedangkan capaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dari indikator Tingkat keandalan sumber daya konstruksi sebesar 70,33% naik 17,65% dari tahun sebelumnya sebesar 59,78%.

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 Sasaran Program sesuai dengan program yang telah dijelaskan pada LAKIP TA 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yaitu: (1) Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional; dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan target yang merupakan kompilasi dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Sasaran Program yang pertama dihitung dengan indikator kinerja program yaitu Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan target 75% (Capaian 100% sehingga kinerja 133,33%). Sedangkan, Sasaran Program yang kedua dihitung melalui 2 indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengan target 51% (Capaian 59,78% sehingga kinerja 117,91%); dan Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dengan target 63,35% (Capaian 76,64% sehingga kinerja 120,98%).

Secara detail, Capaian kinerja Sasaran Program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022 dibandingkan dengan capaian TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Tabel 4. 31 Capaian Sasaran Program DJBK TA 2022 terhadap TA 2021

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2022 terhadap TA 2021
		2021	2022	
SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	10,26	11,32	10,30
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2022 terhadap TA 2021
		2021	2022	
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional				
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	100	100	0
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi				
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina				
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	%	136,81	122,35	-10,57%
Koordinator: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				
Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah				
Output Kegiatan:				
1. SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Orang	41.043	45.268	10,29%

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

B. Program: Dukungan Manajemen

Tabel 4. 32 Capaian Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen DJBK TA 2022 terhadap TA 2021

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2022 terhadap TA 2021
		2021	2022	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	59,78	70,33	17,65
1 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	59,78	70,33	17,65
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	59,78	70,33	17,65
1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	91,74	90,64	-1,20
2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	30,19	59,50	97,08
3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	57,41	60,86	6,01
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi				
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	89,30	87,39	-2,14
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi				

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2022 terhadap TA 2021
		2021	2022	
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa				
IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	%	87,23	87,42	0,22
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi				
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	98,70	97,1	-1,62
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi				
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	%	30,19	59,50	97,08
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	12,75	13,51	5,97
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	47,64	105,49	121,43
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi				
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	%	57,41	60,86	6,01
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	20,88	23,74	13,70
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	53,61	53,48	-0,23
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	%	92,5	95	2,70
SS: Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	77,93	80,66	3,50
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	76,64	87,55	14,24
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	103,82	102,36	-1,41
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas	%	100	100	0

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2022 terhadap TA 2021
		2021	2022	
teknis lainnya				
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	80,73	87,96	8,95

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

C. Perbandingan Capaian Sasaran Program (Renstra 2020-2022)

Tabel 4.33 Perbandingan Capaian Sasaran Program (Renstra 2020-2022)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN (%)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PROGRAM: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI											
	SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,3	5,6	6,0	8,56	10,26	11,32	163,03	182,41	188,62
	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,3	5,6	6,0	8,56	10,26	11,32	163,03	182,41	188,62
	SASARAN PROGRAM: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional	%	70	75	80	73	100	100	104,72	133,33	125,00
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	70	75	80	73	100	100	104,72	133,33	125,00
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN											
	SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR										
	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	43	51	57	47,25	59,78	70,33	108,96	117,91	123,39
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	43	51	57	47,25	59,78	70,33	108,96	117,91	123,39
	SASARAN PROGRAM: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya										
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	43	51	57	47,25	59,78	70,33	108,96	117,91	123,39
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	80	84	85,09	91,74	90,64	111,80	114,76	107,90
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	14	21	28	20,28	30,19	59,50	140,50	142,19	212,50
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	40	51	59	36,36	57,41	60,86	91,96	112,74	103,16
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	56	63	72	67,98	63,35	87,55	121,57	100,00	122,38

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

D. Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan (Renstra 2020-2022)

Tabel 4.34 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan (Renstra 2020-2022)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN (%)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI											
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		%	81	81	81	126	111	122	155,67	136,81	150,89
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		%	81	81	81	126	111	122	155,67	136,81	150,89
KEGIATAN: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI											
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi		%	60	65	70	87,06	89,3	87,39	145,10	137,38	124,84
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi		%	60	65	70	87,06	89,3	87,39	145,10	137,38	124,84
KEGIATAN: PEMBINAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI											
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa		%	68	75	83	72,02	87,23	87,42	105,40	116,56	105,33
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa		%	68	75	83	72,02	87,23	87,42	105,40	116,56	105,33
KEGIATAN: PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI											
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)		%	100	100	100	96,20	98,70	97,10	96,20	98,70	97,10
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi		%	100	100	100	96,20	98,70	97,10	96,20	98,70	97,10
KEGIATAN: PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI											
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		%	14	21	28	20,28	30,19	59,50	140,50	142,19	212,50
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat		%	9	10	12	11,57	12,75	13,51	127,23	123,30	112,60
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi		%	20	32	44	29,00	47,64	105,49	146,59	148,27	239,74
KEGIATAN: PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN MATERIAL, PERALATAN, DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI											
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi		%	40	51	59	36,36	57,41	60,86	91,96	112,74	103,16
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi		%	16	23	28	10,89	20,88	23,74	68,97	89,16	84,79
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi		%	10	20	30	15,89	53,61	53,484	158,90	268,05	178,28
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR		%	56	63	72	67,98	63,35	87,55	121,57	100,00	122,38
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1, INFORMASI JASA KONSTRUKSI, DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA											
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		%	100	100	100	97,61	103,82	102,36	97,61	103,82	102,36
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		%	100	100	100	94,00	100,00	100,00	94,00	100,00	100,00
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi		%	68	75	84	68,83	80,73	87,96	101,23	107,64	104,71

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

E. Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP TA 2021

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mendukung dan memperbaiki hasil dari Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2021 serta dalam rangka perbaikan pencapaian kinerja TA 2022, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

a. Sub komponen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT)

i. Telah dilaksanakan tindak lanjut mengatasi kelemahan atas rencana aksi melalui beberapa hal sebagai berikut :

1. Telah disampaikan Rencana Aksi awal dan Rencana Aksi Revisi melalui google drive DJBK. Revisi rencana aksi disampaikan terkait adanya perubahan perjanjian kinerja karena adanya refocusing;
2. Dalam Bab II Penetapan Kinerja di Bagian Indikator Kinerja Kegiatan dijelaskan target kinerja yang akan dicapai TA 2021.

ii. Terkait reward dan punishment diatur dalam Peraturan Menteri Saat ini, DJBK masih menunggu arahan kementerian;

iii. Deviasi pada laporan bulanan sebelumnya telah disampaikan pada laporan bulan selanjutnya;

iv. Pemanfaatan rencana aksi dimanfaatkan untuk evaluasi progress satuan kerja (surat dan notulen terlampir dalam google drive DJBK).

2. Pengukuran Kinerja

a. Sub komponen Implementasi Pengukuran

i. Terkait *reward* dan *punishment*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menyusun SE Dirjen Bina Konstruksi No 215 tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Individu Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi;

ii. Telah ada penjelasan deviasi atas realiasi anggaran yang tidak memenuhi dan tindak lanjutnya. Terkait capaian outcome dilakukan penilaian akhir tahun anggaran pada Laporan Kinerja. Selain itu, terkait pemantauan target kinerja yang ditetapkan dilaksanakan

dengan rapat evaluasi (surat undangan dan notulen terlampir dalam *googledrive* DJBK).

3. Pelaporan Kinerja

a. Sub komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja

- i. Perbaikan perencanaan renstra saat ini belum dilaksanakan karena akan dikoordinasikan tingkat kementerian yaitu BPIW;
- ii. Pada laporan kinerja TA 2021 disampaikan tindak lanjut yang dilakukan atas Laporan Kinerja tahun sebelumnya.

4. Evaluasi Internal

a. Sub komponen Pemenuhan Evaluasi

- i. Telah disampaikan melalui laporan B1 sd B12 deviasi yang terjadi pada bulan sebelumnya dan Langkah-langkah tindak lanjutnya;
- ii. Pada tanggal 17 Februari 2022 dan 21 Februari 2022 telah dilakukan rapat *peer review* atas LKE dan Draft BA masing masing satuan kerja. Saat ini sedang dalam tahap koordinasi ke evaluatan atas draft BA sebanyak 28 satker dan 20 satker sedang tahap penyelesaian LKE dan draft BA.

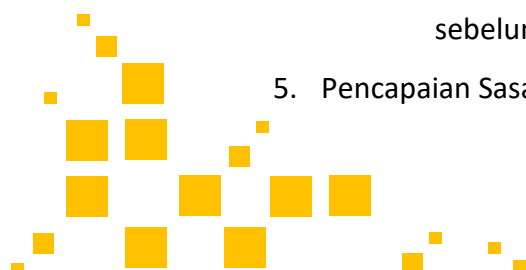
b. Sub komponen Kualitas Evaluasi

- i. Telah dilaksanakan kegiatan supervisi proses evaluasi LAKIP dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip, Evaluasi Esakip Dan Rapat Peer Review;
- ii. Telah kami sampaikan dokumentasi tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi SAKIP di lingkungan DJBK dalam *googledrive* DJBK folder TL unit Kerja;
- iii. Telah kami sampaikan dalam laporan bulanan deviasi realisasi anggaran dan alternatif perbaikan atau tindak lanjutnya.

c. Sub komponen Pemanfaatan Evaluasi

- i. Telah ada 25 satker yang melampirkan dokumen tindaklanjut dan diupload tindak lanjut unit kerja pada *googledrive* DJBK;
- ii. Ada pembahasan tindak lanjut dari deviasi realisasi pada bulan sebelumnya di laporan bulanan B2 sd B 12;

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Kinerja



- a. Sub komponen Kinerja yang dilaporkan (*Outcome*)
 - i. Telah dilaksanakan beberapa hal dalam perhitungan capaian *outcome* pada Laporan Kinerja TA 2021 yaitu:
 1. Pada Laporan Kinerja di jelaskan rumus perhitungan capaian *outcome*;
 2. Capaian *outcome* saat ini dihitung pada akhir tahun anggaran. Prosesnya pencapaiannya dalam 1 tahun.

F. Tindak Lanjut Rekomendasi LAKIP TA 2021

Pada LAKIP TA 2021, terdapat beberapa permasalahan dan rekomendasi. Sebagai bukti dan upaya perbaikan pencapaian kinerja TA 2022, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengidentifikasi potensi dan kendala mitra kerja pemberdayaan jasa konstruksi dalam hal pemenuhan dokumen dan penilaian pemantuan dan evaluasi Satuan Kerja, DJBK telah melakukan survey terkait kepuasan layanan sistem informasi di DJBK dengan target responden mitra kerja eksternal DJBK yaitu para pengguna aplikasi Simpan, Sibima, dan Si-MPK. Hasil dari survey tersebut tercantum dalam Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022;
2. Selama TA 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menyusun beberapa pedoman teknis yang diharapkan dapat mengatasi perbedaan pemahaman yang dialami oleh mitra jasa konstruksi dalam berbagai topik yang membutuhkan pembelajaran lebih lanjut, diantaranya:
 - a. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - b. Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - c. SE LPJK Nomor 041 Tahun 2022;
 - d. SE DJBK Nomor : 131/SE/DK/2022 tentang Pedoman tata cara mengajukan permohonan pengembangan untuk kegiatan utama Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;

- e. Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi.
3. Bahan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi telah disusun pada TA 2022. Bahan kebijakan ini berupa SOP dan Surat Edaran Menteri/Dirjen;
 4. Selama Tahun 2022, Bagian Hukum dan Informasi Jasa Konstruksi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan pendampingan penanganan perkara bersama dengan Bagian Advokasi, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan masih dapat tertangani dengan baik. Pendampingan penyelesaian perkara pada badan peradilan Indonesia untuk tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar perkara terkait sektor Jasa Konstruksi bermula dari proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK). Berikut rekapitulasi pendampingan penyelesaian perkara Tahun 2022:

Tabel 4. 35 Gugatan Bidang PBJ pada Pengadilan dibawah Lingkup MA Tahun 2022

Pengadilan	Putusan		Proses	Total
	Menang	Kalah		
Pengadilan Negeri/PN	1	0	2	3
PTUN	2	0	3	5
Ajudikasi Non Litigasi	0	0	0	0
TOTAL	3	0	5	8

Sumber: Bagian HIJKP, 2022

Sementara Khusus pendampingan penanganan perkara selama periode Januari-Desember 2022 terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkup Aparat Penegak Hukum sebagai berikut:

Tabel 4. 36 Pendampingan Penanganan Perkara Januari-Desember 2022 terkait PBJ

Perkara	Total
Kepolisian	9
Kejaksaan	8
KPK	1
KPPU	6
TOTAL	24

Sumber: Bagian HIJKP DJBK, 2022

5. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) telah melaksanakan Review Kinerja PBJ melalui rapat evaluasi mingguan;
6. Pada TA 2022 ini sudah dilakukan beberapa kegiatan refreshment pengawas pada beberapa BJKW;
7. Dengan terbitnya SKKNI No. 48 tahun 2022, terkait sertifikasi Petugas KK akan dibahas kembali dengan LSP untuk agenda e-sertifikat. Terbitnya SE No 214 tahun 2022 bahwa semua sertifikasi akan di ambil alih oleh Tim penyelenggara sertifikasi yg di bentuk oleh Dirjen Bina Konstruksi dan LPJK;
8. Untuk mengatasi sekaligus mengantisipasi masalah jaringan internet buruk, panitia pelatihan dari tiap BJKW biasanya memberikan kuota internet atau dengan opsi mengubah kegiatan *online* menadi *offline*;
9. Telah dilakukan update peta jabatan pada Tahun 2022. Dalam peta jabatan tersebut dapat terlihat jumlah komposisi pegawai pada tiap-tiap jabatan. Selain itu di tahun 2022 memang telah dilakukan rekrutmen tenaga pendukung individual baru pada beberapa jabatan yang sebelumnya memang membutuhkan tambahan atau memang menggantikan pegawai yang keluar.;
10. Melalui rapat monev progres pembinaan jasa konstruksi selama TA 2022 setditjen telah meminta bjkw untuk mengirimkan rencana kegiatan pelatihan/uji sertifikasi tiap bulannya agar terlihat potensi serapan dan juga kebutuhan sdm masing-masing satker BJKW;
11. Pada TA 2022 ini kegiatan terutama kegiatan pelatihan/uji sertifikasi sudah banyak dilakukan secara offline terutama pada semester II setelah aturan WFO 100%;
12. Data per Desember 2022, OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi Provinsi yang sudah setingkat eselon 3 meningkat 1% yaitu sebanyak 74%, setingkat eselon 4 sebanyak 12%, non structural sebanyak 9% dan yang belum terbentuk yaitu 6%;
13. Telah disusun kalkulator TKDN di website simpk.pu.go.id untuk meningkatkan efektifitas monitoring evaluasi TKDN akan tetapi masih perlu validasi ke banyak stakeholder.

4.3 REALISASI ANGGARAN

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengalami kendala dan hambatan yang cukup besar sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran yang rendah. Penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022 menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu sebesar 96,3% dengan total realisasi keuangan sekitar Rp. 622,5 Milyar dari pagu anggaran sebesar Rp. 646,4 Milyar. Nilai tersebut berada diatas nilai rata-rata kementerian sebesar 94,1%. Berikut adalah realisasi anggaran per Unit Organisasi Kementerian PUPR di tahun 2022:

Tabel 4. 37 Realisasi Anggaran Per Unit Organisasi Kementerian PUPR TA 2022

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU	REALISASI		FISIK
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	%
1	ITJEN	80.566.936	79.936.060	99,2	99,74
2	BPSDM	347.306.031	339.680.104	97,8	100,00
3	DITJEN PR	7.946.724.161	7.764.817.361	97,7	96,58
4	SETJEN	569.448.396	554.011.667	97,3	99,82
5	DITJEN BK	646.449.100	622.526.477	96,3	98,81
6	DITJEN CK	17.600.515.102	16.718.840.772	95	96,98
7	DITJEN SDA	49.057.581.602	46.019.525.995	93,8	97,58
8	DITJEN BM	58.148.060.482	54.489.875.654	93,7	96,32
9	DITJEN PI	792.617.174	676.200.289	85,3	85,94
10	BPIW	226.623.354	187.130.218	82,6	83,51
TOTAL		135.415.892.338	127.452.544.596	94,1	96,83

Sumber: *emonitoring.pu.go.id*, 2022

Berdasarkan rincian penyerapan di atas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menempati urutan ke-5 di lingkungan Unit Organisasi yang ada di Kementerian PUPR. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2022 masih berasal dari adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kegiatan yang direncanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tidak dapat dilaksanakan atau berkurang kualitasnya karena harus mengubah metode pelaksanaan kegiatannya yang sebagian besar menjadi daring (melalui *video conference*). Selain itu juga di tahun 2022 ini DJBK mendapat tugas tambahan terkait dukungan proyek strategis IKN yang mana dari program strategis tersebut DJBK melalui satuan kerja BJKW harus dapat menyelesaikan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi program IKN dalam waktu yang

lumayan singkat dengan SDM yang sama. Sebagai tambahan informasi, berikut adalah rincian penyerapan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022:

Tabel 4. 38 Rincian Penyerapan Satuan Kerja di Lingkungan DJBK TA 2022

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI		FISIK
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(%)	(%)
1	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	2.935.974	2.935.190	99,97	100,00
2	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN BARAT	3.141.433	3.139.800	99,95	100,00
3	BP2JK WILAYAH JAWA TENGAH	2.738.675	2.737.378	99,95	100,00
4	BP2JK WILAYAH DKI JAKARTA	4.501.325	4.498.545	99,94	100,00
5	BP2JK WILAYAH GORONTALO	3.305.782	3.298.452	99,78	100,00
6	BP2JK WILAYAH MALUKU	3.485.247	3.477.626	99,78	99,78
7	DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	21.050.008	20.978.820	99,66	100,00
8	BP2JK WILAYAH ACEH	2.670.607	2.656.896	99,49	100,00
9	BP2JK WILAYAH SULAWESI UTARA	3.109.306	3.092.380	99,46	100,00
10	BP2JK WILAYAH JAMBI	2.742.374	2.726.479	99,42	100,00
11	BP2JK WILAYAH JAWA BARAT	4.232.172	4.201.175	99,27	100,00
12	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	25.155.658	24.932.528	99,11	99,38
13	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	161.003.922	159.431.650	99,02	99,02
14	BJKW V BANJARMASIN	20.720.085	20.488.192	98,88	100,00
15	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	3.099.402	3.062.294	98,80	98,80
16	BP2JK WILAYAH LAMPUNG	2.518.022	2.484.313	98,66	98,66
17	DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	18.495.639	18.201.672	98,41	99,94
18	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN UTARA	2.678.707	2.628.894	98,14	98,14
19	DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI	13.789.538	13.527.293	98,10	100,00
20	BP2JK WILAYAH SULAWESI TENGAH	3.083.357	3.017.341	97,86	97,86
21	BP2JK WILAYAH SUMATERA BARAT	2.991.012	2.926.373	97,84	97,84
22	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	3.008.246	2.938.748	97,69	100,00
23	BP2JK WILAYAH BALI	2.930.078	2.859.995	97,61	100,00
24	BP2JK WILAYAH MALUKU UTARA	3.361.420	3.278.854	97,54	100,00
25	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI	20.803.666	20.164.726	96,93	96,93
26	BP2JK WILAYAH SULAWESI TENGGARA	3.000.951	2.902.745	96,73	96,73
27	BJKW II PALEMBANG	16.578.846	16.014.030	96,59	100,00
28	BP2JK WILAYAH DI YOGYAKARTA	2.946.032	2.836.367	96,28	100,00
29	BP2JK WILAYAH BENGKULU	2.740.357	2.634.271	96,13	96,13
30	BJKW III JAKARTA	63.557.765	61.093.485	96,12	100,00
31	BP2JK WILAYAH NTB	2.686.209	2.581.285	96,09	100,00
32	BP2JK WILAYAH BANTEN	2.778.128	2.657.542	95,66	95,66
33	BP2JK WILAYAH BANGKA BELITUNG	2.734.565	2.614.510	95,61	100,00

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI		FISIK
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(%)	(%)
34	DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	97.295.211	92.521.080	95,09	98,26
35	BP2JK WILAYAH SUMATERA SELATAN	3.065.404	2.915.002	95,09	100,00
36	BP2JK WILAYAH NTT	2.769.896	2.620.458	94,60	100,00
37	BP2JK WILAYAH RIAU	2.720.095	2.560.289	94,13	94,13
38	BJKW I BANDA ACEH	16.151.430	15.183.264	94,01	100,00
39	BJKW VII JAYAPURA	15.250.305	14.208.423	93,17	94,78
40	BP2JK WILAYAH JAWA TIMUR	2.987.435	2.783.237	93,16	93,16
41	BP2JK WILAYAH SULAWESI SELATAN	2.798.173	2.605.822	93,13	93,13
42	BP2JK WILAYAH PAPUA BARAT	3.565.144	3.298.747	92,53	92,53
43	BP2JK WILAYAH SUMATERA UTARA	2.863.893	2.649.516	92,51	100,00
44	BP2JK WILAYAH KEPULAUAN RIAU	2.752.737	2.541.543	92,33	100,00
45	BP2JK WILAYAH PAPUA	3.238.709	2.963.865	91,51	91,51
46	BJKW VI MAKASSAR	23.768.363	21.608.931	90,91	95,19
47	BP2JK WILAYAH SULAWESI BARAT	2.667.560	2.423.104	90,84	100,00
48	BJKW IV SURABAYA	29.980.237	24.623.345	82,13	100,00
	TOTAL	646.449.100	622.526.477	96,30	98,81

Sumber: *emonitoring.pu.go.id*, 2022

Secara umum, Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang memiliki realisasi anggaran yang baik adalah Satuan Kerja Direktorat (rata-rata 97,80%) dan Satuan Kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (rata-rata 96,79%). Sementara Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah memiliki realisasi anggaran yang kurang baik secara umum (rata-rata 79,89%).

Secara umum Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengapresiasi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang tetap berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2022 ini dengan susah payah dan tidak pernah luput dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Efisiensi sumber daya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang sudah ditargetkan pada tahun 2022 masih bersifat umum, yaitu pelaksanaan kegiatan melalui *Video Conference* atau *Online Meeting*. Pandemi COVID-19 menyebabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh entitas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menjadi terbatas. Meskipun kurang efektif, dengan tetap melaksanakan kegiatan melalui daring, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi masih dapat mencapai seluruh target terhadap kegiatan yang telah ditargetkan sesuai

Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, kecuali kegiatan Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi khusus pada indikator tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi. Berikut adalah rincian penyerapan anggaran terhadap program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022 sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR dan DIPA TA 2022 revisi terakhir:

Tabel 4.39 Rincian Penyerapan Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan DJBK TA 2022

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran TA 2022 (Juta Rupiah)		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi			
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina			
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	49.139	43.810	89,15
Program Dukungan Manajemen			
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi			
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	18.495	18.201	98,41
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi			
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa			
IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	200.143	192.070	95,96
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi			
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)			
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	13.789	13.527	98,10
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi			
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi			
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	136.868	104.785	76,56
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	21.050	20.978	99,66
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi			
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi			
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	5.946	5.916	99,49
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	2.000	1.980	99,00
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	3.053	3.019	98,88

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran TA 2022 (Juta Rupiah)		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	161.003	159.431	99,02
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	156.553	154.987	98,99
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	4.450	4.444	99,86

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

4.4 ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan selama tahun 2022. Efektivitas pelaksanaan anggaran tahun 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan beberapa kali revisi anggaran demi terpenuhinya anggaran dalam pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi diantaranya adalah terjadinya tambahan blokir AA pada pagu vokasional sebesar Rp 26 Miliar, revisi DJA terkait buka blokir, serta beberapa kali revisi antar satker untuk menunjang operasional perkatoran dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pada satker terkait.

Realisasi anggaran Direktorat Jendeal Bina Konstruksi pada tahun 2022 sebesar 96,3% dari pagu akhir Rp 646,44 Miliar untuk pelaksaasn tugas dan fungsi serta pencapaian output selama tahun anggaran 2022. Pada tahun 2022, berdasarkan tabel perbandingan realisasi anggaran sesuai jenis belanja telah dilaksanakan efisiensi pada belanja barang operasional dimana realisasi anggaran lebih rendah dari tahun sebelumnya namun layanan perkantoran selama TA 2022 tercapai outputnya yaitu 1(satu) layanan perkantoran.

Tabel 4.40 Perbandingan Realisasi Anggaran DJBK Per Jenis Belanja TA 2021-2022

NO	JENIS BELANJA	REALISASI	
		2021	2022
1	Belanja Pegawai	169.260.104	187.371.087
2	Belanja Barang Operasional	92.048.014	89.550.742
3	Belanja Barang Non Operasional	277.665.737	309.612.697
4	Belanja Modal	64.348.977	35.991.951
	TOTAL	603.322.832	622.526.477

Sumber: *emonitoring.pu.go.id*, 2022

Selain itu, Efisiensi juga telah terlaksana pada program Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar Rp 353.795.517.000 (Tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) menurun dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp 366.285.505.000 (tiga ratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah). Namun target renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2022 tetap tercapai sebagaimana terlampir dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.41 Perbandingan Target dan Capaian Output Dukungan Manajemen Eselon I TA 2021-2022

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2022 terhadap TA 2021
			2021	2022	
SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
	IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	59,78	70,33	17,65
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	59,78	70,33	17,65
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		%	59,78	70,33	17,65
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	91,74	90,64	-1,20
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	30,19	59,50	97,08
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	57,41	60,86	6,01
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi					
	IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	89,30	87,39	-2,14
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa					
	IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	%	87,23	87,42	0,22
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi					
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	98,70	97,1	-1,62
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi					
	SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	%	30,19	59,50	97,08
	IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	12,75	13,51	5,97
	IKK: Persentase tingkat	%	47,64	105,49	121,43

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2022 terhadap TA 2021
		2021	2022	
dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi				
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi				
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	%	57,41	60,86	6,01
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	20,88	23,74	13,70
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	53,61	53,48	-0,23
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	%	92,5	95	2,70
SS: Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya				
IKSS: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	77,93	80,66	3,50
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	76,64	87,55	14,24
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	103,82	102,36	-1,41
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	0
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	80,73	87,96	8,95

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2022

4.5 ANALISIS KINERJA ORGANISASI (BENCHMARKING DENGAN UNIT ORGANISASI LAIN)

Dalam rangka mengetahui efektifitas pencapaian tujuan organisasi perlu dilakukan *benchmarking*. *Benchmarking* bertujuan untuk mengukur dan membandingkan kinerjanya dengan unit organisasi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi sejenis. *Benchmarking* dilakukan dengan

BPSDM dimana terdapat salah satu indikator kinerja yang sama terkait vokasi. Hal ini terkait dengan sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional. Pada TA 2022, capaian sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional DJBK sebesar 188,62%, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan BPSDM yaitu 123,11%. Hal ini didukung dengan capaian IKK Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina tercapai 150,89% dengan target 81% dan realisasi 122,35%, serta capaian output SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina tercapai 150,89% dimana target 30.000 dengan realisasinya 45.268 orang. Berikut adalah perbandingan kinerja 2022 antara DJBK dengan BPSDM Kementerian PUPR.

Tabel 4.42 Tabel Perbandingan Kinerja Dengan Unit Organisasi Terkait

DJBK TA 2022				BPSDM TA 2022			
Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/	2022		Capaian Kinerja Program	Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/	2022		Capaian Kinerja Program
	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi		Kegiatan DJBK TA 2022	Target	Realisasi
SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional				SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional			
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	6%	11,32%	188,62%	IKSS: Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Kompeten dan Siap Kerja	80%	98,49%	123,11%
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional				SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang PUPR yang Bersertifikat			
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	80%	100,00%	125,00%	IKP: Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan Vokasi Bidang PUPR	80%	98,49%	123,11%
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi				Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum			
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina				SK: Meningkatnya mutu kuantitas dan kualitas SDM pendidikan vokasi bidang PUPR yang kompeten			

DJBK TA 2022					BPSDM TA 2022				
Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/		2022		Capaian Kinerja Program	Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/		2022		Capaian Kinerja Program
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kegiatan DJBK TA 2022	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kegiatan BPSDM TA 2022		
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	81%	122,35%	150,89%	IKK: Jumlah peserta didik dan kualitas SDM pendidikan vokasi bidang PUPR yang kompeten	714	767	107,42%		
				1.1 Jumlah mahasiswa program studi vokasional	582	635	109,11%		
				1.2 Jumlah mahasiswa tersertifikasi kompetensi	132	132	100,00%		
Koordinator: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				Pelaksana: Politeknik Pekerjaan Umum					
Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah									
Output Kegiatan:				Output Kegiatan:					
1	SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	30.000	45.268	150,89%	1	Pendidik Politeknik Pekerjaan Umum			
					1.1	Jumlah mahasiswa program studi pendidikan vokasi bidang PUPR	582	635	109,11%

Sumber: Aplikasi e-Sakip Kementerian PUPR, 2022

BAB 5 PENUTUP

A. Permasalahan

Secara umum, hasil capaian kinerja program di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Walaupun terdapat kegiatan dan output yang tidak tercapai, hal tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya sasaran kegiatan pembinaan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) karena 4 kecelakaan konstruksi pada tahun 2022 yang disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan metode kerja, keterbatasan SDM dan kompetensi ahli bidang konstruksi berkelanjutan, dan pengendalian yang tidak dianalisis secara menyeluruh;
2. Tidak tercapainya target tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi yang disebabkan oleh 2 (dua) hal:
 - a. Masih kurangnya OPD bidang jasa konstruksi yang beroperasi dibanding jumlah OPD yang *existing*;
 - b. NSPK Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi baru terbit di akhir tahun TA 2022, LSBU baru beroperasi di awal tahun 2022, banyak BUJK yang masih memiliki SBU KBLI 2017 yang masih berlaku.

Selain dua permasalahan di atas, pada TA 2022 terjadi kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang perlu dimitigasi risikonya agar tidak berdampak pada pencapaian kinerja di TA 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyak ditemukan penggunaan produk dalam negeri/UMKM yang belum memiliki sertifikat TKDN dan/atau memiliki sertifikat TKDN yang telah kadaluwarsa (nilai TKDN produk = 0%), sehingga sangat mengurangi nilai capaian TKDN pada paket pekerjaan konstruksi terkait;
2. Perhitungan capaian TKDN masih dilakukan berdasarkan RAB Kontrak karena sulitnya mendapatkan invoice/faktur pembayaran penyedia jasa, terutama pada paket pekerjaan konstruksi yang sudah selesai dilaksanakan;
3. Regulasi dan kebijakan yang ada di PUPR sangat minim dan bersifat sektoral. Tidak ada amanat UU atau peraturan lain yang lebih tinggi utk membuat regulasi yang

husus mengatur Building Information Modelling (BIM) untuk diterapkan di seluruh PUPR secara general;

4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pengaduan masyarakat (pelayanan informasi publik) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi karena menunggu SOP dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Mengingat SOP tersebut dibutuhkan sebagai panduan pelayanan pengaduan terutama di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang relatif banyak mendapat pengaduan dari masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, berikut adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai langkah perbaikan pada tahun anggaran berikutnya:

1. Untuk mengatasi target sasaran kegiatan pembinaan sistem manajemen keselamatan konstruksi yang tidak tercapai akan dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan *refreshment* pengawas untuk menjaring pengawas-pengawas dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah;
 - b. Pemantauan dan Evaluasi pada Proyek Konstruksi dengan Potensi Bahaya Tinggi oleh Komite Keselamatan Konstruksi;
 - c. Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk Tingkat General Manajer Kontraktor, Pemimpin Tim, Insinyur Ahli (Konsultan Pengawas), Mahasiswa, dan Tenaga Terampil;
 - d. Sertifikasi K3 Konstruksi dan Petugas Keselamatan Konstruksi;
 - e. Pemberdayaan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi sebagai *second line defense* terhadap kecelakaan konstruksi, antara lain dengan pengaturan izin bekerja (*permit to work*) dan *checklist* pekerjaan yang harus ditandatangani Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi.
2. Untuk mengatasi target tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi yang tidak tercapai akan dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Sosialisasi tentang kewenangan jasa konstruksi di daerah dan dukungan legalisasi NSPK pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah;
- b. Sosialisasi terkait kewenangan jasa konstruksi di daerah, penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada TA 2023, perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan Balai Jasa Konstruksi Wilayah dalam rangka verifikasi komitmen dan capaian TKDN, serta Penguatan para PPK untuk menyiapkan nilai ambang batas TKDN paket;
2. Penyederhanaan proses persetujuan serta rekapitulasi data dan realisasinya terkait penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing;
3. Penyusunan pedoman pengaturan dalam penerapan teknologi BIM pada kementerian PUPR;
4. Terkait Acuan Pedoman atau Standar Operasional Prosedur Pengaduan dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR yang saat ini sedang dalam proses penyusunan, Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi akan berkoordinasi secara intensif agar SOP pengaduan dapat segera diterbitkan dan disosialisasikan kepada internal unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Mediawan
 Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua



M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama



YUDHA MEDIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	
SP Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	80,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	57,00%
1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	84,00%
2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	28,00%
3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	59,00%
Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	71,54%

Program:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 75.139.000.000,00
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 524.861.000.000,00
	Rp 600.000.000.000,00

Jakarta, Januari 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI



YUDHA MEDIAWAN

Gambar 6. 1 Perjanjian Kinerja Awal TA 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Mediawan
 Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 30 September 2022

Pihak Pertama



YUDHA MEDIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	
SP Meningkatkan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	80,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatkan dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	57,00%
1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	84,00%
2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	28,00%
3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	59,00%
Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	71,54%

Program:

- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 75.139.000.000,00

Rp 574.224.000.000,00

Rp 649.363.000.000,00

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 30 September 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI



YUDHA MEDIAWAN

Gambar 6. 2 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2022 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

2. PENGHARGAAN

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapat penghargaan sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yang baik, yaitu sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapatkan penghargaan Unit Organisasi Terbaik II Transformasi Digital Kementerian PUPR Tahun 2022 Pasa Peringatan Hari Bakti PUPR ke-77;
2. Pegawai Muda Teladan, a.n. Dimas Bayu Susanto, ST, MPSDA (Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi);
3. Juara 2 Lomba Cerdas Cermat dalam rangka Hari Bakti PUPR ke-77;
4. Beberapa satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah berhasil mendapatkan sertifikasi SMAP pada tahun 2022 dari Lembaga Mutu Internasional yaitu:
 - a. BP2JK Wilayah Aceh;
 - b. BP2JK Wilayah Riau;
 - c. BP2JK Wilayah Kepulauan Riau;
 - d. BP2JK Wilayah Jambi;
 - e. BP2JK Wilayah Banten;
 - f. BP2JK Wilayah Kalimantan Timur;
 - g. BP2JK Wilayah Sulawesi Tengah;
 - h. BP2JK Wilayah Sulawesi Utara;
 - i. BP2JK Wilayah Papua;
 - j. BJKW I Banda Aceh;
 - k. BJKW II Palembang;
 - l. BJKW III Jakarta;
 - m. BJKW IV Surabaya;
 - n. BJKW VI Makassar.





Gambar 6. 3 Penghargaan Pegawai Muda Teladan Kementerian PUPR 2022



Gambar 6. 4 Juara 2 Lomba Cerdas Cermat dalam rangka Hari Bakti PUPR ke-77



Gambar 6. 5 Penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP kepada BJKW III Jakarta



Gambar 6. 6 Penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP kepada BP2JK Wilayah Sulawesi Utara

3. BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA


**BERITA ACARA KESEPAKATAN
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2022
UNIT ORGANISASI: BINA KONSTRUKSI**

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
SS-4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional					Faktor Pendukung Keberhasilan: 1. Tersusunnya, SKKNI baru dan SKKNI terbarukan bidang konstruksi; 2. Sinergi berbagai pihak internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan pembinaan SDM vokasional; 3. Efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring.
IKSS Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	6,00	11,32	188,6	
SS-5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya					Faktor Pendukung Keberhasilan: 1. Terlaksananya pengelolaan dan penerapan 98 NSPK terkait tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dukungan rantai pasok konstruksi, kinerja kelembagaan jasa konstruksi; 2. Tersusunnya SKKNI baru dan SKKNI terbarukan bidang konstruksi; 3. Sinergi berbagai pihak internal dan eksternal dalam rangka pembinaan sumber daya konstruksi; 4. Efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring.
IKSS Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	57,00	70,33	123,39	

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022.

Jakarta, 8 Februari 2023

Mengetahui,
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Rachman Atief Dienaputra

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Yudha Mediawan

Gambar 6. 7 Berita Acara Kesepakatan Laporan Kinerja DJBK Tahun 2022

4. DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 6. 8 Kegiatan Konstruksi Indonesia 2022



Gambar 6. 9 Kuliah Umum Dirjen Bina Konstruksi di Universitas Andalas Padang



Gambar 6. 10 Kunjungan Kerja Dirjen Bina Konstruksi ke Asbuton Bau-Bau



Gambar 6. 11 MoU DJBK dengan Universitas Indonesia





Gambar 6. 12 Pelatihan Operator Launching Girder



Gambar 6. 13 Rapat Koordinasi DJBK TA 2022



Gambar 6. 14 Pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Untuk Penyiapan Pembangunan Infrastruktur IKN